



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH TAHUN 2022-2025

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Inovasi Daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif sehingga mempercepat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dan daya saing daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam kesatuan sistem inovasi daerah;
- b. bahwa guna mewujudkan tujuan dan sasaran sistem inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai kebijakan yang akan menjadi panduan dalam menjabarkan arah pembangunan yang berbasis inovasi di Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, bahwa Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten/Kota.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2022-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembangunan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH TAHUN 2022-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu system untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga penunjang inovasi dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan menuju visi Daerah yaitu Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Roadmap Penguatan SIDA adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan Sistem Inovasi Daerah untuk periode 2022-2025.
10. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas antara lain membuat rumusan kebijakan Penguatan SIDA di daerah.

BAB II ROADMAP PENGUATAN SIDA

Pasal 2

Roadmap Penguatan SIDA merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Daerah Tahun 2022-2025 yang disusun oleh Tim Koordinasi Penguatan SIDA yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Roadmap Penguatan SIDA Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. Salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif.
- b. Salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (renja) tahun 2022-2025.

BAB III PENYUSUNAN PENGUATAN SIDA

Pasal 4

- (1) Roadmap Penguatan SIDA Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I. Pendahuluan;

- b. Bab II. Kondisi wilayah dan SIDA saat ini;
 - c. Bab III. Tantangan dan peluang;
 - d. Bab IV. Kondisi SIDA yang diharapkan;
 - e. Bab V. Strategi dan arah kebijakan penguatan SIDA;
 - f. Bab VI. Fokus dan program prioritas SIDA
 - g. Bab VII. Rencana aksi penguatan SIDA
- (2) Uraian Rincian Roadmap Penguatan SIDA Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Roadmap SIDA:

- a. Rencana Aksi dari Roadmap SIDA di implementasikan dalam bentuk program kegiatan beserta anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- b. Sekretaris Daerah merupakan Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDA.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA di Perangkat Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati.

BAB V PERUBAHAN ROADMAP PENGUATAN SIDA

Pasal 7

- (1) Perubahan Roadmap Penguatan SIDA hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengubah capaian sasaran tahunan dengan tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020



ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)

KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022-2025



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Penyusunan Dokumen *Roadmap* Penguatan SIDa ini merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengimplementasikan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan dokumen *Roadmap* Penguatan SIDa ini.

. Akhir kata semoga dokumen *Roadmap* ini dapat bermanfaat bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran melalui Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pangandaran.

PANGANDARAN, DESEMBER 2020

PENYUSUN

DAFTAR ISI

	Hal	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR GAMBAR	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	4
	1.3 Keterkaitan Dokumen Roadmap Penguatan SIDA Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	5
	1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Dengan Roadmap Penguatan SIDA	6
	1.5 Sistematika Roadmap Penguatan SIDA	7
BAB 2	KONDISI WILAYAH DAN SIDA SAAT INI	9
	2.1 Aspek Geografis dan Demografi	9
	2.1.1. Aspek Geografis	9
	2.1.2 Aspek Demografi	12
	2.2 Aspek Perekonomian	17
	2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	19
	2.4 Aspek Daya Saing	19
	2.5 Kondisi SIDA Saat ini	28
BAB 3	TANTANGAN DAN PELUANG	81
	3.1 Tantangan	81
	3.2 Peluang	85
	3.2.1. Peluang Penguatan SIDA dari Aspek Kebijakan	85
	3.2.2. Peluang Penguatan SIDA dari Aspek Unsur SIDa	90
	3.2.3. Peluang Penguatan SIDA dari Aspek Pengembangan SIDA	92
BAB 4	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	95
BAB 5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA	108
	5.1 Strategi Penguatan SIDA	133
	5.2 Arah Kebijakan Penguatan SIDA	136
BAB 6	FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA	145
	6.1 Fokus dan Program Penguatan SIDA Kabupaten Pangandaran	145
BAB 7	RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA	148
DAFTAR PUSTAKA	~ 190	

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1	Keterkaitan dokumen Roadmap Penguatan SIDA dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah	6
Gambar 2	Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran	11
Gambar 3	Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	13
Gambar 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019	14
Gambar 5	Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Payau Tahun 2019	23
Gambar 6	Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Laut Tahun 2019	24
Gambar 7	Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Tawar Tahun 2019	24
Gambar 8	Keterkaitan Industri Pariwisata dengan Industri/Sektor lainnya	36
Gambar 9	Konsep Ecotourism	38
Gambar 10	Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pangandaran	40
Gambar 11	Lokasi Tempat Wisata dan Jenis Daerah Tujuan Wisata Pangandaran	41

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019	14
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019	16
Tabel 3	Laju Pertumbuhan IPM Tahun 2018-2019	19
Tabel 4	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produk Komoditas Palawija Tahun 2018-2019	21
Tabel 5	Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produk Komoditas Biofamaka Tahun 2018-2019	21
Tabel 6	Data Komoditas Ekspor Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2019	26
Tabel 7	Sebaran Wisata dan Desa Wisata di Kabupaten Pangandaran	41
Tabel 8	Kondisi Capaian Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	48
Tabel 9	Kondisi SIDA Kabupaten Pangandaran Saat Ini (Tahun 2020)	65
Tabel 10	Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penguatan SIDA di Kabupaten Pangandaran	81
Tabel 11	Data Inovasi Produk Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kab Pangandaran	90
Tabel 12	Data Layanan Masyarakat Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kab Pangandaran	93
Tabel 13	Kondisi SIDA Yang Diharapkan Pada Tahun 2025	96
Tabel 14	Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025 Dalam RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025	124
Tabel 15	Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Pangandaran	140
Tabel 16	Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025	148

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem inovasi merupakan salah satu pendekatan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*). Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (*technology pull*) atau kebutuhan teknologi (*technology push*) semata namun merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan (integrasi) antara pelaku inovasi maupun pelaku pembangunan. Taufik (2005) mendeskripsikan sistem inovasi sebagai kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi, dan proses produktif, yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan difusi inovasi.

Penguatan sistem inovasi dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah yang progresif dan berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, maka tujuan pokok penguatan sistem inovasi adalah :

1. Meningkatkan kemampuan Bangsa dan Negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) dan melindungi kepentingan masyarakat (*public interest*).
2. Mendukung percepatan peningkatan daya saing (*competitiveness*) dan penguatan kohesi sosial (*social cohesion*).
3. Mendukung kemandirian Bangsa dan menjaga kedaulatan NKRI (*sovereignty*).

Dalam kaitan ini, penguatan sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah, karena secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing nasional maupun daerah yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diwujudkan untuk menunjang penguatan Sistem Inovasi Nasional. Penguatan SIDa merupakan wahana dalam memperkuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi di daerah yang menjadi bagian integral dari Penguatan Sistem Inovasi Nasional. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan daya

saing daerah. Dengan demikian, penguatan SIDA menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan daerah.

Dalam konteks daerah, sistem inovasi ini juga dinilai sangat penting dalam menentukan sumber keunggulan daya saing, misalnya:

1. Kesalingbergantungan (yang tak dapat ditukar) yang menghasilkan *knowledge spillover* :
 - a. Pengetahuan dan praktik yang dapat ditransfer antar perusahaan.
 - b. Akan efektif bagi alih pengetahuan jika “jarak” antar pihak dekat (termasuk secara fisik) dan berkembang interaksi yang cukup intensif.
 - c. Alih pengetahuan melalui jaringan setempat.
2. Berkembangnya jaringan, yang pada dasarnya akan efektif jika terbangun kondisi saling percaya :
 - a. Saling berbagi informasi dalam kelompok perusahaan.
 - b. Berbasiskan ekonomi daerah, yang sesuai dengan potensi terbaik setempat.
3. Modal sosial (*social capital*), baik dalam pengertian faktor-faktor historis dan kultural daerah termasuk norma-norma (*communitarian*) maupun faktor positif yang berkembang karena interaksi berbagai pihak dalam aktivitas sosial ekonomi yang saling terkait (*performance based*) sehingga mendorong rasa saling percaya, saling mengerti, terbuka, dan lainnya :
 - a. Rasa saling percaya sebagai aset yang unik karena memiliki nilai namun “tidak” mempunyai “harga.”
 - b. Saling berbagi tanggung jawab dengan mitra kerja.
 - c. Memfasilitasi kerjasama antarperusahaan dan antarsektor.
 - d. Mempercepat pembelajaran dan aliran pengetahuan (Taufik, 2005).

Penjelasan detail tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tercantum dalam Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dalam peraturan bersama tersebut dijelaskan bahwa Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Adapun ruang lingkup penguatan SIDA meliputi kebijakan penguatan SIDA, penataan unsur SIDA, dan pengembangan SIDA.

Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kebijakan penguatan SIDA, maka kebijakan Penguatan SIDA harus tercantum dalam rencana strategis lima tahunan daerah, yaitu dalam *Roadmap* Penguatan SIDA, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). *Roadmap* Penguatan SIDA sendiri memuat kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang, kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan, fokus dan program prioritas, serta rencana aksi penguatan SIDA. Pada intinya, *Roadmap* Penguatan SIDA mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Penyusunan *roadmap* harus bersifat *bottom up* untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan potensial yang akan dipecahkan dan dikombinasikan dengan pendekatan *top down* melalui hasil-hasil kajian dan pemikiran para pakar, akademisi, peneliti, serta praktisi yang nantinya menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan.

Kendala yang sering muncul dalam implementasi SIDA adalah banyaknya program-program pembangunan yang masih berorientasi pada rutinitas, sporadis, dan parsial. Masing-masing perangkat daerah hanya mengedepan program yang terkait langsung dengan kewenangan dan tidak memikirkan kaitan program tersebut dengan program lainnya yang merupakan lintas kewenangan antar perangkat daerah. Ini menunjukkan belum terbangunnya semangat ke arah sinergitas dan integrasi. Masing-masing perangkat daerah ingin menunjukkan kinerja organisasinya dan lebih berorientasi pada hirarki struktural. Belum ada kerangka konsep yang mampu mengarahkan kerja kolaboratif dalam suatu sistem dan aspek hilirisasi dan aglomerasi pembangunan. Implementasi penguatan SIDA pun belum seragam di semua daerah. Sebagian memiliki cara pandang bahwa SIDA hanya berfokus pada klaster industri. Disisi lain ada yang memandang SIDA sebatas produk berupa komoditi unggulan tertentu dalam kawasan tertentu atau *one village one product*.

Paradigma SIDA yang harus dibangun adalah sebuah sistem yang mencakup hierarki antar sektor yang mampu berkolaborasi secara terintegrasi dalam kerangka konsep pembangunan yang memenuhi asumsi hilirisasi, aglomerasi, multidimensional, berkelanjutan, serta berdaya saing. Karena itu, cara pandang terhadap *Roadmap* Penguatan SIDA ini harus bersifat multi dimensional, melalui pemetaan zonasi ekonomi, sains dan teknologi, sosial budaya, terintegrasi dengan kawasan strategis dan pariwisata, serta penempatan ruang publik kreatif yang tepat sasaran sesuai dengan karakteristik

potensi kewilayahan dan tersistem, sehingga diharapkan dapat menjamin terjadinya sistem hilirisasi kluster industri yang akan diangkat dalam SIDA (Taufik, 2005).

Oleh karena itu penyusunan *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pangandaran menjadi sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam mendorong terciptanya kolaborasi dan inovasi yang bermanfaat dalam meningkatkan capaian pembangunan. Melalui dokumen *Roadmap* SIDA, diharapkan potensi-potensi lokal di Kabupaten Pangandaran dapat diidentifikasi untuk selanjutnya dikembangkan secara inovatif untuk memperoleh *outcome* yang optimal dan berkelanjutan melalui kolaborasi antar pelaku pembangunan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan *Roadmap* SIDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

1.3. KETERKAITAN DOKUMEN ROADMAP PENGUATAN SIDA DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pada uraian diatas telah dijelaskan bahwa untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kebijakan penguatan SIDA, maka kebijakan Penguatan SIDA harus tercantum dalam rencana strategis lima tahunan daerah, yaitu dalam *Roadmap* Penguatan SIDA, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bagan berikut ini menggambarkan keterkaitan dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan dokumen Roadmap Penguatan SIDA dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah

1.4. KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PANGANDARAN DENGAN ROADMAP PENGUATAN SIDA

Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk mempercepat proses pencapaian pembangunan daerah melalui terobosan kolaborasi dan inovasi, oleh karena itu dalam penyusunannya harus memperhatikan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 dan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025 yang merupakan hasil Kajian Teknokratik. Adapun Visi Daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 adalah **“Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”** yang dijabarkan dalam 6 (enam) Misi, yaitu :

Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan yang Akuntabel dan Bersih.

Misi 2 : Membangun Sumber daya Manusia yang Berkualitas, Mandiri dan Religius

Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing.

Misi 4 : Mewujudkan Pemanfaatan Ruang, Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berwawasan Lingkungan.

Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial Budaya yang Bertumpu pada Nilai Religius dan Kearifan Lokal.

Misi 6 : Menciptakan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang Kolaboratif.

Sementara itu Visi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025 hasil Kajian Teknokratik yaitu : **Kabupaten Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal** yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas
- Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan pariwisata dengan menerapkan kearifan lokal
- Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal
- Misi 5 : Meningkatkan ketahanan ekonomi dan perlindungan sosial yang berkeadilan

Berdasarkan uraian diatas, diharapkan melalui penguatan SIDA maka upaya-upaya peningkatan daya saing dilakukan dengan lebih mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) yang dilaksanakan secara bersinergi, berkolaborasi dan berkelanjutan melalui peran aktif seluruh aktor pembangunan di daerah.

1.5. SISTEMATIKA ROADMAP PENGUATAN SIDA

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012, maka sistematika Roadmap SIDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025 terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya roadmap SIDA, dasar hukum, keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Dengan Roadmap SIDA, Keterkaitan Dokumen Roadmap SIDA Dengan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistematika Roadmap SIDA

BAB 2 : KONDISI WILAYAH DAN SIDA SAAT INI

Bab ini menyajikan profil daerah dan daya saing daerah serta mendeskripsikan kondisi SIDA Kabupaten Pangandaran saat ini.

BAB 3 : TANTANGAN DAN PELUANG

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang penting dan sangat menentukan dalam Penguatan SIDA di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang

BAB 4 : KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN

Bab ini berisi kondisi SIDA yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan berdasarkan hasil analisis kondisi SID saat ini, tantangan dan peluang Penguatan SID

BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

Bab ini menjelaskan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi penguatan SID digambarkan melalui pilar-pilar atau lima prakarsa strategis.

BAB 6 : INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

Bab ini berisi fokus program prioritas yang merupakan uraian rinci dari setiap elemen KKI yang menggambarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta program yang harus dijalankan.

BAB 7 : RENCANA AKSI

Bab ini menjelaskan rencana aksi Penguatan SIDA yang merupakan wujud implementasi strategi Penguatan SIDA dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas, dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan SIDA, pendanaan, dan penanggung jawab

BAB 2

KONDISI WILAYAH DAN SIDA SAAT INI

Bab ini menggambarkan kondisi Sistem Inovasi di Kabupaten Pangandaran yang sedang berjalan saat ini bagi peningkatan daya saing berbasis potensi daerah termasuk identifikasi kebutuhan manfaat, identifikasi regulasi, identifikasi industri, identifikasi sumberdaya dan sumbernya serta bagaimana implementasinya. Kondisi ini menggambarkan bagaimana penguatan kebijakan SIDA, Penguatan unsur-unsur SIDA, dan Pengembangan SIDA.

2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

2.1.1. ASPEK GEOGRAFIS

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Luas Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.010,92 km² yang tersebar dalam 10 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Parigi;
- b. Kecamatan Cijulang;
- c. Kecamatan Cimerak;
- d. Kecamatan Cigugur;
- e. Kecamatan Langkaplancar;
- f. Kecamatan Mangunjaya;
- g. Kecamatan Padaherang;
- h. Kecamatan Kalipucang;
- i. Kecamatan Pangandaran; dan
- j. Kecamatan Sidamulih.

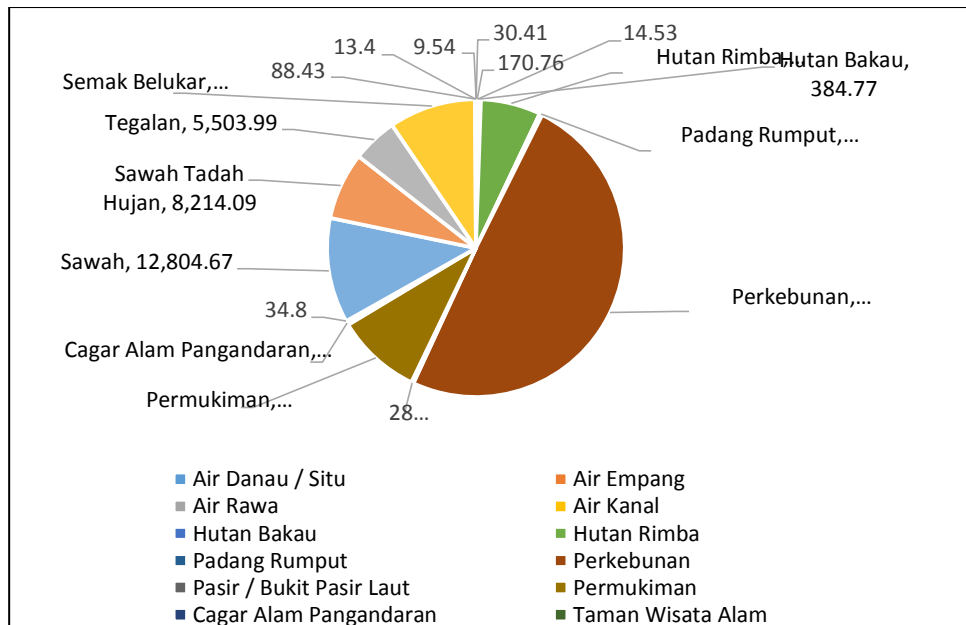
. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih

- Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Ditinjau dari Topografi, Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0-700 mdpl. Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi di dari selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, Kabupaten Pangandaran memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam (*LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019*).

Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sudah bervariasi, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten yang cukup ramai perkembangan penduduknya. Penggunaan lahan pada Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran
(Sumber : LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019, diolah).

Berdasarkan peta rawan bencana, Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam sering terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran antara lain tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Tsunami rawan terjadi karena wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara banjir sering terjadi karena wilayah Kabupaten Pangandaran dilewati sungai besar dengan debit air yang cukup tinggi. Gempa bumi juga rawan terjadi karena terdapat patahan-patahan di wilayah Kabupaten Pangandaran, sementara bencana longsor dapat terjadi akibat jenis tanah yang memang rawan dan kelerengan terjal di beberapa tempat di Kabupaten Pangandaran.

a) Rawan Bencana Gempa Bumi Tektonik dan Tsunami

Di bagian tengah-timur Pangandaran terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa. Letak Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan berbatasan langsung dengan laut mengakibatkan Kabupaten Pangandaran juga sangat rawan terkena bencana tsunami. Pantai Pangandaran yang berbentuk teluk dan memanjang dengan kemiringan lereng yang landai menjadi semacam “kantung tsunami” sehingga kawasan pesisirnya rawan bencana tsunami.

b) Rawan Bencana Gerakan Tanah

Kondisi tanah yang tidak stabil dan kemiringan lereng yang besar mengakibatkan daerah perbukitan Pangandaran rawan bencana gerakan tanah. Curah hujan tinggi serta alih fungsi lahan di daerah perbukitan juga menjadi faktor penyebab meningkatnya potensi gerakan tanah.

c) Rawan Bencana Banjir

Wilayah Kabupaten Pangandaran yang berupa dataran rendah merupakan hasil proses pengendapan material laut dan sungai sehingga daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah dataran banjir yang selalu tergenang jika debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah daerah yang cukup subur namun tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Pertanian di daerah ini hanya dapat dilakukan pada saat musim kemarau. Pengurangan risiko banjir secara mekanik dapat dilakukan namun akan menimbulkan banjir di daerah lainnya sehingga pengembangan pertanian lebih baik dilakukan di daerah yang tidak rawan banjir (*LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019*).

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data jumlah penduduk hasil pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 semester 1 yaitu sebanyak 422.615 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 211.220 orang dan perempuan sebanyak 211.395 orang dengan sex rasio 99,92 persen, yang menggambarkan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama atau seimbang (*LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019*).

B. Kepadatan Penduduk

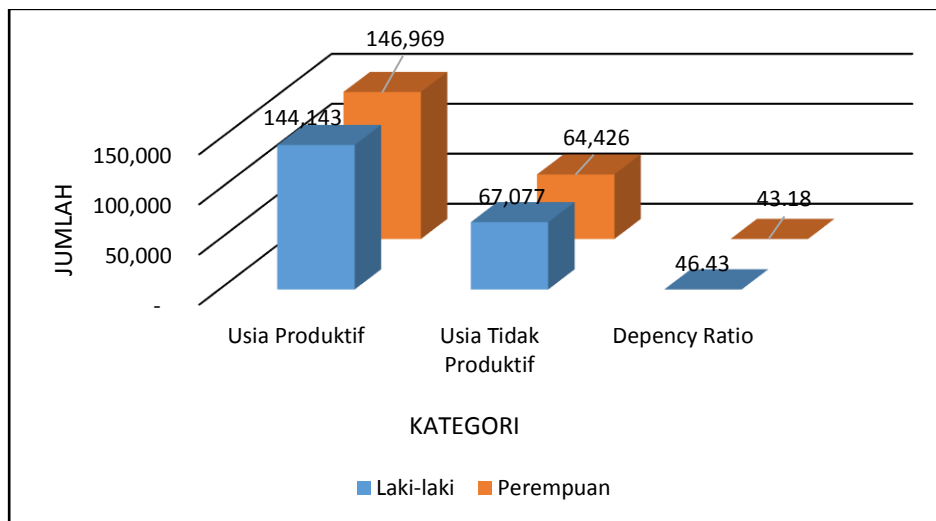
Pada Tahun 2019, penyebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar Kecamatan, mulai dari yang terendah sebesar 233,53 jiwa per km² yaitu di Kecamatan Cigugur yang luas wilayahnya 97,29 km², dan kepadatan penduduk terendah kedua yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan tingkat kepadatan 288,73 jiwa per km². Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi yaitu di Kecamatan Pangandaran dengan kepadatan 941,90 jiwa per km², dan tertinggi kedua yaitu di Kecamatan Padaherang dengan kepadatan 774,10 jiwa per km² dari luas wilayah 89,27 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 69.104 jiwa.

Ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk pada setiap Kecamatan, maka konsentrasi penduduk paling banyak terpusat di Kecamatan Padaherang, Pangandaran,

Langkaplancar, Cimerak dan Parigi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di antaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya serta mengembangkan kemampuan pada segala bidang.

Gambar di bawah ini menyajikan angka beban ketergantungan penduduk. jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Pangandaran 291.112 orang setara 68,88 persen, sedangkan usia tidak produktif 131.503 orang atau setara 31,12 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran (*LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019*).

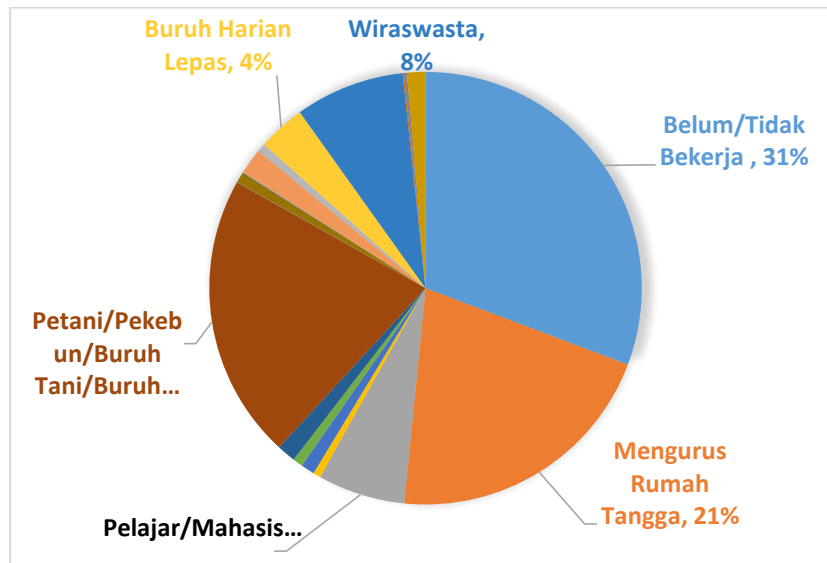


Gambar 3. Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019
(Sumber : *LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019, diolah*)

C. Jumlah Penduduk yang Bekerja

Tabel berikut adalah jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran berdasarkan jenis pekerjaannya. Sebanyak 30,75% penduduk Kabupaten Pangandaran belum atau tidak bekerja dan 20,82% penduduk hanya bekerja mengurus rumah tangga. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan terobosan-terobosan guna menciptakan lapangan kerja, tidak hanya untuk mengatasi pengangguran tetapi juga untuk memberdayakan ibu rumah tangga akan dapat bekerja dari rumah. Di sisi

lain jumlah petani/pekebun/buruh tani/buruh kebun mendominasi struktur jumlah penduduk berdasarkan lapangan kerja, yaitu mencapai 21,29% dan wiraswasta mencapai 8,18%. Sementara jumlah Nelayan/Perikanan/Buruh hanya 0,78% dan Peternak/Buruh Peternakan hanya 0,04%.



Gambar 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2019
(Sumber : LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019, diolah)

Tabel 1

Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	PROSENTASE
Belum/Tidak Bekerja	129,952	30.75
Mengurus Rumah Tangga	88,009	20.82
Pelajar/Mahasiswa	27,613	6.53
Pensiunan	2,364	0.56
PNS, TNI, Polri	4,359	1.03
Perdagangan	3,119	0.74
Pedagang	5,949	1.41
Petani/Pekebun/Buruh Tani/Buruh Kebun	89,958	21.29
Peternak/Buruh Peternakan	175	0.04
Nelayan/Perikanan/Buruh	3,310	0.78
Industri	130	0.03
Konstruksi	32	0.01
Transportasi	161	0.04
Karyawan Swasta/BUMN/D	8,038	1.90
Karyawan Honorer	2,726	0.65
Buruh Harian Lepas	14,950	3.54
Pelaut	47	0.01
Peneliti	4	0.00

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	PROSENTASE
Wiraswasta	34,566	8.18
Dokter,Bidan,Perawat	378	0.09
Guru, Dosen	969	0.23
Pekerjaan lainnya	5,806	1.37
JUMLAH TOTAL	422,615	

(Sumber : LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019, diolah)

D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Blm Tamat SD/ Sederajat	SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	D I/ II	D III	Strata I	Strata II	Strata III	Jumlah
1	Parigi	8,810	3,141	17,739	7,039	6,040	343	379	1,547	121	6	45,165
2	Cijulang	6,221	1,723	10,885	4,246	3,576	182	233	864	68	3	28,001
3	Cimerak	10,965	3,191	22,869	7,072	3,400	133	141	655	35	-	48,461
4	Cigugur	5,173	1,734	10,579	3,065	1,621	106	62	368	11	1	22,720
5	Langkaplancar	8,937	4,717	23,635	9,591	3,241	189	102	713	35	-	51,160
6	Mangunjaya	6,966	2,066	14,207	5,632	3,220	131	172	560	30	2	32,986
7	Padaherang	17,447	4,732	28,119	10,815	6,148	226	338	1,208	66	5	69,104
8	Kalipucang	9,106	2,752	16,514	5,754	3,595	104	163	607	35	5	38,635
9	Pangandaran	13,909	4,081	18,825	9,359	8,869	270	441	1,379	99	7	57,239
10	Sidamulih	6,588	2,226	12,820	3,720	2,891	118	176	571	31	3	29,144
	Jumlah	94,122	30,363	176,192	66,293	42,601	1,802	2,207	8,472	531	32	422,615

(Sumber : LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019)

2.2. ASPEK PEREKONOMIAN

Sampai dengan tahun 2019, sektor pertanian memberi sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran. Hal ini dapat dipahami karena lahan pertanian di wilayah Kabupaten Pangandaran masih cukup luas. Pada tahun 2019, PDRB atas dasar harga berlaku dari sektor pertanian mencapai Rp. 3,065 trilyun sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 2,837 trilyun, maka terjadi peningkatan sebesar Rp.228,578 milyar atau 8,06%. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Pangandaran berasal dari sub sektor tanaman bahan makanan, diikuti oleh sub sektor lainnya, yaitu sub sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Namun demikian, dalam tahun 2016-2019 kontribusi dari sektor pertanian cenderung fluktuatif. Kondisi tersebut disebabkan adanya peningkatan nilai tambah dari sektor lain yang lebih cepat. Fenomena ini dapat merupakan transisi ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke tersier (jasa) yang dianggap sebagai indikasi kemajuan perekonomian. Pada sisi lain, saat ini luas lahan pertanian cenderung terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Kecepatan sektor pertanian dalam menciptakan nilai tambah terlihat lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. PDRB atas dasar harga konstan dari sektor pertanian pada tahun 2019 sebesar Rp.1,815 trilyun sedangkan tahun 2018 sebesar Rp.1,756 trilyun. Sehingga nilai tambahnya hanya meningkat sebesar Rp.58,660 milyar atau sekitar 3,34% dari tahun 2018. Kendati demikian, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat tahan terhadap gejolak moneter yang ada, ini terbukti pada masa krisis, sektor pertanian merupakan penyangga perekonomian di Indonesia pada umumnya.

Disamping sektor pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2019 sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu menciptakan nilai tambah (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 2,283 trilyun. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yang nilainya sebesar Rp. 2,086 trilyun, maka terjadi peningkatan sebesar Rp.197,878 milyar atau 9,49% dari tahun 2018. Jika dihitung atas dasar harga konstan, PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2019 mencapai Rp.1,762 trilyun atau meningkat 6,14% dari tahun 2018 yang saat itu masih sebesar Rp. 1,660 trilyun.

Sektor transportasi dan pergudangan menduduki peringkat ketiga yang mengalami peningkatan setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku sektor Transportasi dan Pergudangan tahun 2019 sebesar Rp.1,318 trilyun sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp.1,235 trilyun. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar Rp.83,675 milyar atau sekitar

6,78% dari tahun 2018. Peningkatan PDRB di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa hiburan menunjukkan adanya dampak dari pembangunan pariwisata.

Potensi pariwisata di Kabupaten Pangandaran dapat dikembangkan untuk skala nasional, bahkan skala internasional. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat infrastruktur yang memadai dan dukungan dari investor lokal maupun internasional dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Perkembangan pariwisata saat ini belum berdampak besar terhadap sektor industri pengolahan di Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2019, PDRB atas dasar harga berlaku dari sektor industri masih relatif kecil yaitu sebesar Rp. 540,706 milyar, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 501,953 milyar. Hal ini berarti selama tahun 2019, terjadi peningkatan nilai tambah sebesar Rp. 38,753 milyar. Kemudian berdasarkan harga konstan, PDRB dari sektor industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar Rp. 382,886 milyar, sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 359,440 milyar. Dengan demikian dalam tahun 2019 terjadi pertumbuhan sebesar Rp. 23,446 milyar. Keadaan ini dapat dipahami karena industri besar/ sedang di Kabupaten Pangandaran relatif masih sedikit. Saat ini usaha industri pengolahan yang ada masih berupa industri pengolahan makanan berskala mikro/kecil/rumah tangga. Industri gula merah yang banyak di Kabupaten Pangandaran merupakan usaha rumah tangga yang masih rentan dalam ketersediaan bahan baku, akibat perubahan musim. Sementara itu, pariwisata di Kabupaten Pangandaran ini memerlukan produk khas yang *branded* serta menarik untuk dijadikan oleh-oleh.

Tahun 2019, perekonomian di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,41 % telah naik menjadi sebesar 5,96 % pada tahun 2019. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang semakin besar menunjukkan terjadi percepatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Pangandaran.

Salah satu dampak dari Laju Pertumbuhan Ekonomi yang semakin pesat terlihat dari besaran pengeluaran per kapita penduduk. Dalam situasi perekonomian yang stabil (inflasi terkendali), nilai pengeluaran yang meningkat menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Pada tahun 2018 pengeluaran per kapita di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp.8.968.000,00/tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp.9.423.000,00/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya beli masyarakat seiring semakin pesatnya aktivitas ekonomi di Kabupaten Pangandaran

Kebijakan perijinan, retribusi/pajak dan keamanan yang kondusif dapat membawa iklim berinvestasi sehingga aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran bertambah

pesat dan dimungkinkan terbukanya lapangan kerja baru yang mampu menyerap sumber daya manusia yang ada, terutama penduduk miskin. Terserapnya tenaga kerja tentu merupakan salah satu jaminan sumber penghasilan rumahtangga yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi berbagai pilihan kebutuhan hidup (LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019).

2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Capaian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari capaian IPM pada tahun 2019 sebesar 68,21 poin, angka ini telah melebihi angka target capaian akhir RPJMD yaitu sebesar 67,42 poin. Capaian nilai Indeks Pendidikan tahun 2019 sebesar 59,07 poin meningkat sekitar 0,36 poin dari tahun 2018 yaitu sebesar 58,71 poin (LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019).

Tabel 3
Laju Pertumbuhan IPM Tahun 2018-2019

URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
IPM	67,44	68,21
INDEKS PENDIDIKAN	58,71	59,07
INDEKS KESEHATAN	78,22	78,65
INDEKS DAYA BELI	66,81	68,32

(Sumber : LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019).

2.4. ASPEK DAYA SAING

A. Potensi Sumber Daya Air

Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah yaitu :

1. Mata air Kalisodong yang bertempat di Desa Selasari Kecamatan Parigi dengan debit air rata-rata 105.0 C/detik.
2. Mata air Guha hawu yang bertempat di Desa Selasari Kecamatan Parigi dengan debit air rata-rata 7,5 C/detik.
3. Mata air Madasari yang bertempat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak dengan debit air rata-rat 7,5 C/detik.
4. Mata air Cijumleng Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih dengan debit air rata-rata 32,5 C/detik.

Pemanfaatan potensi air baku tersebut pada saat ini masih terbatas hanya untuk air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti air irigasi dan pariwisata.

B. Potensi Pertanian

Kabupaten Pangandaran masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian masyarakat, terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, yaitu masih sebagai penyumbang tertinggi. Pada tahun 2019 kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 27,07% lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor ini telah berperan besar dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran, baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lainnya (*LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019*).

B.1. Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Komoditi Padi Sawah dan Padi Gogo

Beras merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, dan menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian ke depan. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan beras di Kabupaten Pangandaran diprediksi akan terus meningkat. Produksi padi pada tahun 2019 mencapai 199.351.273 ton atau mengalami peningkatan sekitar 2.049,343 ton atau setara dengan 1,03% apabila dibandingkan dengan produksi padi tahun 2018 yaitu sebesar 197.301.930 ton. Terjadinya peningkatan produksi padi merupakan dampak dari peningkatan produktivitas persatuan luas panen dan peningkatan luas panen. Walaupun jika dilihat dari luas tanam pada tahun 2019 terjadi penurunan sebagai akibat adanya pergeseran musim penghujan (sehingga satu musim tanam para petani tidak bisa melakukan penanaman) namun adanya penerapan teknologi budidaya yang diaplikasikan oleh para petani dan kelompok tani padi di wilayah sentra padi mampu meningkatkan jumlah produksi.

2. Komoditi Palawija

Ditinjau dari sumber daya lahan dan ketersediaan teknologi, Kabupaten Pangandaran sebenarnya cukup berpeluang untuk meningkatkan produksi palawija karena potensi lahan Kabupaten Pangandaran cukup luas untuk pengembangan komoditi tersebut terutama pada lahan kering.

Tabel 4
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produk Komoditas Palawija Tahun 2018-2019

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Jagung	1,031	541	1,031	597	62.63	59.66	6,457.61	3,561.61
2	Ubi Kayu	66	58	66	74	133.05	131.88	878.11	975.90
3	Ubi Jalar	46	34	46	36	123.41	122.97	567.70	442.69
4	Kacang Tanah	99	227	99	206	22.13	20.22	219.10	416.50
5	Kedelai	2,565	224	2,565	117	15.21	14.80	3,901.70	173.13
6	Kacang Hijau	389	173	389	73	13.04	11.27	507.19	82.28
Jumlah		4,196	1,257	4,196	1,103	369.47	360.80	12,531.41	5,652.11

(Sumber : LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019).

3. Komoditas Biofarmaka

Prospek pengembangan komoditas biofarmaka di Kabupaten Pangandaran khususnya untuk komoditas Jahe, Laos, Kencur, Kunyit, dan Kapulaga cukup potensial untuk dikembangkan mengingat ketersediaan sumberdaya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang tersedia, serta sumber daya manusia yang cukup trampil dalam budidaya komoditas tersebut. Disamping itu, pasar komoditas tersebut masih terbuka lebar. Realisasi produksi komoditas biofarmaka yang ada di Kabupaten Pangandaran tahun 2019 mencapai 3.958,96 ton, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 197,59 ton, terjadi peningkatan sebesar 3.761,38 ton

Tabel 5
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktifitas dan Produk Komoditas Biofarmaka Tahun 2018-2019

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Jahe	25.07	41.31	24.07	26.29	37.70	120.92	90.76	317.88
2	Laos/Lengkuas	0.85	10.48	0.84	4.66	124.93	179.04	10.48	83.36
3	Kencur	1.48	16.63	1.43	5.33	90.43	116.22	12.94	61.89
4	Kunyit	2.29	13.87	2.27	5.17	84.40	162.05	19.14	83.70
5	Lempuyang	0.02	0.08	0.02	0.02	96.37	125.00	0.15	0.25
6	Temulawak	0.04	0.31	0.04	0.10	80.00	163.16	0.32	1.55
7	Temuireng	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Temukunci	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dlingo/Dringo	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kapulaga	89.34	1,859.63	0.58	316.82	1,034.40	107.55	60.25	3,407.34

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
11	Mengkudu/Pace	0.19	0.20	0.06	0.02	50.00	-	0.30	3.00
12	Mahkota Dewa	0.05	0.32	0.01	-	1,400.00	-	1.40	-
13	Keji Beling	0.10	-	0.10	-	34.00	-	0.34	-
14	Sambiloto	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lidah Buaya	0.30	-	0.30	-	50.00	-	1.50	-
Jumlah		119.73	1,942.83	29.72	358.41	3,082.23	973.93	197.59	3,958.96

(Sumber : LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019).

4. Komoditas Sayuran

Komoditas sayuran yang mayoritas dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Pangandaran adalah sayuran dataran rendah yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Beberapa sayuran yang teridentifikasi sebagai komoditas banyak diusahakan oleh para petani adalah cabe merah, cabe rawit, tomat, kacang panjang, kangkung, buncis dan mentimun. Sedangkan komoditas sayuran lainnya belum menjadi prioritas, namun sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Beberapa daerah sentra produksi utama tanaman sayuran adalah Kecamatan Langkaplancar, Parigi, Kalipucang, Padaherang, Mangunjaya dan Cimerak. Realisasi produksi sayuran tahun 2019 sebesar 2.736,50 ton, dari luas panen seluas 4.276,00 ha, dan jika dibandingkan dengan total produksi sayuran tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 1.388,10 ton dari total produksi 1.348,40 ton pada tahun 2018 (LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019)

5. Komoditas Buah-Buahan

Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi keragaman agroklimat yang sesuai untuk pengembangan berbagai jenis komoditas hortikultura, terutama komoditas buah-buahan, salah satu diantaranya adalah komoditas alpukat, durian, duku, pisang, sawo, mangga, manggis, jengkol dan petai. Komoditas tersebut menjadi komoditas yang diunggulkan di Kabupaten Pangandaran karena dari sisi agroklimat Kabupaten Pangandaran sangat cocok untuk pengembangan komoditas tersebut, bahkan komoditas ini bisa dijadikan oleh-oleh para wisatawan. Walaupun produksi maupun luas panennya komoditas tersebut sifatnya tidak stabil (LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019).

B.2. Peternakan

Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pengembangan peternakan, yaitu di antaranya : 1) Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda, Domba, kambing dan Kelinci), 2)

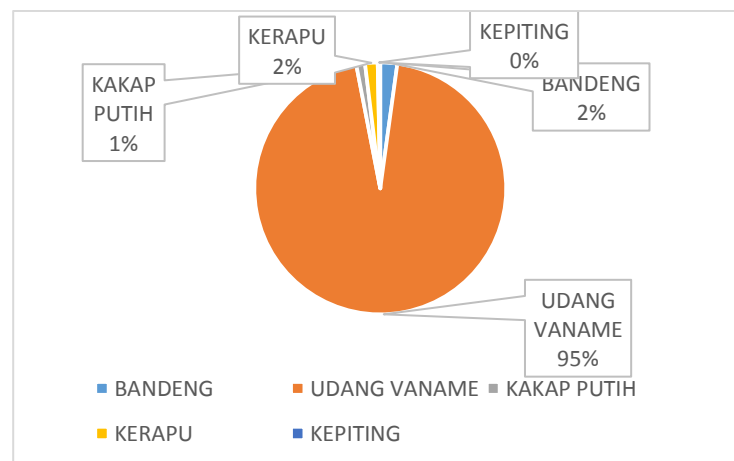
Ternak Unggas berupa Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik dan Puyuh. Salah satu ternak unggulan di Kabupaten Pangandaran yang paling berpotensi untuk dikembangkan antara lain adalah domba, kambing, sapi potong, ayam buras, ayam pedaging dan ayam petelur (*LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019*).

B.3. Komoditas Perkebunan

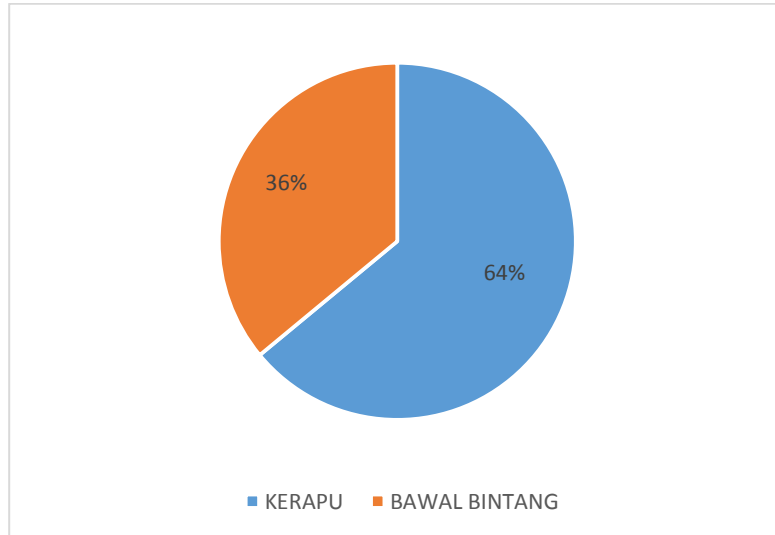
Pengelolaan perkebunan di Kabupaten Pangandaran terdiri dari Perkebunan Besar Negara/Swasta tercatat seluas 4.324,35 ha, yang pengelolaannya oleh PT PN Batulawang dan Perkebunan Rakyat 39.029,52 ha. Perkebunan rakyat terdiri dari komoditas tanaman tahunan dan tanaman semusim, yang diusahakan pada lahan masyarakat yang ditanami atau dikembangkan menjadi kawasan perkebunan. Komoditi yang dikembangkan didominasi oleh komoditi Kelapa Dalam, Kelapa Deres, Cengkeh, Kakao, Pala, Kopi Robusta dan Karet. Komoditas tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Pangandaran sangat potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan terutama komoditas-komoditas yang diunggulkan di daerah (*LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019*).

C. Potensi Perikanan dan Kelautan

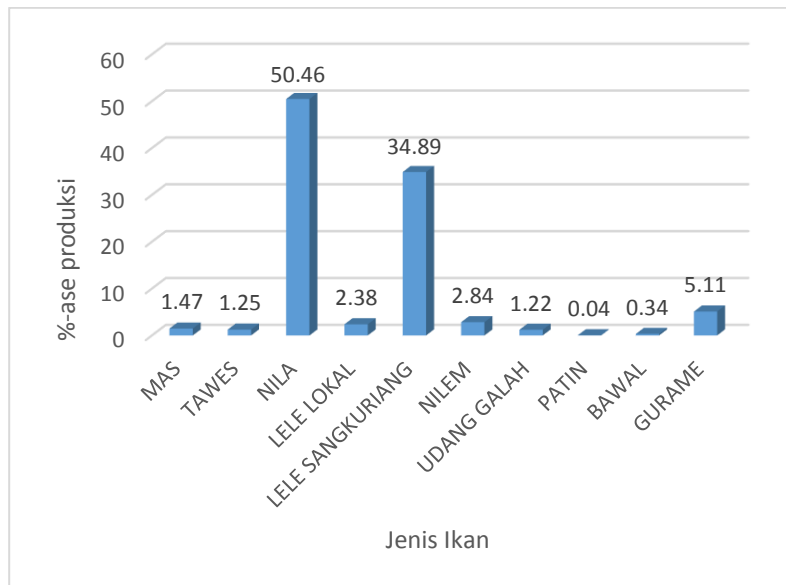
Walaupun Kabupaten Pangandaran mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 91 km, lahan laut yang cukup luas dan kekayaan ikan laut yang berlimpah tetapi masyarakat Kabupaten Pangandaran tidak tergantung kepada laut saja. Masyarakat Pangandaran menggali potensi air payau dengan membangun tambak-tambak ikan air tawar dan perairan umum. Potensi perikanan air tawar juga tetap dilakukan dengan mengusahakan budidaya ikan air tawar yang bahkan memiliki luas sangat besar jika dibandingkan dengan usaha perikanan tambak



Gambar 5. Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Payau Tahun 2019
(Sumber : *LKPJ Kab Pangandaran Tahun 2019, diolah*)



Gambar 6. Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Laut Tahun 2019
(Sumber : LKPJ Kab Pangandaran Tahun 2019, diolah)



Gambar 7. Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Tawar Tahun 2019
(Sumber : LKPJ Kab Pangandaran Tahun 2019, diolah)

D. Potensi Kehutanan

Kewenangan pengelolaan kawasan/bidang kehutanan terutama dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan merupakan tanggungjawab atau kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat, namun Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi lahan kawasan hutan yang cukup luas, dari luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Pangandaran seluas 47.562,60 Ha yang terdiri dari :

- Luas kawasan Hutan Negara meliputi areal seluas 17.047,56 Ha terdiri dari Hutan Produksi seluas 16.558,62 Ha yang dikelola Perum Perhutani KPH Ciamis, hutan Konservasi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa Pananjung Pangandaran yang dikelola Balai Besar BKSDA Jawa Barat seluas 488,94 Ha yang terdiri dari Cagar alam Pananjung (darat) sesuai SK. Nomor 44/Menhut-II/2010 yaitu seluas 454,62 Ha dan Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran seluas 34,32 Ha.
- Hutan Rakyat seluas 30.202,04 Ha yang tersebar di 10 kecamatan dengan potensi produksi kayu sebesar 304.292 m³ dengan rata-rata produksi per kecamatan lebih kurang 30.429,29 m³/kecamatan. Dengan demikian populasi tegakan pada lahan milik yang biasa disebut Hutan Rakyat menjadi sumber utama penghasil kayu khususnya sengon dan mahoni (rimba) untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku yang dewasa ini semakin besar.
- Hutan Mangrove dengan luas kurang lebih 310 Ha di Kabupaten Pangandaran tersebar di 6 (enam) kecamatan pesisir pantai merupakan kawasan andalan Pangandaran yakni kawasan hutan mangrove dengan kegiatan pengembangan pariwisata dan bisnis kelautan (*LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019*).

E. Pariwisata

Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat dibagi kedalam tiga kategori:

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya yang memperlihatkan kekhasan lokal dari kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang diantaranya adalah Batu Kalde yang bertempat di Cagar Alam Pangandaran, Gua Panggung berada di obyek wisata Cagar Alam Pangandaran dan Sembah Agung di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang;
2. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam yang merupakan obyek wisata berbasis pantai dan cagar alam yang diantaranya adalah Karang Nini, Lembah Putri, Karapyak, Palatar Agung, Pangandaran, Karang Tirta, Batu Hiu, Batu Karas, Madasari dan Keusik Luhur; dan
3. Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus yang merupakan objek wisata yang dibuat secara khusus untuk menunjang minat-minat tertentu yang diantaranya adalah objek wisata sungai Citumang, Karang Nini, Gua Donan, Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon dan Curug Jambe serta Cagar Alam Pananjung (*LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019*).

F. Potensi Industri

Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan Jawa Barat, yang diarahkan untuk pengembangan agroindustri, yaitu mengolah potensi sumberdaya alam yang dimiliki khususnya sektor pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan. Peningkatan jumlah usaha industri tersebut masih didominasi oleh industri skala rumah tangga berupa olahan bahan makanan, kerajinan dan aneka bahan bangunan serta konveksi. Dukungan Pemerintah terhadap pengrajin berupa bantuan mesin dan penguasaan teknologi serta pembinaan keterampilan pengrajin berupa diklat-diklat teknologi produksi, sehingga memberi dampak pada peningkatan kapasitas industri serta peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terampil. Namun sejauh ini industri yang ada baru sebatas industri menengah dan kecil. Sedangkan industri besar sampai saat ini masih belum ada. Adapun jumlah industri menengah sampai tahun 2019 sudah mencapai 4.181 unit meningkat sebanyak 106 unit dari 4.075 unit pada tahun 2018. Dan industri kecil pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 107 unit dari 952 unit pada tahun 2018 menjadi 845 unit pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut masih bergerak pada bidang makanan olahan sebanyak 980 unit dan kerajinan sebanyak 750 unit. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai produksi antara lain melakukan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan pada kelompok-kelompok industri baik industri agro maupun non agro misalnya: dalam pengemasan produk, pembinaan GMP (Good Manufacturing Practise), memberikan bantuan peralatan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah ((LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019).

G. Potensi Perdagangan

Tabel berikut menggambarkan komoditas unggulan Kabupaten Pangandaran yang berhasil diekspor.

Tabel 6
Data Komoditas Ekspor Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2019

NO	KOMODITAS	VOLUME (TON) 2018	NEGARA TUJUAN	VOLUME (TON) 2019	NEGARA TUJUAN
1	Santan tepung/ Coconut Powder	77.95	China, Australia	55.00	China, Australia dan US
2	Kelapa Parut/ Desiccated Coconut	50.94	Brazil, Taiwan, Costarica, Russi	434.00	Bazil, Rusia
3	Santan Cair/ Coconut Cream	826.94	Europa,/Uk, Canada,Usa,New Zeland,China	1,418.00	US, Canada,Usa,New Zeland,China, Japan, Hongkong

NO	KOMODITAS	VOLUME (TON) 2018	NEGARA TUJUAN	VOLUME (TON) 2019	NEGARA TUJUAN
4	Air Kelapa/ Coconut Water	452.45	Korea, France, USA, UK, Europa	469.00	US, German, Korea, Japan
5	Cocopeat	269	Jepang	605	Japan
6	Gula Semut	182,500	Amerika, Eropa	600	
7	Manggis	50	Hongkong	75	Hongkong
8	Jus Honje	198	Yordania, Malaysia, Kenya	-	
Jumlah		184,425.27		3,655.80	

(Sumber : LKPJ Kab.Pangandaran Tahun 2019).

H. Potensi Sarana Prasarana

1. Kondisi Jalan

Kondisi jalan di Kabupaten Pangandaran pada umumnya dalam kondisi baik, yang meliputi : Jalan Nasional sepanjang 94,25 km (76,42 km dalam kondisi baik), Jalan Provinsi sepanjang 8,89 km (2,05 km dalam kondisi baik) dan Jalan Kabupaten sepanjang 504,31 km (401,20 km dalam kondisi baik). Namun demikian bila dibandingkan dengan panjang jalan pada tahun 2018, pada tahun 2019 tidak terdapat penambahan panjang jalan baru. Untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Pangandaran, maka akses jalan harus diperluas, sekaligus untuk mengurai kemacetan yang disebabkan oleh mobilitas wisatawan.

2. Jasa Penunjang Angkutan

Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2019, total keseluruhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Pangandaran sebanyak 5.861 unit kendaraan, sedangkan jumlah taman kendaraan yang aktif dan di uji pada tahun 2019 sebanyak 2.587 unit kendaraan.

3. Pelabuhan

Di Kabupaten Pangandaran terdapat juga sungai besar, sehingga diperlukan angkutan untuk penyebrangan sungai. Jenis transportasi sungai yang terdapat di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Dermaga angkutan penyebrangan penumpang dan barang di Kalipucang (Dermaga Santolo);
2. Dermaga angkutan penyebrangan penumpang dan barang di Kalipucang (Dermaga Majingklak);

Kedua dermaga tersebut di atas melayani pergerakan yang menghubungkan Kalipucang dengan Kota Cilacap (Jawa Tengah) Dermaga Santolo melayani rute angkutan pariwisata, selain melayani pelayanan komersial. Pendangkalan sungai Citanduy yang terjadi berimplikasi tidak dapat berfungsinya Dermaga Santolo secara optimal.

3. Dermaga Bojongsalawe, yang sampai dengan tahun 2019 kondisi fisik pembangunan sudah selesai, namun kewenangannya berada pada pemerintah pusat.

Disamping pelabuhan yang tersedia didukung pula oleh sarana angkutan air yang tersedia yaitu:

1. Sarana angkutan penyebrangan Majingklak sebanyak 40 unit dan Kalipucang sebanyak 15 unit;
2. Sarana angkutan perahu pesiar di Pangandaran sebanyak 150 Unit, Green Canyon 80 Unit dan Batukaras 9 unit
3. Sarana angkutan perahu nelayan wilayah Pangandaran sebanyak 198 unit, Parigi 135 unit dan Batukaras sebanyak 267 unit.

4. Bandar Udara

Selain sarana transportasi darat dan sungai terdapat juga jaringan transportasi udara berupa bandar udara. Bandar Udara yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu Bandar Udara Nusawiru yang berada di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang

5. Prasarana Listrik

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Area Tasikmalaya, bahwa Prasarana Listrik telah menjangkau seluruh desa di Kabupaten Pangandaran dengan jumlah pelanggan selama Tahun 2019 sebanyak 115.742 pelanggan terjadi peningkatan sebanyak 3.534 pelanggan dibandingkan dengan pada tahun 2018, jumlah pelanggan sebanyak 112.208 pelanggan

2.5. KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH SAAT INI

Sistem Inovasi Daerah merupakan salah satu pendekatan pembangunan dengan cara yang holistik dan sistemis. Sebagai sebuah pendekatan maka Sistem Inovasi Daerah memerlukan objek pembangunan yang akan diusung. Oleh karena itu diperlukan adanya bidang prioritas pembangunan daerah yang fokus. Bidang prioritas pembangunan tidak

identik dengan sektor pembangunan, walaupun dalam pengembangannya bidang prioritas memerlukan sektor unggulan sebagai penarik (lokomotif) perekonomian daerah.

Dalam menentukan bidang prioritas yang menjadi bahan pertimbangan adalah:

1. Bidang prioritas tersebut sangat didukung oleh potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
2. Sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah.
3. Disepakati oleh seluruh *stakeholders* Daerah.
4. Menjadi *icon* Daerah (*branding daerah*).

Dan untuk menentukan Bidang Prioritas diperlukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan analisis objektif potensi ekonomi daerah.
2. Melakukan analisis subjektif potensi ekonomi daerah.
3. Melakukan diskusi partisipatif penentuan bidang prioritas daerah.
4. Menetapkan bidang prioritas daerah.
 - Kegiatan Analisis Objektif Potensi Ekonomi Daerah.
Potensi ekonomi daerah dianalisis menggunakan alat analisis objektif, misalnya dengan input-output atau berdasarkan data PDRB. Alternatif bidang prioritas dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis tersebut dengan menggunakan data yang valid dan aktual.
 - Kegiatan Analisis Subjektif Potensi Ekonomi Daerah.
Potensi ekonomi daerah dapat juga menggunakan hasil analisis subjektif, antara lain menggunakan metode *delphi* atau hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat atau pakar ekonomi.
 - Kegiatan Diskusi Partisipatif Penentuan Bidang Prioritas Daerah
Setelah diperoleh data dan informasi potensi ekonomi daerah, baik secara objektif maupun subjektif, kemudian didiskusikan secara partisipatif. Kunci keberhasilan diskusi partisipatif adalah penentuan peserta diskusi. Peserta diskusi yang diperlukan adalah representasi dari seluruh *stakeholders* daerah, antara lain mewakili kalangan pemerintah, swasta (industri), tokoh masyarakat, kalangan akademisi, dan LSM. Hasil dari diskusi partisipatif ini adalah bidang prioritas yang disepakati oleh para peserta diskusi. Kegiatan
5. Penetapan Bidang Prioritas Daerah.
Penetapan bidang prioritas daerah yang telah disepakati dalam diskusi partisipatif perlu dilakukan dan diberi payung hukum agar dapat dijadikan acuan oleh seluruh *stakeholders* pembangunan daerah. Payung hukum yang dapat digunakan bisa berupa peraturan kepala daerah (Taufik, 2005).

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perangkat daerah, Universitas Padjadjaran dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Kabupaten Pangandaran, disepakati bahwa tema Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 yaitu **“Pariwisata Yang Didukung Potensi Unggulan Lokal (Pertanian, Perikanan dan Perkebunan)/Agroekowisata dan Wisata Bahari”** dengan mempertimbangkan berbagai aspek (multi dimensi), meliputi : aspek geografi, demografi, sosial budaya kemasyarakatan, potensi unggulan, tata ruang wilayah, aspek pasar, aspek kelembagaan, dan aspek pariwisata.

Dwiridotjahjono dkk, (2017) menjelaskan bahwa Agroekowisata dapat menjadi nilai tambah lahan pertanian melalui jasa wisata dan pemasaran produk pertanian yang lebih baik. **Agroekowisata didefinisikan sebagai suatu bentuk pariwisata yang memanfaatkan budaya petani sebagai daya Tarik wisata.** Agrowisata hampir sama dengan *ecotourism*, tetapi penekanan pemanfaatannya bukan terhadap *natural landscape*. Lebih lanjut Avenzora dan Teguh (2013), seperti dikutip Dwiridotjahjono dkk, menjelaskan ekowisata tidak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga dapat **meningkatkan pengetahuan pertanian pengunjungnya dan mengurangi arus urbanisasi dengan memandirikan dan memajukan perekonomian setempat terutama petani.**

Menurut Spillane (1994), untuk dapat mengembangkan suatu kawasan mejadi kawasan pariwisata (termasuk juga agrowisata) terdapat lima unsur yang harus dipenuhi, yaitu **atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan keramahtamahan pelayanan.** Pengembangan agrowisata selalu menuntut pengembangan seluruh sub sistem pertanian secara terintegrasi. Seluruh subsistem agrowisata terikat dalam kesatuan kawasan sehingga untuk mengembangkan agrowisata pengembangan kawasan mutlak diperlukan. Pengembangan kawasan agrowisata dapat dilaksanakan berdasarkan interaksi sub sistem yang ada, produk unggulan sebagai ciri khas penguat agrowisata dan lingkungan di sekelilingnya. Konsep ekowisata mengarah pada makna:

1. Aktivitas ekonomi (industri, UMKM, perdagangan) dalam bidang agrobisnis sebagai basis pengembangan pariwisata
2. Ekologi dalam bidang agrobisnis pertanian sebagai basis pengembangan pariwisata yang mengacu pada: (1) Kelestarian lingkungan sumber daya alam; dan (2) Kelestarian lingkungan sumber daya manusia, religiusitas, sosial, budaya, dan kearifan lokal lainnya

Di sisi lain, tuntutan pembangunan yang mengedepankan konsep peningkatan daya saing daerah merupakan agenda penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam

kaitan ini, dibutuhkan suatu sistem inovasi pembangunan yang berjalan secara komprehensif, serta terjadinya kolaborasi antaraktor pembangunan yang merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan SIDA merupakan salah satu strategi pendekatan utama dalam penguatan inovasi nasional yang mewadai proses interaksi antara komponen penguatan system inovasi.

Pengembangan SIDA di Kabupaten Pangandaran diorientasikan berbasis zonasi ekonomi, dengan memperhatikan daya serap teknologi di masyarakat, faktor sosial budaya dan kearifan lokal, serta potensi pariwisata dalam kerangka kawasan yang mampu mengakomodir berbagai sektor (multi dimensi), yang diharapkan menghasilkan kerangka kawasan aglomerasi ekonomi dengan menyinergikan unsur satuan kerja dan unsur masyarakat dalam implementasi konsep SIDA. Kolaborasi antara kutub-kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) di daerah dengan klaster industri, diarahkan untuk mengoptimasi berbagai aspek pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Kohesi dua pendekatan tersebut akan menghasilkan kerangka kawasan yang memenuhi syarat dan kompatibel dengan struktur SIDA yang multi sektor. Kerangka kawasan tersebut selanjutnya ditopang dengan produk/komoditi unggulan, serta lingkungan teknologi yang kondusif bagi program-program dalam kerangka tematik yang dikehendaki SIDA.

Penentuan tema ini juga didasarkan pada dokumen-dokumen kebijakan perencanaan pusat dan daerah yang mendorong Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Pariwisata yaitu :

A. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL (RIPPARNAS)

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Kabupaten Pangandaran masuk dalam Destinasi Perwilayahan Nasional (DPN) Pangandaran-Nusakambangan dan sekitarnya. Kabupaten Pangandaran juga ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yaitu KSPN Pangandaran dengan penekanan pada tema pembangunan wisata berdasarkan kepada kebijakan RIPPARNAS yang mengedepankan pada aktivitas **wisata bahari dan minat khusus**.

B. RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA BALI TAHUN 2008-2028

Dalam RTR Pulau Jawa-Bali, perencanaan yang berhubungan dengan pariwisata Kabupaten Pangandaran diantaranya :

- 1) Pengembangan Pusat Pariwisata, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, Bahari dan MICE dengan ditetapkannya **Pusat Pariwisata Bahari Pangandaran**;

- 2) Pembangunan jalan lintas Selatan Pulau Jawa : Kalapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi yang dapat mendukung DPN dan KSPN Pangandaran;
- 3) Pemantapan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan : Cijulang-Pangandaran-Banjar; dan
- 4) Penetapan **Kawasan Karst** bagi Perlindungan Geologi : PKW Pangandaran (Basis Wisata Minat Khusus)

C. RTRW PROVINSI JAWA BARAT Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010)

Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran masuk ke dalam Wilayah Pembangunan Priangan Timur dan Pangandaran dengan fokus pembangunan pada sektor :

- 1) Kegiatan industri pengolahan dan pertanian;
- 2) Perkebunan;
- 3) Kehutanan;
- 4) Pariwisata;
- 5) Peternakan;
- 6) Perikanan, dan;
- 7) Pertambangan Non-Logam.

Kebijakan yang terkait dengan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 diantaranya :

- 1) **Kawasan Wisata Jalur Selatan** : Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran
- 2) PKW Pangandaran dan PKNp Pangandaran sebagai **Daerah Tujuan Wisata Nasional dan Internasional**.
- 3) Optimalisasi fungsi Bandara Nusawiru di Pangandaran sebagai Pusat Persebaran Tersier.
- 4) Reaktivasi jalur KA Antar Kota Banjar-Cijulang;
- 5) Peningkatan jalan poros timur di jalur Pangandaran- Ciamis-Cikijing-Cirebon;
- 6) Pembangunan Jalan Lintas Selatan dan Peningkatan Status menjadi Jalan Nasional.

D. PERUBAHAN RPJPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005-2025 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010)

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa prioritas Pembangunan Tahun 2018-2023 :

- Bidang IPTEK diarahkan pada pemantapan kerjasama dengan lembaga penelitian internasional serta pengembangan ekonomi sebagai hasil penerapan Teknologi Tepat Guna;
- **Bidang Pariwisata diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisata;** dan
- Bidang Kelautan diarahkan pada pengembangan perikanan komersial di Pantai selatan dan Pantai Utara, **pengembangan perikanan rekreasi**, pengembangan usaha pembuatan kapal penangkap ikan, **pengembangan usaha penunjang rekreasi**, pengembangan usaha pengolahan hasil, pengembangan usaha berbahan baku dari produk yang tidak dimanfaatkan langsung, pengembangan usaha permodalan, pengembangan usaha informasi kelautan, pengembangan budaya kelautan (*marine culture*), pengembangan kota-kota pantai (*coastal cities*), **pengembangan wisata kelautan** dan pengembangan usaha ekokonservasi.

E. RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2018 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013)

Arahan utama dalam kebijakan **Growth Center Pangandaran sebagai Pusat Pertumbuhan berbasis Pariwisata** diantaranya :

- 1) Pembangunan Infrastruktur
 - a. Penyediaan Jaringan Transportasi Regional dan lokal.
 - b. Sistem Angkutan Umum penghubung pusat kegiatan wisatawan.
 - c. Perumahan Layak Huni.
 - d. Fasilitas Kesehatan; Pendidikan; Peribadatan; Perdagangan dan Jasa; Wisata dan Rekreasi dan Fasilitas Sosial.
 - e. Peningkatan kualitas layanan air bersih, penanganan sampah dan drainase.
- 2) **Pembangunan Pariwisata**
 - a. Penataan Kawasan Pariwisata.
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

- c. Peningkatan aksesibilitas Kawasan Pariwisata (Jalan Raya, Bandara Nusawiru, Jalur Kereta Banjar-Pangandaran-Cijulang).

3) Pembangunan SDM, Industri Kecil dan Pertanian

- a. Pusat Perdagangan bagi kerajinan tangan Pangandaran (cinderamata/souvenir);
- b. Membangun sekolah dan perguruan tinggi, dengan salah satu fokus jurusan pariwisata;
- c. Pengembangan komoditas perikanan dan pertanian sebagai unggulan

F. RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019)

Kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali, yang dilaksanakan melalui : a) Program **Pengembangan Destinasi Pariwisata**, dengan sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata. b) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan ke objek wisata di Jawa Barat.

G. RTRW KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018-2038 (Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018)

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pangandaran, sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan dengan Strategi Pengembangan **Kawasan Wisata Ramah Lingkungan dengan penetapan Kawasan Peruntukan Pariwisata berbasis pada Destinasi Wisata Alam, Minat Khusus dan Buatan** sebagai berikut :

1) Destinasi Wisata Alam.

- a. Kec. Pangandaran : Destinasi Wisata Pangandaran dan Cagar Alam Pananjung.
- b. Kec. Kalipucang : Pantai Karapyak, Pantai Palatar Agung dan Pantai Majingklak.
- c. Kec. Parigi : Pantai Batu Hiu.
- d. Kec. Cijulang : Pantai Batukaras, dan
- e. Kec. Cimerak : Pantai Madasari, Pantai Keusik Luhur dan Legok Jawa.

2) Destinasi Wisata Minat Khusus

- a. Kec. Parigi : Wisata Sungai Citumang
- b. Kec. Kalipucang : Pantai Karang Nini.
- c. Kec. Cijulang : Sungai Cukang Taneuh, dan

d. Kec. Pangandaran : Curug Jambe Enum.

3) Destinasi Wisata Buatan

Wahana Wisata Tirta, Flora, Fauna, Wahana Permainan Modern dan Tempat Hiburan dan/atau Plaza.

H. RPJPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016-2025 (Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016)

Visi Daerah” Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 adalah “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Visi jangka panjang di atas menggambarkan kondisi Kabupaten Pangandaran pada 10 (sepuluh) tahun yang akan datang, yaitu Tahun 2025 baik infrastruktur, suprastruktur, fasilitas dan pelayanannya, maupun sumber daya manusianya harus sudah mampu mendukung Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata utama di Pulau Jawa. Termaju dalam arti kondisi Kabupaten Pangandaran pada saat itu sudah mensejajarkan diri atau bahkan melebihi daerah tujuan wisata paling maju lainnya di Pulau Jawa.

Kondisi relatif pencapaian Visi 2025 selayaknya dapat diukur dari beberapa kriteria “Tujuan Wisata Termaju” sebagai berikut :

1. Kabupaten Pangandaran memiliki ketersediaan infrastruktur, suprastruktur, fasilitas dan pelayanan yang berkelas dunia;
2. Kabupaten Pangandaran dengan potensi wisata dan keanekaragaman kekhasannya masing-masing dapat ditata agar terintegrasi secara harmonis sehingga menjadi kawasan pusat pariwisata terpadu;
3. Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Pulau Jawa; dan
4. Kabupaten Pangandaran dapat menyejahterakan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kearifan lokalnya.

I. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016-2025

Pariwisata merupakan **industri yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor lainnya, seperti pendidikan, kebudayaan, teknologi, perdagangan dan perindustrian, perbankan, dan keamanan**. Keterkaitan tersebut dapat berbentuk penyediaan produk-produk dan jasa layanan yang dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata (*tourist products*) atau bisa disebut keterkaitan langsung, maupun dalam

bentuk keterkaitan tak langsung seperti, pembinaan pengrajin yang dilakukan oleh instansi di luar pariwisata, atau perluasan dan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan bentuk lainnya.



Gambar 8. Keterkaitan Industri Pariwisata dengan Industri/Sektor lainnya
(Sumber : RIPPARDa Kabupaten Pangandaran 2016-2025)

Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran perlu dikembangkan dengan berorientasi pada :

1. Pengembangan kebijakan dan implementasi kebijakan Kabupaten Pangandaran terhadap pengembangan pariwisata. Pengembangan kepariwisataan memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sektor-sektor lain (multisektor), dalam hal ini pariwisata di Kabupaten Pangandaran harus memiliki peran sebagai *attractors* and *business related*. Sebagai *business related* Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi pariwisata berupaya mengembangkan perannya yang mampu menciptakan sinergitas antar sektor dalam pelaksanaan pembangunannya. Sebagai *attractor* Kabupaten Pangandaran memiliki fungsi untuk mengemas sumber daya menjadi aktivitas maupun produk yang mampu menarik wisatawan. Dalam hal ini pengembangan kebijakan pengembangan pariwisata harus selaras dengan kebijakan dan pembangunan wilayah.
2. Penggalian dan penerapan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat menjadi unsur dan atribut produk wisata.

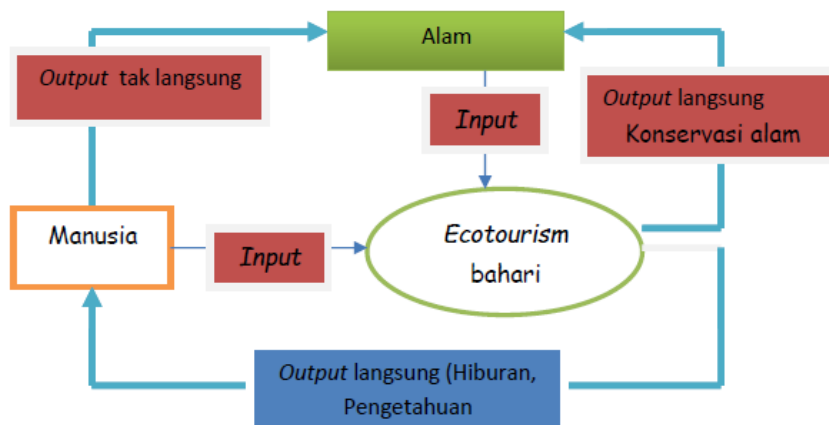
3. Sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, dengan kekhasan dan keragaman ciri khas masing-masing, Kabupaten Pangandaran diharapkan mampu mengakomodir ciri religius dalam mengembangkan sektor pariwisata.
4. Komunikasi dan kerjasama antar *stakeholders* dalam menumbuhkembangkan identitas, standar, dan kualitas dalam mengelola kegiatan pariwisata.
5. Dengan makin tingginya tingkat persaingan dalam pengembangan pariwisata, perlu adanya kesiapan dan komitmen bersama antar *stakeholders* dalam upaya menciptakan situasi wilayah yang sangat kondusif bagi kegiatan pariwisata. Kondisi ini dapat dimungkinkan dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang intensif dan komprehensif dalam penetapan kebijakan maupun arah pengembangan Kabupaten Pangandaran.
6. Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pangandaran diwujudkan dalam kerangka pelestarian fungsi-fungsi sosiologis dan ekologis secara konsisten dan bertanggung jawab.
7. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan diarahkan kepada pelestarian sumber daya serta identitas masyarakat. Ini dapat dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan pasar, serta kesiapan masyarakat dalam mendukung pengembangan kegiatan pariwisata.
8. Pembangunan pariwisata yang memberikan ruang dan peran serta yang nyata pada masyarakat.
9. Penetapan atribut produk pariwisata dilakukan dengan mengkonversi aktivitas pariwisata yang dapat melibatkan masyarakat, dengan mengkombinasikannya aktivitas masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung aktivitas pariwisata. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata sehingga timbulnya kesadaran akan pentingnya kegiatan pariwisata. Dengan kondisi tersebut diharapkan akan mampu memberikan kondisi yang kondusif dalam kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran (*RIPPDa Kabupaten Pangandaran, 2016-2025*)

Pendekatan Wisata Bahari dalam RIPPARDa disusun berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Pangandaran. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Wisata bahari dengan kesan penuh makna bukan semata-mata memperoleh hiburan dari berbagai suguhan atraksi dan suguhan alami lingkungan pesisir dan lautan tetapi juga diharapkan wisatawan dapat berpartisipasi langsung untuk mengembangkan konservasi lingkungan sekaligus

pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk ekosistem pesisir sehingga membentuk kesadaran bagaimana harus bersikap untuk melestarikan wilayah pesisir dan dimasa kini dan masa yang akan datang (RIPPDa Kabupaten Pangandaran, 2016-2025).

Jenis wisata yang memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya berperahu, berenang, *snorkeling*, *diving*, pancing. Kegiatan tidak langsung seperti kegiatan olahraga pantai, piknik menikmati atmosfer laut (Siti Nurisyah, 1998). Konsep wisata bahari didasarkan pada *view*, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Wheat (1994) berpendapat bahwa wisata bahari adalah pasar khusus untuk orang yang sadar akan lingkungan dan tertarik untuk mengamati alam. Steele (1993) menggambarkan kegiatan *ecotourism* bahari sebagai proses ekonomi yang memasarkan ekosistem yang menarik dan langka. Low Choy dan Heillbronn (1996), merumuskan lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama ekowisata, yaitu :

1. **Lingkungan;** *ecotourism* bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu.
2. **Masyarakat;** *ecotourism* harus memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
3. **Pendidikan dan Pengalaman;** *ecotourism* harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya dengan adanya pengalaman yang dimiliki.
4. **Berkelanjutan;** *ecotourism* dapat memberikan sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
5. **Manajemen;** *ecotourism* harus dikelola secara baik dan menjamin *sustainability* lingkungan alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sekarang maupun generasi mendatang (RIPPDa Kabupaten Pangandaran, 2016-2025)



Gambar 9. Konsep Ecotourism (Sumber : RIPPDa Kabupaten Pangandaran, 2016-2025)

Dari gambar di atas, terlihat bahwa *output* langsung yang diperoleh berupa hiburan dan pengetahuan sedangkan *output* langsung bagi alam yakni adanya insentif yang dikembalikan untuk mengelola kegiatan konservasi alam. *Output* tidak langsung yaitu berupa tumbuhnya kesadaran dalam diri setiap orang (wisatawan) untuk memperhatikan sikap hidup sehari-hari agar kegiatan yang dilakukan tidak berdampak buruk pada alam. Kesadaran ini tumbuh sebagai akibat dari kesan yang mendalam yang diperoleh wisatawan selama berinteraksi secara langsung dengan lingkungan bahari.

Berdasarkan hasil analisis potensi produk unggulan daerah di Kabupaten Pangandaran, ditemukan banyak komoditi unggulan yang secara signifikan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pangandaran yang diantaranya dapat menjadi tujuan destinasi dalam rangka pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal/Agroekowisata dan Wisata Bahari. Komoditi/produk unggulan tersebut yaitu :

1. Potensi Pertanian
 - a. Pisang dan olahannya
 - b. Manggis dan olahannya
 - c. Kapulaga dan olahannya
2. Potensi Perikanan
 - a. Budidaya Udang Vaname
 - b. Budidaya Ikan Nila
 - c. Budidaya Ikan Kerapu
3. Potensi Perkebunan :
 - a. Kopi Robusta dan olahannya
 - b. Kopi dari buah Mangrove dan olahannya
 - c. Kelapa dan olahannya
4. Potensi Peternakan, yaitu :
 - a. Peternakan Sapi Potong



SALE PISANG



BUAH MANGGIS



KAPULAGA (OBAT HERBAL)



UDANG VANAME



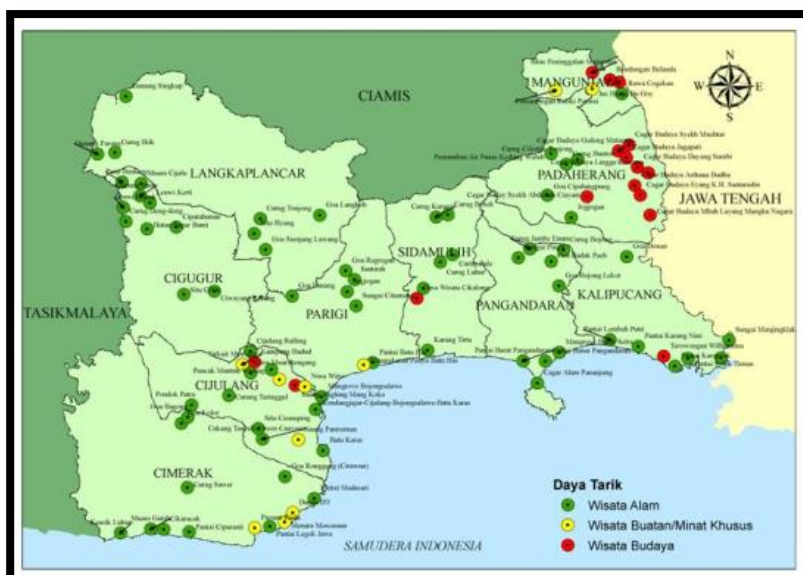
VCO (OLAHAN KELAPA)



KOPI MANGROVE (OLAHAN BUAH MANGROVE)

Gambar 10 Produk Unggulan Daerah Kabupaten Pangandaran

Selain itu, Kabupaten Pangandaran memiliki 93 desa yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Pada gambar dan tabel berikut menggambarkan sebaran wisata dan desa wisata di Kabupaten Pangandaran.



Gambar 11 . Lokasi Tempat Wisata dan Jenis Daerah Tujuan Wisata Pangandaran
(Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pangandaran, 2015, diolah)

Tabel 7
Sebaran Wisata dan Desa Wisata di Kabupaten Pangandaran

KAWASAN PARIWISATA	SUB PEMBANGUNAN KAWASAN	SEBARAN DAYA TARIK WISATA		
		WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA BUATAN
Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pangandaran dan sekitarnya	Kawasan Wisata Pantai Pangandaran dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Barat Pangandaran 2. Pantai Timur Pangandaran 3. Kawasan Taman Wisata Alam Pananjung 4. Kawasan Mangrove Bulak Setra 5. Kawasan Pantai Cikembulan 	Desa Wisata Babakan	
	Kawasan Wisata Curug Bojong dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air Terjun (Curug) Bojong 2. Air Terjun (Curug) Jambe Enum 3. Sungai Pingit 4. Gua Bojong Lekor 5. Gua Badak Paeh 		
	Kawasan Wisata Karang Tirta-Cikalong dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Karang Tirta 2. Air Terjun (Curug) Pule 3. Air Terjun (Curug) Luhur 4. Gua Macan 5. Gua Sodong Panjang 	Desa Wisata Cikalong	

KAWASAN PARIWISATA	SUB PEMBANGUNAN KAWASAN	SEBARAN DAYA TARIK WISATA		
		WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA BUATAN
	Kawasan Wisata Pantai Batu Hiu-Citumang-Santirah dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Batu Hiu 2. Gua Lanang 3. Gua Regregan 4. Sungai Citumang 5. Gua Jogjogan 6. Gua Sienjang Lawang 7. Sungai Ciwayang 8. Air Terjun Curug Tonjong 	Desa Wisata Selasari (Santirah)	Penangkaran Penyu Batu Hiu
	Kawasan Margacinta dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Cijulang 2. Gua Muara Bembang 3. Kawasan Mangrove Margacinta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Seni Badud 2. Padepokan Seni Sunda Jenggala Manik 3. Saung Angklung Mang Koko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sirkuit Motorcross Metro Jaya 2. Agrowisata Margacinta
	Kawasan Cukang Taneuh-Pondok Patra dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Green Canyon (Cukang Taneuh) 2. Green Coral (Curug Taringgul) 3. Pemandian Mata Air Cikalungkung 4. Sungai Muara Cibodas 5. Gua Patra 6. Pemandian Mata Air Sodong Gebos 7. Gua Kolor 8. Gua Bagong 		Agrowisata Pondok Patra
	Kawasan Pantai Batukaras dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Batukaras 2. Hutan Mangrove Batukaras 3. Danau Situ Cisamping 		
Kawasan Pembangunan Pariwisata Kalipucang-Mangunjaya dan Sekitarnya	Kawasan Karang Nini-Majingklak dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Karang Nini 2. Pantai Lembah Putri 3. Pantai Karapyak 4. Pantai Solok Timun 5. Pantai Palatar Agung 6. Kawasan Muara dan Mangrove 7. Pantai Majingklak 	Terowongan Wihelmina	
	Kawasan Sungai Jogjogan-Kedung Wuluh dan Sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Jogjogan 2. Gua Cipalungpung 3. Air Terjun Curug Buntan 4. Curug Leutik Tonjong 5. Mata Air Panas Pemandian Kedung Wuluh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makam Syech Muchtar 2. Situs Gedeng Mataram 3. Situs Jagapati 4. Situs Dayang Sumbi 5. Situs Lingga Kencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Home Industri Jus Honje 2. Agrowisata Kaliki Permai

KAWASAN PARIWISATA	SUB PEMBANGUNAN KAWASAN	SEBARAN DAYA TARIK WISATA		
		WISATA ALAM	WISATA BUDAYA	WISATA BUATAN
			6. Situs Astana Budha 7. Makam Eyang K.H Santarudin 8. Makam Mbah Layung Mangkunagara 9. Makam Syech Abdullah Ciayam 10. Situs Batu Majapahit 11. Tugu Pangeling-Eling	
Kawasan Pembangunan Pariwisata Langkaplancar-Cigugur dan Sekitarnya	Kawasan Gunung Singkup-Parang dan Sekitarnya	1. Gunung Singkup 2. Gunung Parang 3. Air Terjun Curug Bilik	Patilasan Syech Abdul Hamid	
	Kawasan Pasir Bentang-Cipatahunan dan Sekitarnya	1. Panorama Pasir Bentang 2. Sungai Muara Cijalu 3. Hutan Gunung Haur 4. Sungai Leuwi Kerti 5. Air Terjun Curug Leuwi Leutak 6. Air Terjun Curug Dendeng 7. Hutan Pagar Bumi		
Kawasan Pembangunan Pariwisata Cimerak dan Sekitarnya	Kawasan Pantai Madasari dan Sekitarnya	1. Pantai Madasari 2. Pantai Legok Jawa 3. Gua Cirawun		1. Danau D'J 2. Pacuan Kuda Madasari
	Kawasan Pantai Ciparanti-Keusik Luhur dan Sekitarnya	1. Pantai Ciparanti 2. Pantai Cikaracak 3. Pantai Muara Gatah 4. Pantai Keusik Luhur 5. Air Terjun Curug Sawyer		

Sumber : RIPPDA Kabupaten Pangandaran, 2015

Selain itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Aktivitas wisata yang diselenggarakan di Kabupaten Pangandaran cukup beragam, antara lain Nyuguh, Hajat Bumi Selamintuna, Prosesi Seni Peresmian DOB Pangandaran, Upacara Adat, Gelar Budaya Tatar, Pentas Wayang Golek, Kreatifitas Seni, Upacara Adat Merlawu, Pentas Seni Hiburan Hari Raya, Hajat

Laut, Ronggeng Gunung dan Kontes Burung Berkicau serta kontes Surfing di Pantai Batukaras dan Pangandaran.

2. Untuk menunjang kepariwisataan, di Kabupaten Pangandaran cukup tersedia sarana akomodasi atau penginapan yang tersebar. Berdasarkan hasil pendataan PHRI, pada Tahun 2016 di Kabupaten Pangandaran terdapat 311 hotel, diantaranya Hotel berbintang ada 5 buah, Hotel non bintang 306 buah. Namun ketersediaan sarana dan akomodasi ini masih banyak berpusat di Kecamatan Pangandaran yang memang sudah sangat terkenal di Indonesia.

Untuk menggambarkan kondisi sistem inovasi daerah di Kabupaten Pangandaran saat ini secara lebih detil akan dijelaskan melalui 5 (lima) pilar penguatan sistem inovasi dan 6 (enam) agenda kerangka kebijakan inovasi. Kelima pilar penguatan sistem inovasi terdiri dari :

1. Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah;
2. Pilar Pengembangan Klaster Industri;
3. Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi;
4. Pilar Pengembangan Teknopreneur dan
5. Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi.

Sedangkan enam agenda Kerangka Kebijakan Inovasi meliputi :

1. Membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis;
2. Memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa;
3. Menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis;
4. Mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis;
5. Memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar daerah dan pusat-daerah; dan
6. Menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah.

Selanjutnya, masing-masing agenda kerangka kebijakan inovasi terdiri dari beberapa elemen, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Agenda membangun kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis terdiri dari tiga elemen, yaitu (1) elemen regulasi pengembangan inovasi dan bisnis, (2) elemen insentif pengembangan inovasi dan bisnis, dan (3) elemen infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis;

2. Agenda memperkuat keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa terdiri dari tiga elemen, yaitu (1) elemen kelembagaan iptekin/litbangyasa, (2) elemen daya dukung iptekin/litbangyasa, dan (3) elemen daya serap iptekin/litbangyasa.
3. Agenda menumbuhkembangkan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis, terdiri dari tiga elemen, yaitu (1) elemen kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis, (2) elemen peningkatan difusi inovasi, dan (3) elemen wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis.
4. Agenda mendorong budaya kreatif-inovatif dan bisnis, terdiri dari empat elemen, yaitu (1) elemen penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, (2) elemen pengelolaan teknologi masyarakat, (3) elemen apresiasi dan kampanye inovasi, dan (4) elemen penumbuhan usaha baru inovatif.
5. Agenda memperkuat fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan antar daerah dan pusat-daerah, terdiri dari tiga elemen, yaitu (1) elemen fokus pengembangan inovasi dan bisnis, (2) elemen keterpaduan kebijakan inovasi dan bisnis, dan (3) elemen kelembagaan khusus.
6. Agenda menyelaraskan dinamika global ke dalam pengembangan inovasi dan bisnis daerah terdiri atas empat elemen, yaitu (1) elemen lingkungan, (2) elemen standarisasi, (3) elemen hak kekayaan intelektual (HKI), dan (4) elemen ketenagakerjaan.

Setiap elemen memiliki satu atau lebih indikator seperti di bawah ini :

1. Elemen regulasi pengembangan inovasi dan bisnis memiliki satu indikator, ialah (1) jumlah regulasi pengembangan inovasi dan bisnis.
2. Elemen insentif pengembangan inovasi dan bisnis mempunyai satu indikator, yaitu (1) jenis insentif pengembangan inovasi dan bisnis.
3. Elemen infrastruktur dasar pengembangan inovasi dan bisnis terdiri atas dua indikator, yakni (1) jenis dokumen pengembangan inovasi dan bisnis, (2) ketersediaan database inovasi dan bisnis.
4. Elemen kelembagaan iptekin/litbangyasa meliputi satu indikator, yaitu (1) sebaran lembaga iptekin/litbangyasa.
5. Elemen daya dukung iptekin/litbangyasa terdiri dari dua indikator, ialah (1) sebaran sumber daya manusia iptekin/litbangyasa, (2) sebaran alokasi anggaran iptekin/litbangyasa.

6. Elemen daya serap iptekin/litbangyasa mencakup satu indikator, yakni (1) sebaran absorpsi hasil iptekin/litbangyasa.
7. Elemen kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pelayanan inovasi dan bisnis terbagi atas satu indikator, ialah (1) sebaran kemitraan strategis dalam pemajuan inovasi dan bisnis
8. Elemen peningkatan difusi inovasi memiliki satu indikator, ialah (1) sebaran difusi inovasi.
9. Elemen wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis mempunyai satu indikator, yaitu (1) jenis wahana interaksi pelaku inovasi dan bisnis.
10. Elemen penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan terdiri atas dua indikator, yakni (1) model penguatan budaya inovasi dan kewirausahaan di dalam pendidikan, (2) model penguatan budaya inovasi dan bisnis melalui pelatihan.
11. Elemen pengelolaan teknologi masyarakat meliputi satu indikator, yaitu (1) model pengelolaan teknologi masyarakat.
12. Elemen apresiasi dan kampanye inovasi terdiri dari dua indikator, ialah (1) jenis apresiasi inovasi, (2) jenis media kampanye inovasi.
13. Elemen penumbuhan usaha baru inovatif mencakup satu indikator, yakni (1) model penumbuhan usaha baru inovatif.
14. Elemen fokus pengembangan inovasi dan bisnis terbagi atas satu indikator, ialah (1) bidang fokus pengembangan inovasi dan bisnis.
15. Elemen keterpaduan kebijakan inovasi dan bisnis memiliki satu indikator, ialah (1) sebaran kerja sama daerah.
16. Elemen kelembagaan khusus mempunyai satu indikator, yaitu (1) jenis kelembagaan khusus.
17. Elemen lingkungan terdiri atas satu indikator, yakni (1) sebaran program pembangunan daerah ramah lingkungan.
18. Elemen standarisasi meliputi satu indikator, yaitu (1) sebaran aplikasi standarisasi internasional.
19. Elemen hak kekayaan intelektual terdiri dari satu indikator, ialah (1) jenis hak kekayaan intelektual.
20. Elemen ketenagakerjaan mencakup satu indikator, yakni (1) sebaran sertifikasi tenaga kerja terampil.

Namun demikian, sebelum memetakan kondisi SIDA saat ini, terlebih dahulu akan digambarkan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 yang terkait langsung dengan program penguatan SIDA yaitu program/kegiatan yang merupakan penjabaran dari Misi ke-6: “Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan”, sebagai berikut :

Tabel 8
Kondisi Capaian Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019
 MISI ke-6: Membangun Perekonomian yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Mendorong sektor keuangan dan pelaku usaha besar untuk membantu pengembangan produk-produk unggulan kreatif	Pembinaan dan fasilitasi untuk mendorong potensi ekspor dan optimalisasi pangsa pasar lokal sentra-sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online	DINAS PERDAGANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Promosi produk-produk unggulan	PRODUK YANG DIEKSPOR : coconut powder, dc, coconut crea, coconut water, cocopeat, gula semut, manggis, jus honje. NEGARA TUJUAN EKSPOR : China,Australia,Brazil, Taiwan, Costarica, Rusia, USA, Canada, New Zeland,Korea, Francis, Jepang, Yordania, Malaysia, Kenya Honkong, Eropa			
				DISPARBUD	Program Pengembangan Industri Kreatif	Pembinaan pelaku usaha kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pembinaan sebanyak 15 orang (Terbinannya Para Pelaku usaha ekonomi kreatif subsektor kriya)			
							DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Dokumen Ketenagakerjaan
								Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja	Bahan dan Materi Pendidikan BLK	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Menciptakan Wirausaha baru	Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan	DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Monev Ketenagakerjaan
						Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Dokumen Bursa Tenaga Kerja
						Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja melalui media sosial dan brosur
						Kerjasama pendidikan dan pelatihan Ketenagakerjaan	Belum ada MoU tertulis dari 14 LPK Swasta yang dibina
						Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Kegiatan Pelatihan Ketenagakerjaan telah dilakukan sebanyak 2 kegiatan
						Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan sebanyak : 20 peserta

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Menciptakan Wirausaha baru	Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan	DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pelatihan bagi Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM)(DBHCT)	Jumlah Masyarakat yang dibina melalui kegiatan TKM sebanyak : 40 Orang (2 kelompok petani tembakau)
						Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan	Jumlah Usulan Ketenagakerjaan sebanyak : 20 usulan
		Peningkatan kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja			Survei Kebutuhan Hidup Layak	Dokumen KHL
						Perumusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pangandaran tahun 2021	Dokumen UMK
						Penyelesaian Permasalahan dan Pemulangan TKI	Jumlah kasus TKI yang terselesaikan sebanyak : 5 Kasus
						Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah LPK yang dibina sebanyak: 14 LPK yang sudah terdata, namun belum memiliki MoU tertulis dengan Pemda

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Peningkatan kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah Kasus Perselisihan Ketenagakerjaan sebanyak : 5 Kasus
						Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah Kasus K3 yang Terselesaikan sebanyak : 5 Kasus
						Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan k3 sebanyak : 3 Kegiatan
						Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan terhadap keselamatan kerja sebanyak : 3 Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Peningkatan kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja	Dokumen Standarisasi LPK
						Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan terhadap LPK di Kabupaten Pangandaran sebanyak: 3 Kegiatan
						Penyuluhan transmigrasi regional	Jumlah Peserta sebanyak : 5 KK
						Pelatihan transmigrasi regional	Jumlah Peserta sebanyak : 5 KK
					Program Transmigrasi Lokal	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah KK Translok sebanyak : 50 KK
						Pelatihan transmigrasi lokal	Jumlah Peserta Pelatihan sebanyak : 50 KK
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Peningkatan kerjasama antar wilayah/pelaku/s ektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah Wilayah Kerjasama Antar Daerah sebanyak : 2 Wilayah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Peningkatan kompetensi kerja dan perluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja	DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI		Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan sebanyak : 5 KK
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Kegiatan Monitoring Wilayah Transmigrasi sebanyak : 1 Kegiatan
						Peninjauan Kesiapan Lokasi Unit-Unit Permukiman Transmigrasi	Lokasi transmigrasi yang Berkualitas sebanyak : 1 Lokasi
						Peningkatan SDM Ketransmigrasian dan Kelautan	Jumlah Peserta Pelatihan sebanyak : 5 KK
						Penjajagan Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Trasmigrasi Baru sebanyak : 1 Wilayah Transmigrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah				1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3. Pengendalian PMDN dan PMA	1. Realisasi Investasi tahun 2017 = 543.189346.000 (Realisasi n.a) 2. Realisasi Investasi tahun 2018 = 205.291.216.995 (Realisasi -62,21) 3. Realisasi Investasi tahun 2019 = 471.716.357.987 (atau 130 % dengan capaian target realisasi 577%) 4. Realisasi Investasi tahun 2020 = 57.202.644.444 (atau -88 % dengan capaian target realisasi s.d Tw II sebesar -3,59%)
					Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	1 (satu) Kali Keikutsertaan Penyelenggaraan Pameran Investasi
				DINAS KUKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM dan Pengembangan Sarana	PRODUK YANG DIPROMOSIKAN antara lain : jus honje, olahan hasil laut (asin, jambal roti dsb), kerajinan kerang, aneka keripik, kerajinan batok, kerajinan lidi, kerajinan hata. DAERAH TUJUAN PROMOSI: Bandung, Jakarta, Cirebon, Garut, Bekasi, Tasikmalaya, Ciamis, Yogyakarta, Bali

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif	Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan	DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Gelar Potensi Daerah (Pameran)	Jumlah Event Pameran sebanyak : 9 Event Pameran
						Pembinaan dan Pelatihan Industri Kerajinan	Jumlah Kegiatan Kerajinan Industri Kecil dan Menengah sebanyak : 2 Kegiatan
						Pembinaan dan Pelatihan Industri Kecil Makanan Olahan	Jumlah Kegiatan Makanan Olahan Industri Kecil dan Menengah sebanyak : 2 Kegiatan
						Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) yang Terasilitasi sebanyak : 18 IKM
						Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Belum ada MoU tertulis
						Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Belum ada RIPIN (Rencana Induk Pengembangan Industri)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif	Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan	DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Jumlah Kegiatan Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) sebanyak : 18 Izin
						Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	Belum ada MoU dengan pihak Perbankan
						Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Belum ada MoU tertulis
						Pengolahan dan Pemasaran Prodak garam	Belum ada kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Prodak Garam
						Pembinaan dan Pelatihan Industri Kecil Kerajinan (Dekranasda)	Jumlah Kegiatan Dekranasda sebanyak : 2 Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif	Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan	DINAS TENAGA KERJA INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kecil (Pelatihan Tembakau)(DBH CHT)	Jumlah Kelompok Petani Tembakau yang dibina sebanyak : 40 Orang (2 Kelompok Petani Tembakau)
			Fasilitasi akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkembangkan alternatif sumber-sumber pendanaan baru	DISPARBUD	Program Pengembangan Industri Kreatif	Pengembangan investasi industri kreatif	Kegiatan Tidak dilaksanakan
		Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan memperhatikan kelestarian lahan	DINAS PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Tembakau (DBHCHT)	Terpenuhinya Pengadaan 6 Unit Traktor

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan memperhatikan kelestarian lahan	DINAS PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi Petanian/Perkebunan	Pelatihan Petani Tembakau Berbasis Kompetensi (DBHCHT)	Menambahnya Kompetensi Petani Tembakau Sebanyak 60 Orang
						Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ternak (DBHCHT)	Pemberian Bantuan Bibit Kambing sebanyak 50 Ekor dan 5 Unit Kandang
						Pengembangan Sumber-Sumber Air (Pembangunan Dam Parit) (DAK)	Terbangunya DAM PARIT Sebanyak 14 Unit
						Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Pembangunan Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan) (DAK)	Meningkatnya Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan Sebanyak 1 Unit
						Penyusunan FS Potensi Pengembangan Agro Wisata	Tersusunnya Dokumen Agro Wisata sebanyak 1 dokumen
						Pengembangan Pos Penyuluh Pedesaan (POSLUHDES) (Banprov)	Terbangunya Posluhdes Sebanyak 21 Unit

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan memperhatikan kelestarian lahan	DINAS PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi Petanian/Perkebunan	Operasional Balai Benih (Banprov)	- 9 mebeleur - 2 Unit Komputer
						Akselerasi Dampak Perubahan Iklim (Banprov)	- padi in hibrida 40 ton - insektisida 700 lt - rodentisida 1.435 kg - fungisida 5000 kg - kendaraan 2 unit.
						Pembangunan Drainase (DBHCHT)	Terbangunnya Drainase sebanyak 4 unit
						Peyelenggaraan Penyuluh Pertanian (BOP),	Jumlah penerima bantuan operasional Pertanian (BOP) sebanyak 125 orang
						DED Pembangunan Balai P+enyuluh Pertanian	Tersedianya dokumen DED untuk Balai Penyuluh Pertanian
						Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	Terfalitasnya bibit Pala sebanyak 3160 batang yang tersebar dikelompok tani Kab. Pangandaran dengan jumlah kelompok tani sebanyak 4 kelompok
			Meningkatkan penerapan teknologi di bidang pertanian	DINAS PERTANIAN		Pembuatan APPO (Alat Pengolahan	Terfasilitasinya bangunan dan mesin APPO dan sarana pendukungnya di kelompok tani tembakau yang tersebar di

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
						Pupuk Organik) (DBHCHT)	Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Peningkatan produksi pangan pokok	Penguatan kapasitas produksi yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan cabai	DINAS PERTANIAN	Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perk ebunan	usulan bantuan keuangan biaya operasional penyuluh pertanian(BOP) PNS (Banprov)	Jumlah penerima BOP Penyuluh sebanyak 19 orang.
		Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya	Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	DKPKP	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	3 kali patroli pengawasan
						Pameran dan Promosi	8 lokasi
		Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pembangunan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1 TPI		
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	8 koperasi perikanan		
		Meningkatkan pendapatan masyarakat	Mendorong kewirausahaan bagi para petani	Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Penerima Induk Ikan Unggul Sebanyak 10 Kelompok	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Mendorong kewirausahaan bagi para petani	DKPKP	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Nelayan	500 orang nelayan penerima asuransi nelayan
			Memudahkan akses permodalan bagi nelayan dan petani ikan		Pengembangan Budidaya Perikanan	Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Cimerak	Jumlah Benih Ikan Unggul Sebanyak 21.000 Ekor
			Meningkatkan sarana dan prasarana nelayan dan petani ikan		Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (DAK)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 paket perahu • 80 unit alat penangkapan ikan • 9 unit alat bantu penangkapan ikan
			Meningkatkan peran serta nelayan dan petani ikan dalam perekonomian			Pembangunan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1 TPI
					Pengembangan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Nelayan	500 orang nelayan penerima asuransi nelayan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Memanfaatkan dukungan teknologi baru	Meningkatkan akses nelayan dan petani ikan terhadap pemanfaatan teknologi	DKPKP	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan	55 unit mesin penggerak kapal penangkapan ikan			
		Menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata	Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, dukungan APBD Provinsi Jawa Barat terhadap kebijakan ini yaitu Penataan Kawasan Pantai Barat dan Timur Pangandaran serta Pembangunan Breakwater Pangandaran	DISPARBUD	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penataan Kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur (Banprov)	Jumlah destinasi wisata alam yang ditata sebanyak 1 destinasi wisata			
							Pengembangan daya tarik wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan kualitas destinasi wisata alam	Jumlah destinasi wisata alam yang berkualitas sebanyak 1 destinasi wisata
							Pengembangan aksesibilitas wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penataan Kawasan Wisata Pantai Karapyak	Jumlah destinasi wisata alam yang ditata sebanyak 1 destinasi wisata

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah		Pemberdayaan masyarakat pariwisata	DISPARBUD	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	Pembinaan SDM Kepariwisataan	Kegiatan Tidak dilaksanakan
		Mengembangkan pemasaran pariwisata	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	DISPARBUD	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Di Luar Negeri	Kegiatan Tidak dilaksanakan
					Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Pembuatan Media Promosi	Jenis media promosi sebanyak 2 jenis (Promosi secara online melalui media sosial yang dimiliki: IG, FB, Twitter, dan Website, offline: Booklet, Leaflet, Flayer)
						Penyusunan Database Kepariwisataan	Jumlah dokumen database kepariwisataan termasuk situs alam dan budaya yang akurat dan termutakhirkan sebanyak 1 dokumen
						Analisa Kepuasan Wisatawan	Kegiatan tidak dilaksanakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Mengembangkan kemitraan dan kelembagaan pariwisata	Pembinaan usaha pariwisata	DISPARBUD	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata (DAK NON Fisik)	Jumlah masyarakat yang memperoleh pembinaan SDM Kepariwisata sebanyak 375 orang
			Pengembangan organisasi kepariwisataan dan SDM pariwisata	DISPARBUD	Program Pengembangan Kemitraan	Pembinaan organisasi kepariwisataan	Kegiatan tidak dilaksanakan
		Meningkatkan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	DISPARBUD	Program Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Penilaian GSTC-D	Terbentuknya Tim Koordinasi Persiapan GSTC-D
						Peningkatan Pelayanan Kepariwisata	Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung sebanyak 5 destinasi
						Penyusunan Peraturan Daerah Desa Wisata	Kegiatan tidak dilaksanakan
						Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	SDM pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan sebesar 60%

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	OPD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah					Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Akses Untuk Semua)	jumlah destinasi GSTC yang memiliki sarana dan prasarana wisata yang mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas sebanyak 5 destinasi

Tabel 9
Kondisi SIDA Kabupaten Pangandaran Saat Ini (Tahun 2020)

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 1 : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Program SIDA masuk ke dalam Dokumen RPJPD dan RPJMD	Program SIDA belum terintegrasi ke dalam Dokumen RPJPD dan RPJMD.
		Peraturan Daerah terkait Inovasi Daerah	Belum memiliki Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Inovasi Daerah
		Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Inovasi Daerah	Belum memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Inovasi Daerah
		Database inovasi	Database inovasi baru sebatas pada hasil inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah.
		Database bisnis yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa	Data bisnis perikanan yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa sudah ada namun belum terdokumentasikan dengan baik, dan kondisinya masih tersebar di perangkat daerah terkait, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> Industri pembudidaya udang vaname telah menggunakan teknologi pengukur kualitas air dan teknologi pemberian pakan ikan yang dikendalikan dari handphone

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 1 : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Sistem perijinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan kompetitif berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> • Perijinan sudah berbasis TIK, jumlah ijin yang dilayani sebanyak 136 ijin dan 17 non perijinan • Belum memiliki Rencana Umum Penanaman Modal Tingkat Kabupaten Pangandaran
		Kebijakan insentif bagi pengembangan inovasi dan bisnis yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman	Belum memiliki Kebijakan Insentif bagi pengembangan inovasi dan bisnis yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman dikarenakan belum memiliki Rencana Umum Penanaman Modal
		Belanja iptekin terhadap APBD	Belanja iptekin terhadap APBD belum terukur
		Ruang publik sebagai sarana untuk berinteraksi antar warga masyarakat untuk memunculkan komunitas-komunitas kreatif	Sudah memiliki ruang publik sebagai sarana untuk berinteraksi antar warga masyarakat untuk memunculkan komunitas-komunitas kreatif namun masih terbatas. Ruang publik tersebut yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangandaran Creative Space yang digunakan oleh komunitas literasi 2. Rumah Kreatif milik BNI
		Ruang Publik sebagai sarana untuk berinteraksi antar pelaku inovasi dan bisnis (misalnya <i>Science Techno Park</i>)	Sudah memiliki ruang publik sebagai sarana untuk berinteraksi berinteraksi antar pelaku inovasi dan bisnis, namun masih terbatas, yaitu baru di Rumah Kreatif milik BNI. Selain itu, mereka hanya berkumpul dalam wadah non formal seperti BARAYA UMKM
		Ketersediaan infrastruktur pengembangan kapasitas (diklat) untuk mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis hasil iptekin	Belum memiliki Balai Latihan Kerja sebagai infrastruktur pengembangan kapasitas (diklat) untuk mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis hasil iptekin

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 1 : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk belanja hasil iptekin/litbangyasa	Belum ada Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk belanja hasil iptekin/litbangyasa
		Kebijakan Pembentukan Posyantek dan Pengelolaan SDA dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Belum ada Kebijakan Pembentukan Posyantek dan Pengelolaan SDA dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Tim Koordinasi SIDA	Sudah memiliki Tim Koordinasi SIDA, namun karena baru terbentuk sehingga belum dapat bekerja
		.Jumlah Kelembagaan IPTEKIN	Jumlah kelembagaan IPTEKIN sudah ada, namun masih terbatas, yaitu : 1. Struktur Lembaga Litbangda setara eselon 3, namun pelaksana litbangda hanya setara eselon 4 2. Belum memiliki Pejabat Fungsional Peneliti 3. Keberadaan Perguruan Tinggi sangat terbatas, yaitu: a. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Program Studi : Budidaya Ikan, Pengolahan Hasil Laut, Teknologi Kelautan b. Universitas Padjadjaran yang memiliki Jurusan Perikanan, Administrasi Bisnis, Peternakan, Ilmu Komunikasi dan Keperawatan. c. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul Ulama (STITNU) Al Farabi Pangandaran d. Universitas Saleh Budiman e. Universitas Galuh Pangandaran 4. Keberadaan SMK penghasil iptekin di Kab Pangandaran yaitu : a. SMK Swasta NU Pelita Nusantara b. SMK Swasta Pasundan Cijulang c. SMK Negeri 1 Cijulang d. SMK Swasta Miftahul Ulum Merak

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
			<ul style="list-style-type: none"> e. SMK Swasta Teknologi Modern Kalipucang f. SMK Swasta Al Kautsar Kalipucang g. SMK Swasta Al-Masturiyah Langkaplancar h. SMK Swasta Samudera Buana Langkaplancar i. SMK Negeri 1 Padaherang j. SMK Swasta Pasundan Padaherang k. SMK Negeri 1 Pangandaran l. SMK Swasta Putera Pangandaran m. SMK Swasta Bhakti Kencana Pangandaran n. SMK Swasta Kesehatan Parigi o. SMK Swasta Tunas Brilliant Parigi p. SMK Swasta Asy Syifa 02 Parigi q. SMK Swasta Bakti Karya Parigi r. SMK Swasta Nurul Huda s. SMK Swasta Muhammadiyah Mangunjaya t. SMK Plus Darunnajah Padaherang u. SMK Industri Logam Pangandaran v. SMK Swasta IT Ibnu Ahkam Kalipucang w. SMK Negeri 2 Pangandaran x. SMK Plus Maarif NU Parigi <p>5. Keberadaan Industri pemanfaat hasil iptekin sangat terbatas, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PT PECCU yang bergerak dalam pengolahan pasca panen kelapa b. Industri Minyak c. King Star Plastic d. Kecap Cap Jago e. Pacific Eastern Coconut Utama f. Djurago Kayak g. Industri Garam Rakyat <p>4. Belum memiliki Posyantek dan Posyantek Antar Desa</p>

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
			<p>5. Komunitas kreatif sangat terbatas, antara lain yang bergerak dalam bidang :</p> <p>a. Komunitas Rumah Plankton (pegiat literasi)</p> <p>b. KOMUDITIF (Komunitas Muda Mudi Kreatif) Pangandaran</p> <p>5. Keberadaan wahana penunjang iptekin sangat terbatas, antara lain :</p> <p>a. PIAMARI (<i>Pangandaran Integrated Aquarium dan Marine Research Institute</i>) atau Aquarium Terpadu Pangandaran dan Lembaga Penelitian Kelautan yaitu tempat riset ilmiah perairan Pangandaran</p> <p>b. Inkubator bisnis milik Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>6. Hasil inovasi yang siap dihilirisasi :</p> <p>a. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang</p> <p>b. UNPAD</p> <p>c. SMK</p>
Pilar 1 : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah		Kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap hasil iptekin/litbangyasa	Jumlah industri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah berhasil menyerap hasil iptekin/litbangyasa sudah baik, antara lain UMKM yang bergerak di sektor kriya/kerajinan, kuliner.
	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Sosialisasi kaidah-kaidah Penguatan SIDA kepada seluruh aktor di daerah (ABGC)	Kaidah-kaidah Penguatan SIDA sudah tersosialisasikan kepada seluruh aktor di daerah (ABGC)
		Interaksi antar penghasil inovasi dan bisnis	Interaksi antar penghasil inovasi dan bisnis antara lain dilaksanakan melalui Temu Bisnis yang difasilitasi oleh Dinas PMPTSP, namun tidak berkelanjutan

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 1 : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat belum optimal, antara lain dengan UNPAD
		Kerjasama pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan	Belum ada MOU, namun kegiatan pembinaan terhadap LPK swasta sudah dilakukan
		Aktifitas Posyantek dan Posyantek Antar Desa	Belum ada aktifitas Posyantek dan Posyantek Antar Desa
	Elemen 4: Budaya inovasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam berinovasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam berinovasi sudah baik, ditunjukkan dengan keberadaan komunitas-komunitas kreatif
		Apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif, baik untuk ASN maupun masyarakat dan dunia usaha	Sudah ada apresiasi terhadap ASN berprestasi tetapi belum optimal, sedangkan apresiasi untuk masyarakat dan dunia usaha yang melakukan kegiatan kreatif inovatif belum ada
		Akses terhadap Hasil Iptekin/Litbangyasa	Belum teridentifikasi jumlah masyarakat yang mengakses hasil Iptekin/Litbangyasa
	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Sudah ada kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemajuan sistem inovasi namun masih minim, yaitu antara lain : 1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Perindustrian 3. KADIN
		Kerjasama antar daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Sudah ada kerjasama antar daerah dalam pemajuan sistem inovasi namun masih minim, antara lain Intermediasi Teknologi Benih Padi Tahan Genangan, kerjasama antara BP2D Provinsi Jawa Barat-Dinas Peranian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dengan Bappeda Kabupaten Pangandaran-Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 1 : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Layanan Sentra KI	Belum memiliki Sentra KI
		Jumlah KI yang didaftarkan	Jumlah KI yang telah didaftarkan sebanyak 25 usulan
Pilar 2: Penguatan Kluster Industri	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Kelembagaan pengelola pengembangan kluster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kelembagaan pengelola pengembangan kluster Berbasis Potensi Unggulan Lokal yaitu : a. Tim Koordinasi Persiapan GTSC-D b. KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata) yang berada di setiap kecamatan dan di tingkat kabupaten c. POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) d. Komunitas Jaga Lembur yang bertugas melakukan pengamanan di lokasi destinasi wisata
		Landasan legal bagi pengembangan kluster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Sudah memiliki landasan legal bagi pengembangan kluster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal, yaitu yang dimuat dalam : 1. RPJPD 2. RTRW 3. RIPPANDA (Perda Nomor 7 Tahun 2018) 4. Perda No 14 Tahun 2015 tentang Pariwisata
		Kajian Analisis Input Ouput Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kajian Analisis Input Ouput Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal belum disusun
		Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal Kabupaten Pangandaran	Sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pangandara
		Rencana Induk Pengembangan Potensi Unggulan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki Dokumen Pengembangan Agrowisata; • Sudah memiliki Kajian Pengembangan Potensi Unggulan Lokal

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Sudah ada Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal namun belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah
		Penetapan Desa Wisata Unggulan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah Infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal (kondisi jalan)	Belum ada penetapan Desa Wisata Unggulan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah
			Destinasi Wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung baru mencapai 5 destinasi
			Destinasi GSTC yang memiliki sarana prasarana wisata yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas baru ada di 5 destinasi
			Kondisi infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal sudah baik namun belum merata
		Infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal (media informasi dan promosi)	Kondisi infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal sudah baik
		Fasilitas akomodasi, kuliner dan <i>merchandise</i> yang sudah terstandarisasi	Jumlah fasilitas akomodasi yang terstandar mencapai 31 Jumlah produk kuliner yang sudah terstandarisasi belum memadai Jumlah restoran yang sudah terstandarisasi belum memadai Jumlah gerai <i>merchandise</i> belum memadai
		Kebijakan pengembangan homestay yang terstandarisasi	Belum ada kebijakan pengembangan homestay yang terstandarisasi
Kebijakan kerjasama pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Belum ada Kebijakan kerjasama pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal.		

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Belum ada Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal
		Profesionalitas pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	SDM Pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan baru mencapai 60%
			Jumlah masyarakat yang memperoleh pembinaan SDM Kepariwisata baru mencapai 375 orang (Tahun 2019)
			Jumlah pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal yang bersertifikat baru di pelaku kopi robusta
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Lembaga pendukung pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Lembaga pendukung pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal : 1. HPI 2. ASITA 3. Asosiasi Tour dan Travel 4. PHRI 5. KOMPEPAR 6. POKDARWIS
		Pasokan iptekin untuk Produk Unggulan Lokal	Pasokan iptekin Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal memadai
		Daya serap iptekin penghasil Produk Unggulan Lokal	Daya serap iptekin pelaku Produk Unggulan Lokal (on farm maupun off farm) mulai berkembang
		Pasokan iptekin untuk Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pasokan iptekin Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal belum memadai
		Daya serap iptekin pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Daya serap iptekin pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal masih minim

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal	Belum teridentifikasi interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal
		Interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Belum teridentifikasi interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa
		Interaksi antara penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Interaksi antara penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa baru terjalin dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
			Pembinaan IKM dalam meningkatkan jaringan klaster industri sudah dilakukan namun tidak dtuangkan dalam MoU
		Kerjasama pemanfaatan riset Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Belum ada kerjasama pemanfaatan riset Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
	Elemen 4: Budaya inovasi	Budaya inovasi dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal	Budaya inovasi dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal sudah cukup baik
		Budaya Inovasi dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Budaya Inovasi dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal masih minim
	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa	Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa sudah baik
		Rantai Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Rantai Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal belum ada
		Kesadaran penghasil Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI	Kesadaran penghasil Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI sudah ada namun masih minim dikarenakan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah masih terbatas

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 2: Penguatan Klaster Industri		Kesadaran pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal terhadap KI	Kesadaran pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal terhadap KI belum teridentifikasi
	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Aktifitas Produksi sudah berwawasan Lingkungan	Aktifitas Produksi sudah berwawasan Lingkungan sudah ada namun masih terbatas
		Aktifitas Pariwisata berstandar internasional	Aktifitas Pariwisata berstandar internasional antara lain : a. Festival Layang-layang b. Marathon c. Pan ASIA Hash
Pilar 3 : Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Instrumen legal penetapan kawasan spesifik (technopark/telesenter/kawasan industri)	Sudah ada kebijakan penetapan Kawasan Industri
		Dokumen rencana induk kawasan spesifik	Belum ada Dokumen rencana induk kawasan industri
		Perijinan dan investasi bagi industri yang produknya merupakan produk unggulan lokal	Sudah ada perijinan dan investasi bagi industri yang produknya merupakan produk unggulan lokal
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Forum jaringan inovasi	Belum ada forum jaringan inovasi

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 3 : Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Perguruan Tinggi berbasis iptekin	Perguruan Tinggi berbasis iptekin sudah tersedia, yaitu : a. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Universitas Padjadjaran
		Lembaga penghasil Produk Unggulan Lokal Berbasis Iptekin	Lembaga penghasil Produk Unggulan Lokal Berbasis Iptekin, antara lain : a. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Universitas Padjadjaran
	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Kerjasama dan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik	Belum ada kerjasama dan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik
		Kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah	Belum ada kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah
		Kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Belum ada kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
		Keberadaan Pusat belajar masyarakat berupa Telecenter atau Broadband Learning Center (BLC)	Belum memiliki Pusat belajar masyarakat berupa Telecenter atau Broadband Learning Center (BLC) (sarana pembelajaran komputer dan internet gratis bagi warga)
	Elemen 4: Budaya inovasi	Budaya berjejaring antara aktor inovasi	Budaya berjejaring antara aktor inovasi sudah berkembang namun masih minim.
Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Keterkaitan antar kawasan spesifik dengan perguruan tinggi	Belum terjalin keterkaitan antar kawasan spesifik dengan perguruan tinggi	

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 3 : Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Kerjasama antar daerah dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Belum terjalin kerjasama antar daerah dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
		Jumlah Desa yang sudah mengembangkan inovasi	Belum teridentifikasi jumlah Desa yang sudah mengembangkan inovasi
	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi	Belum ada kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi
		Kerjasama internasional dalam pengembangan Pariwisata yang terstandarisasi	Sudah ada kerjasama internasional dalam pengembangan Pariwisata yang terstandarisasi antara lain dengan UNCUTO pada Tahun 2015 tentang Kerjasama Pariwisata Berkelanjutan, yaitu di Batu Karas dan Green Canyon
Pilar 4: Penguatan Teknopreneur	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Skema pembiayaan dari pemerintah daerah dan swasta bagi pengembangan bisnis inovatif	Belum ada skema pembiayaan dari pemerintah daerah dan swasta bagi pengembangan bisnis inovatif
		Bantuan fasilitas kredit bagi UKM dan IKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada fasilitas kredit bagi UKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal • Belum ada MoU antara IKM dan Perbankan
		Kebijakan insentif bagi <i>start up</i> yang mengembangkan Produk Unggulan Lokal berbasis Inovasi	Belum ada kebijakan insentif bagi <i>start up</i> yang mengembangkan Produk Unggulan Lokal berbasis Inovasi
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau	Kelembagaan inkubator bisnis	Kelembagaan inkubator bisnis sudah ada milik Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta UNPAD Kampus Pangandaran, namun belum dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
Pilar 4: Penguatan Teknopreneur	penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM	Kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal	Kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal cukup baik
		Kegiatan Klinik Bisnis	Kegiatan Klinik Bisnis sudah berlangsung di Rumah Kreatif milik BNI
	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Jumlah UMKM dan IKM yang mengembangkan inovasi	Jumlah UMKM dan IKM yang mengembangkan inovasi belum teridentifikasi
		Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM	Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM belum teridentifikasi
		Interaksi antara penghasil teknologi dengan perbankan	Belum ada Interaksi antara penghasil teknologi dengan perbankan
	Elemen 4: Budaya inovasi	Program yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan budaya inovasi di kalangan masyarakat	Belum ada program khusus yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan budaya inovasi di kalangan masyarakat
	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal, antara lain : 1. Budidaya Udang Vaname yang sudah memanfaatkan IT 2. Kopi Robusta 3. Jus honje 4. Produk Olahan Kelapa 5. Produk Olahan Pisang
		Kerjasama antar pihak dalam pengembangan usaha inovatif (misalnya pemasaran produk melalui pasar modern)	Kerjasama antar pihak dalam pengembangan usaha inovatif, antara lain dengan 1. Pasar Modern 2. On line Shopping (Tokopedia, Shopee, dll)
	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Produk dari bisnis inovatif yang terstandar	Produk dari bisnis inovatif yang terstandar sudah ada namun masih terbatas misalnya Jus Honje yang sudah masuk pasar ekspo

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
		Kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif	Belum ada kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif
Pilar 5 : Pengembangan Tematik Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah yang berbasis pada <i>Green Innovation Development</i> (GID)	Belum ada Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah yang berbasis pada <i>Green Innovation Development</i> (GID)
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Kelembagaan khusus yang menangani pengembangan <i>Green Innovation Development</i> (GID)	Belum ada Kelembagaan khusus yang menangani pengembangan <i>Green Innovation Development</i> (GID)
		Daya dukung iptekin energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah (Pasokan teknologi penghasil energi listrik, pengolahan air bersih, TIK, pengolahan limbah dan sampah)	<p>Pasokan Teknologi Penghasil Energi Listrik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PLN • Belum ada sumber energi terbarukan <p>Pasokan Teknologi Pengolahan Air Bersih terdiri dari :</p> <p>SPAM Perkotaan : PDAM</p> <p>SPAM Pedesaan : Pengelolaan berbasis masyarakat (Pansimas)</p> <p>Pasokan Teknologi Pengolahan Limbah dan Sampah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada IPLT • Belum ada kawasan/system terpusat • Incinerator sederhana terdapat di 3 titik di Desa Pangandaran yg diinisiasi oleh kotaku • TPS3R
		Kapasitas absorpsi masyarakat terhadap iptekin energi, air bersih, TIK, pengelolaan limbah dan sampah	<p>Masyarakat yang memanfaatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Energi Listrik Terbarukan : Belum ada • Teknologi Pengelolaan Air Bersih : SPAM Perkotaan : <3000 saluran pelanggan SPAM Pedesaan : 15000 sambungan rumah

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI
		(Pemanfaatan teknologi penghasil energi listrik, pengolahan air bersih, TIK, pengolahan limbah dan sampah)	<ul style="list-style-type: none"> Teknologi Pengolahan limbah dan sampah : Penggunaan Incinerator sederhana, terdapat di 3 titik dengan layanan 1 RW.
Pilar 5 : Pengembangan Tematik Daerah	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Kerjasama litbangyasa terkait energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah	Sudah ada kerjasama litbangyasa terkait energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah
	Elemen 4: Budaya inovasi	Budaya inovasi di perangkat daerah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah	Budaya inovasi di perangkat daerah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah belum teridentifikasi
	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Kebijakan daerah dalam pembangunan hijau (energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah)	Sudah ada Kebijakan daerah dalam pembangunan hijau (energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah)
	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Kerjasama internasional dalam pembangunan infrastruktur energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah	Belum ada kerjasama internasional dalam pembangunan infrastruktur energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah
		Jumlah sertifikasi, standarisasi dan KI untuk infrastruktur energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah	Belum ada sertifikasi, standarisasi dan KI untuk infrastruktur energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah

BAB 3

TANTANGAN DAN PELUANG

Bab ini menguraikan peluang-peluang yang ada di masa depan bagi peningkatan daya saing berbasis potensi daerah dan bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada bagi tercapainya peluang-peluang tersebut di atas melalui Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Penguatan sistem inovasi merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan pembangunan masyarakat berpengetahuan (*knowledge-based society*). Penguatan sistem inovasi dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan kesejahteraan, peningkatan produktivitas dan penghematan sumber daya, baik pada skala nasional maupun daerah.

Kabupaten Pangandaran yang mempunyai posisi strategis dan tempat tujuan wisata yang cukup potensial di Indonesia akan membutuhkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah untuk mempercepat proses pembangunan di daerahnya. Dalam mengimplementasikan penguatan SIDa, Kabupaten Pangandaran tentu harus mengenali tantangan dan peluang yang dihadapinya. Adapun tantangan dan peluang penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pangandaran akan diuraikan di bawah ini.

3.1. TANTANGAN

Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Penguatan SIDa seperti yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Tabel 10

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penguatan SIDa di Kabupaten Pangandaran

ASPEK	BIDANG	PERMASALAHAN/TANTANGAN
KEBIJAKAN SIDa	PERENCANAAN	<ul style="list-style-type: none">Program Penguatan SIDa belum diintegrasikan ke dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pangandaran

ASPEK	BIDANG	PERMASALAHAN/TANTANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Penguatan SIDA di Kabupaten Pangandaran • Belum memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Inovasi Daerah • Dalam dokumen RTRW Kabupaten Pangandaran baru menetapkan Kawasan Industri dan belum menetapkan Kawasan Sain dan Teknologi • Belum memiliki database hasil iptekin dan bisnis yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa
	PERIJINAN DAN INVESTASI	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Pangandaran belum menetapkan kebijakan pemberian insentif bagi UMKM yang memanfaatkan hasil iptek dan inovasi • Belum memiliki Kebijakan Insentif bagi pengembangan inovasi dan bisnis • Masih rendahnya jumlah investor • Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor • Kurangnya event yang mampu menarik investasi
UNSUR SIDA (KELEMBAGAAN, JEJARING DAN SUMBER DAYA)	LITBANG	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Lembaga Litbangda setara eselon 3, namun pelaksana litbangda hanya setara eselon 4 • Belum memiliki Pejabat Fungsional Peneliti • Belum ada kerjasama pemanfaatan hasil iptekin yang dihasilkan oleh SMK ataupun perguruan tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran • Belum ada kerjasama inkubasi bisnis antara perguruan tinggi dengan UMKM di Kabupaten Pangandaran • Interaksi antara penghasil iptekin dengan dunia bisnis/UMKM masih terbatas • Komunitas kreatif sangat terbatas • Keberadaan wahana penunjang iptekin sangat terbatas
	TENAGA KERJA	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki Balai Latihan Kerja sebagai infrastruktur pengembangan kapasitas (diklat) untuk mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis hasil iptekin • Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan belum maksimal • Masih kurangnya pelatihan kewirausahaan
	PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> • Minat belajar masyarakat Pangandaran masih rendah

ASPEK	BIDANG	PERMASALAHAN/TANTANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas masyarakat lebih memilih bekerja setelah lulus SMA/SMK sederajat
PENGEMBANGAN SIDA	PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi padahal sektor ini yang didalam nya ada kegiatan pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran • Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pariwisata • Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata yang kewenangannya dibawah PEMDA • Pengembangan dan persediaan daya tarik wisata potensial belum optimal • Kebijakan/landasan hukum kepariwisataan dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik dan usaha pariwisata lainnya belum lengkap • Pemantauan dan pelaporan retribusi wisata di daya tarik wisata yang belum optimal • Masih ada beberapa kriteria GSTC-D yang belum masuk kategori hijau • Kurangnya promosi pariwisata • Kurangnya event pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung • Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal • Pengembangan destinasi wisata tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan dan lokasi yang memadai • Belum optimalnya lahan Parkir • Belum di Bentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah • Belum optimalnya promosi daya tarik wisata • Perlunya Pengembangan daya tarik wisata alternatif selain wisata bahari • Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata
	PERTANIAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB <i>trend</i> pertumbuhanya cenderung menurun tiap tahunnya yaitu -0,06 tahun 2015 dan -2,47 pada tahun 2019 • Masih rendahnya produksi dalam daerah • Kurangnya produk daerah untuk ekspor • Masih rendahnya persentase irigasi kabupaten yang dalam kondisi baik • Belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk pertanian yang representatif

ASPEK	BIDANG	PERMASALAHAN/TANTANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi
	PERIKANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya produksi dalam daerah • Kurangnya produk daerah untuk ekspor • Masih rendahnya SDM nelayan • Masih Rendahnya Armada Nelayan • Belum Optimalnya Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan • Belum optimalnya pemanfaatan Potensi laut/perikanan yg tinggi • Perkembangan teknologi pengolahan ikan belum dapat digunakan secara maksimal oleh kelompok nelayan • belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk perikanan/kelautan yang representatif • Perlu adanya peningkatan <i>life skills</i> terhadap pelaku usaha dan UMKM • Belum ada kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi
	PERKEBUNAN	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya produksi dalam daerah • Kurangnya produk daerah untuk ekspor • Belum ada kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi
	UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi UMKM sebagai muatan lokal belum terpetakan • Minimnya UMKM yang memiliki hak izin dan edar • Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi UMKM bagi wisatawan • Masih rendahnya pemberdayaan SDM UMKM • Belum optimalnya pemasaran produk UMKM • UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan, • Kabupaten Pangandaran belum memiliki rumah kemasan (Sentra UMKM) • Masih rendahnya produksi produk UMKM yang belum memenuhi kriteria barang ekspor • Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk unggulan Kabupaten Pangandaran.
	TEKNOLOGI INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wisata, perekonomian, dan pemerintahan

ASPEK	BIDANG	PERMASALAHAN/TANTANGAN
	KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas MCK Fasilitas MCK belum menjadi kebutuhan utama Tingkat kekumuhan perumahan masih tinggi Jaringan air bersih belum menjadi prioritas ke pemukiman kumuh Kabupaten Pangandaran masih menjadi salah satu kabupaten penyumbang angka prevelensi TB Nasional, sedangkan penanggulangan TB menjadi salah satu program strategis nasional yang perlu di dukung oleh pemerintah tingkat daerah Walaupun persentasenya tidak besar tetapi menunjukkan masih terjadinya kasus malaria yang merupakan salah satu penyakit menular
	INFRASTRUKTUR PENUNJANG PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum Pengelolaan limbah masih rendah Masih rendahnya tingkat penanganan terhadap timbulan sampah

Sumber : Hasil Analisis dan Kajian Teknokratik RPJMD Kab Pangandaran Tahun 2021-2025 (diolah)

3.2. PELUANG

Peluang dalam penguatan sistem inovasi bagi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

3.2.1. PELUANG PENGUATAN SIDA DARI ASPEK KEBIJAKAN

1. Pembangunan Berbasis Pengetahuan

Pengetahuan merupakan modal penting bagi suatu daerah dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi di jaman sekarang dan masa mendatang. Penerapan pengetahuan dalam pembangunan perekonomian suatu daerah akan memberi kesempatan tumbuhnya sistem ekonomi yang mempunyai daya saing dan inovatif. Bank Dunia pun telah merumuskan empat pilar penting yang dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu :

- Sebuah rezim ekonomi dan kelembagaan yang memberikan insentif bagi efisiensi penggunaan pengetahuan yang ada dan baru dan berkembangnya kewirausahaan;

- b. Populasi yang terdidik dan terampil yang dapat membuat, berbagi dan menggunakan pengetahuan dengan baik.
- c. Sebuah sistem inovasi efisien perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan dan organisasi lain;
- d. Teknologi informasi dan komunikasi yang efisien dan fasilitatif.

Salah satu prinsip dasar dari ekonomi berbasis pengetahuan adalah inovasi. Ekonomi di Kabupaten Pangandaran sudah seharusnya bergerak dari ekonomi yang mendorong pada investasi menjadi inovasi. Pemerintah, swasta dan universitas di Kabupaten Pangandaran harus saling bersinergi guna mewujudkan sistem ekonomi inovatif di daerah tersebut. Lembaga-lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan sekolah kejuruan, harus menghidupkan kembali perannya sebagai pemimpin penelitian dan inovasi, lebih proaktif dalam melayani penciptaan pengetahuan daripada sekedar transfer pengetahuan.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan telah terbukti berhasil diterapkan di banyak negara maju adalah memperkuat sistem inovasi. Sistem inovasi mampu membangkitkan kreativitas dan inovasi yang diperlukan agar produk-produk sebuah daerah dapat bersaing secara langsung dengan produk daerah/negara lain, baik di pasar domestik maupun internasional.

Dengan mencermati persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Pangandaran dan memetik pelajaran berharga dari negara/daerah lain yang dinilai berhasil, dapat diidentifikasi empat elemen strategis yang perlu diperbaiki dalam penguatan sistem inovasi di Kabupaten Pangandaran guna menghadapi tantangan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, yaitu :

- 1) Perbaiki dalam kondisi dasar sebagai prasyarat penguatan sistem inovasi, yakni:
 - a. Masih terbatasnya pemahaman pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran tentang penguatan sistem inovasi.
 - b. Masih sedikitnya kepastian, praktik atau contoh keberhasilan, dan praktisi dalam mendorong gerakan yang dapat memberikan pengaruh signifikan pada penguatan sistem inovasi di berbagai bidang dan/atau tataran/konteks tertentu.
 - c. Belum adanya sinkronisasi penguatan sistem inovasi dalam pembangunan berbagai urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran.
 - d. Keterbatasan basis data dan indikator sistem inovasi yang berkualitas sebagai landasan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan

evaluasi pembangunan daerah, serta proses pembelajaran dan perbaikan kebijakan.

- 2) Perbaikan dalam enam isu pokok kerangka kebijakan penguatan sistem inovasi, yaitu perbaikan dalam hal :
 - a. Kerangka umum yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan bisnis, terutama berkaitan dengan elemen basis data (*database*), regulasi, insentif, infrastruktur dasar pengembangan klaster industri, pengembangan jaringan inovasi dan pengembangan teknopreneur.
 - b. Kelembagaan iptekin/litbangyasa, daya dukung iptekin/litbangyasa serta kemampuan absorpsi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini masih terbatas.
 - c. Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan klaster industri dan pengembangan teknopreneur yang hingga kini juga masih terbatas.
 - d. Pengembangan budaya kreatif-inovatif dalam masyarakat Kabupaten Pangandaran (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, para pelaku litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum), terutama dalam mendukung pengembangan klaster industri, pengembangan teknopreneur dan pengembangan tematik sistem inovasi.
 - e. Fokus dan keterpaduan kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam hal pengembangan klaster industri yang hingga kini belum berjalan sebagaimana diharapkan, pengembangan jaringan inovasi, pengembangan teknopreneur (wirausaha baru) dan pengembangan tematik sistem inovasi.
 - f. Internalisasi dinamika global, terutama berkaitan dengan aspek lingkungan, standarisasi, Kekayaan Intelektual dan ketenagakerjaan.
- 3) Perbaikan dalam kepeloporan dan kepemimpinan (formal maupun nonformal) yang visioner dan transformasional dengan komitmen tinggi untuk melakukan perubahan dalam perspektif jangka panjang.
- 4) Perbaikan koherensi kebijakan di berbagai bidang pembangunan daerah, baik dalam konteks urusan wajib maupun urusan pilihan.

2. Berkembangnya pembangunan yang berorientasi pada globalisasi

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar daerah, pasar dalam negeri dan pasar internasional secara lebih terbuka memberi peluang bagi masa depan Kabupaten Pangandaran, yaitu:

- a. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi, produksi dan perdagangan terutama komoditi unggulan yang dihasilkan oleh Kabupaten Pangandaran seperti pertanian, perikanan dan perkebunan.
- b. Perluasan jaringan inovasi dan kerjasama internasional akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparatur Pemerintah Kabupaten Pangandaran
- c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang akan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran
- d. Pengembangan klaster industri Agro-Mina-Wisata Berbasis Potensi Unggulan akan dapat menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat
- e. Mendorong tumbuhnya usaha baru berbasis iptekin di kalangan muda dan komunitas melalui pengembangan inkubator bisnis serta berkembangnya industri agropariwisata termasuk pangan organik, produk kerajinan dan industry pendukung pariwisata lainnya.

3. Penerapan *green economy* (ekonomi ramah lingkungan)

Aktivitas-aktivitas ekonomi yang sangat mempertahankan kelangsungan fungsi lingkungan menjadi prasarat untuk perdagangan global. Peluang ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan Kabupaten Pangandaran yang telah mulai merintis penerapan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.

4. Perdagangan Bebas

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sebagai wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya secara langsung akan memberi dampak langsung bagi perekonomian Indonesia dan Kabupaten Pangandaran pada khususnya. Kerjasama ekonomi regional dan perjanjian bilateral dan multilateral memberikan peran secara khusus bagi Kabupaten Pangandaran.

5. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengatasi hambatan jarak dan waktu

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempengaruhi segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Revolusi telekomunikasi membuat dunia menjadi seperti kampung global yang menghilangkan seat batas teritorial suatu negara. Akibat adanya saling ketergantungan membuat guncangan di sebuah negara dan kawasan bisa dalam waktu sekejap mengguncangkan negara dan kawasan lainnya.

6. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mendorong budaya inovasi, tidak hanya di lingkungan pemerintahan daerah, tetapi juga kepada masyarakat dan dunia usaha.

7. RPJPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016-2025

Visi Daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 adalah “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Visi jangka panjang di atas menggambarkan kondisi Kabupaten Pangandaran pada 10 (sepuluh) tahun yang akan datang, yaitu Tahun 2025 baik infrastruktur, suprastruktur, fasilitas dan pelayanannya, maupun sumber daya manusianya harus sudah mampu mendukung Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata utama di Pulau Jawa. Termaju dalam arti kondisi Kabupaten Pangandaran pada saat itu sudah mensejajarkan diri atau bahkan melebihi daerah tujuan wisata paling maju lainnya di Pulau Jawa.

Kondisi relatif pencapaian Visi 2025 selayaknya dapat diukur dari beberapa kriteria “Tujuan Wisata Termaju” sebagai berikut :

- Kabupaten Pangandaran memiliki ketersediaan infrastruktur, suprastruktur, fasilitas dan pelayanan yang berkelas dunia;
- Kabupaten Pangandaran dengan potensi wisata dan keanekaragaman kekhasannya masing-masing dapat ditata agar terintegrasi secara harmonis sehingga menjadi kawasan pusat pariwisata terpadu;
- Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Pulau Jawa; dan
- Kabupaten Pangandaran dapat menyejahterakan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kearifan lokalnya.

Pemenuhan kriteria tersebut secara bersama-sama dan saling melengkapi akan mewujudkan cita-cita dan tujuan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ingin memperkokoh keberadaannya sebagai Kabupaten Pariwisata

3.2.2. PELUANG PENGUATAN SIDA DARI ASPEK UNSUR SIDA

1. Tim Koordinasi SIDA

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah membentuk Tim Koordinasi SIDA. Tim ini bertugas untuk menyusun Roadmap Penguatan SIDA, melaksanakan program Penguatan SIDA dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA.

2. Banyaknya Inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Pangandaran memiliki perguruan tinggi dan SMK yang banyak menghasilkan iptekin yang dapat dihilirisasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia usaha. Lembaga penghasil iptekin di Kabupaten Pangandaran yaitu :

- 1) Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Program Studi : Budidaya Ikan, Pengolahan Hasil Laut, Teknologi Kelautan

Tabel 11
Data Inovasi Produk

NO	NAMA PRODUK
1	Sabun Padat Dari Ekstrak Teripang
2	Fish Pillow
3	Jelly Drink Natade Nipah
4	Lumpsea
5	Masker Kawai
6	Dawet Lele
7	Lets Go (Lele Siap Goreng)
8	Magot BSF
9	Crusty Crab
10	Kripik Mangrove Djeruju
11	Coklat Evaleen
12	Rainbow Fish Stick
13	Jelly Mang Ice
14	Teh Mangrove
15	Krukbuosss (Kerupuk Ikan Gabus)
16	Mini Akuarium dari bahan pipa PVC dan Akrilik
17	Dodol Rumput Laut
18	Mochi Rumput Laut
19	Bobasum (Boba Sargasum)
20	Onidang Schotel (Macaroni Udang Schotel)
21	Mie Rumput Laut Nusantara
22	Bonbons de Palme (Permen Buah Nipah)
23	Nona Nori (Abon Rumput Laut)
24	D'Fish Ricebox
25	Quastetic (Aquarium Asetetic/Hiasan Akuarium)
26	Scrub Wajah berbahan Garam dan Ulva Lactuca
27	LUGAYU (Lulur dari bahan dasar garam)
28	Masker Wajah dari bahan Rumput Laut Ulva Lactuva

NO	NAMA PRODUK
29	Alat Ukur Parameter Fisika Pengelolaan Kualitas Air
30	Remotely Operated Vehycle (ROV) berbasis Arduino
31	Alat Pengukur Tinggi Gelombang berbasis Arduino
32	Alat Pengukur Kecepatan Arus berbasis Arduino
33	Alat Pengukur Suhu dan Cuaca berbasis Arduino
34	Alat Pengukur Panjang Hiu berbasis Arduino
35	Alat Pengukur Tinggi Pasang Surut berbasis Arduino

Sumber : Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, 2020

- 2) Universitas Padjadjaran yang memiliki Jurusan Perikanan, Administrasi Bisnis, Peternakan, Ilmu Komunikasi dan Keperawatan.
- 3) Universitas Saleh Budiman
- 4) Universitas Galuh Pangandaran
- 5) SMK Swasta NU Pelita Nusantara
- 6) SMK Swasta Pasundan Cijulang
- 7) SMK Negeri 1 Cijulang
- 8) SMK Swasta Miftahul Ulum Merak
- 9) SMK Swasta Teknologi Modern Kalipucang
- 10) SMK Swasta Al Kautsar Kalipucang
- 11) SMK Swasta Al-Masturiyah Langkaplancar
- 12) SMK Swasta Samudera Buana Langkaplancar
- 13) SMK Negeri 1 Padaherang
- 14) SMK Swasta Pasundan Padaherang
- 15) SMK Negeri 1 Pangandaran
- 16) SMK Swasta Putera Pangandaran
- 17) SMK Swasta Bhakti Kencana Pangandaran
- 18) SMK Swasta Kesehatan Parigi
- 19) SMK Swasta Tunas Brilliant Parigi
- 20) SMK Swasta Asy Syifa 02 Parigi
- 21) SMK Swasta Bakti Karya Parigi
- 22) SMK Swasta Nurul Huda
- 23) SMK Swasta Muhammadiyah Mangunjaya
- 24) SMK Plus Darunnajah Padaherang
- 25) SMK Industri Logam Pangandaran
- 26) SMK Swasta IT Ibnu Ahkam Kalipucang
- 27) SMK Negeri 2 Pangandaran

28) SMK Plus Maarif NU Parigi

3. Layanan Masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Pangandaran juga dapat memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Berikut adalah layanan masyarakat yang dapat diberikan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 12

Data Layanan Masyarakat Politeknik Kelautan dan Perikanan Kab Pangandaran

NO	JENIS LAYANAN MASYARAKAT
1	Pelatihan Pengelolaan dan Monitoring Mangrove dan Penanaman Mangrove
2	Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Kapal Fiber
3	Pelatihan Pembuatan Akuaponik dan Penaman Mangrove
4	Pelatihan Pembuatan Garam Krosok
5	Pelatihan Pembuatan Garam SPA
6	Pelatihan Selam Dasar
7	Pelatihan Pembuatn Perangkat Deteksi Suhu dan pH Air Berbasis Arduino
8	Pelatihan Pembuatan Bakso Ikan
9	Pelatihan Pengolahan Ikan Asin
10	Pelatihan Pengolahan Fish Jelly Produk
11	Pelatihan Pemanfaatan Rumput Laut sebagai Produk Non Konsumsi
12	Pelatihan Pembuatan Ikan Patin Asap
13	Pelatihan Pembuatan Lumpia Ikan Patin
14	Pelatihan Budidaya Udang Vannamei
15	Pelatihan Budidaya Udang Vannamei Diskotik (Diseminasi Kolam Plastik)
16	Pelatihan Budidaya Ikan Hias
17	Pelatihan Penggunaan Probiotik
18	Pelatihan Budidaya Ikan Hias
19	Pelatihan Aquascape
20	Tempat Uji Kompetensi (TUK) Kelautan dan Perikanan

Sumber : Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, 2020

3.2.3. PELUANG PENGUATAN SIDA DARI ASPEK PENGEMBANGAN SIDA

1. Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sektor pariwisata di Pangandaran merupakan salah satu tujuan utama dari destinasi wisata di Indonesia, hal ini termaktub dalam PP Nomor 50 Tahun 2011 RIPPARNAS 2010 2025 yang menetapkan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Meskipun merupakan kabupaten yang memiliki daerah pesisir dengan potensi wisata alam pantainya, Kabupaten Pangandaran memiliki potensi wisata alam lainnya, yaitu wisata cagar alam, wisata rawa dan wisata

sungai. Jenis potensi wisata lainnya yang dimiliki adalah wisata budaya dan wisata buatan/minat khusus. Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat dibagi kedalam tiga kategori :

- Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya yang memperlihatkan kekhasan lokal dari kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang diantaranya adalah Batu kalde yang bertempat di Cagar Alam Pangandaran, Gua Panggung berada di obyek wisata Cagar Alam Pangandaran dan Sembah Agung di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang;
- Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam yang merupakan obyek wisata berbasis pantai dan cagar alam yang diantaranya adalah Karang Nini, Lembah Putri, Karapyak, Palatar Agung, Pangandaran, Karang Tirta, Batu Hiu, Batu Karas, Madasari dan Keusik Luhur;
- Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus yang merupakan objek wisata yang dibuat secara khusus untuk menunjang minat-minat tertentu yang diantaranya adalah objek wisata sungai Citumang, Karang Nini, Gua Donan, Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon dan Curug Jambe dan Cagar Alam Pananjung.

2. Peluang Kerjasama dengan Dunia Usaha

Melalui Program CSR, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat bekerjasama dengan dunia usaha yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mengembangkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Daerah. Industri yang berada di Kabupaten Pangandaran, antara lain :

- 1) PT PECCU
- 2) Industri Minyak
- 3) King Star Plastic
- 4) Kecap Cap Jago
- 5) Pacific Eastern Coconut Utama
- 6) Industri Garam Rakyat

3. Kerjasama dengan Komunitas Kreatif

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat bekerjasama dengan komunitas kreatif untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mengembangkan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Daerah, antara lain :

- 1) Komunitas Rumah Plankton (pegiat literasi)
- 2) KOMUDITIF (Komunitas Muda Mudi Kreatif) Pangandaran

4. Kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap hasil iptekin/litbangyasa

Banyak industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa untuk proses produksinya. Demikian pula dengan pembudidaya perikanan, sudah beberapa pembudidaya yang memanfaatkan hasil iptekin untuk proses budidayanya.

5. Kerjasama dengan lembaga masyarakat yang beraktifitas di sektor pariwisata

Kelembagaan pengelola pengembangan klaster Berbasis Potensi Unggulan Lokal yaitu:

- 1) KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata) yang berada di setiap kecamatan dan di tingkat kabupaten
- 2) POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)
- 3) Komunitas Jaga Lembur yang bertugas melakukan pengamanan di lokasi destinasi wisata

BAB 4

KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

Bab ini menjelaskan kondisi SIDA yang akan dicapai ke depan berdasarkan hasil analisis kondisi SIDA saat ini serta hasil analisis tantangan dan peluang

Langkah yang dilakukan adalah :

1. Menetapkan target capaian indikator *outcome* beberapa tahun ke depan yang ada dicapai dan
2. Menetapkan langkah-langkah pencapaian indikator *outcome* melalui penyusunan *actionplan* bagi pelaksanaan: penguatan kebijakan SIDA, penataan unsur SIDA , penataan Kelembagaan SIDA, penataan Jaringan SIDA, penataan Sumberdaya SIDA, dan pengembangan SIDA

Tabel 13
Kondisi SIDA Yang Diharapkan Pada tahun 2025

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 1 : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Program SIDA masuk ke dalam Dokumen RPJPD dan RPJMD	Program SIDA terintegrasi ke dalam Dokumen RPJPD dan RPJMD.
		Peraturan Daerah terkait Inovasi Daerah	Diterbitkannya Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Inovasi Daerah
		Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Inovasi Daerah	Diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Inovasi Daerah
		Database inovasi	Database inovasi terdokumentasikan dengan baik
		Database bisnis yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa	Data bisnis perikanan yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa terdokumentasikan dengan baik
		Sistem perijinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan kompetitif berbasis TIK	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Tingkat Kabupaten Pangandaran
		Kebijakan insentif bagi pengembangan inovasi dan bisnis yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman	Adanya Kebijakan Insentif bagi pengembangan inovasi dan bisnis yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman dikarenakan belum memiliki Rencana Umum Penanaman Modal
		Belanja iptekin terhadap APBD	Belanja iptekin terhadap APBD terukur
		Ruang publik sebagai sarana untuk berinteraksi antar warga masyarakat untuk memunculkan komunitas-komunitas kreatif	Peningkatan pemanfaatan ruang publik sebagai sarana untuk berinteraksi antar warga masyarakat untuk memunculkan komunitas-komunitas kreatif

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 1 : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Ruang Publik sebagai sarana untuk berinteraksi antar pelaku inovasi dan bisnis (misalnya <i>Science Techno Park</i>)	Peningkatan pemanfaatan ruang publik sebagai sarana untuk berinteraksi antar pelaku inovasi dan bisnis
		Ketersediaan infrastruktur pengembangan kapasitas (diklat) untuk mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis hasil iptekin	Membangun Balai Latihan Kerja sebagai infrastruktur pengembangan kapasitas (diklat) untuk mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis hasil iptekin
		Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk belanja hasil iptekin/litbangyasa	Menetapkan Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk belanja hasil iptekin/litbangyasa
		Kebijakan Pembentukan Posyantek dan Pengelolaan SDA dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Menetapkan Kebijakan Pembentukan Posyantek dan Pengelolaan SDA dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG)
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Tim Koordinasi SIDA	Tim Koordinasi SIDA bekerja optimal sesuai tugas dan fungsinya
		.Jumlah Kelembagaan IPTEKIN	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya lembaga litbang daerah setara eselon 3 • Memiliki tenaga Fungsional Peneliti • Terbentuknya Posyantek dan Posyantek Antar Desa • Berkembangnya Komunitas kreatif • Terbangunnya wahana penunjang iptekin
		Kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap hasil iptekin/litbangyasa	Meningkatnya jumlah industri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kemampuan untuk menyerap hasil iptekin/litbangyasa
	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Sosialisasi kaidah-kaidah Penguatan SIDA kepada seluruh aktor di daerah (ABGC)	Meningkatnya kolaborasi inovasi antar aktor SIDA
		Interaksi antar penghasil inovasi dan bisnis	Meningkatnya interaksi antar penghasil inovasi dan bisnis

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat	Meningkatnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat belum optimal, antara lain dengan UNPAD
		Kerjasama pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan	Meningkatnya pembinaan terhadap LPK swasta
		Aktifitas Posyantek dan Posyantek Antar Desa	Terbentuknya posyantek dan meningkatnya aktifitas Posyantek dan Posyantek Antar Desa dalam Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
	Elemen 4: Budaya inovasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam berinovasi	Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berinovasi yang ditunjukkan dengan semakin bertambahnya komunitas-komunitas kreatif tumbuh di masyarakat
		Apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif, baik untuk ASN maupun masyarakat dan dunia usaha	Adanya apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif, baik untuk ASN maupun masyarakat dan dunia usaha
		Akses terhadap Hasil Iptekin/Litbangyasa	Jumlah masyarakat yang mengakses hasil Iptekin/Litbangyasa sudah terdokumentasi dengan baik
	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Meningkatnya kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemajuan sistem inovasi
		Kerjasama antar daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam pemajuan sistem inovasi
	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Layanan Sentra KI	Terbangunnya Sentra KI
		Jumlah KI yang didaftarkan	Meningkatnya jumlah KI yang didaftarkan

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Kelembagaan pengelola pengembangan klaster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Meningkatnya sinergitas dan kolaborasi antar kelembagaan pengelola pengembangan klaster Berbasis Potensi Unggulan Lokal, yaitu antara Tim Koordinasi Persiapan GSTC-D, Kompepar, Pokdarwis, Komunitas Jaga Lembur dan dunia usaha pendukung Agro Wisata
		Landasan legal bagi pengembangan klaster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Merevisi RIPPARDA agar mengarah pada pengembangan klaster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal
		Kajian Analisis Input Ouput Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Tersusunnya Kajian Analisis Input Ouput Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal
		Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal Kabupaten Pangandaran	Terintegrasinya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dengan hasil Kajian Pengembangan Potensi Unggulan Lokal
		Rencana Induk Pengembangan Potensi Unggulan Lokal	
		Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal ditetapkan dalam Peraturan Daerah
		Penetapan Desa Wisata Unggulan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah	Penetapan Desa Wisata Unggulan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah
		Infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal (kondisi jalan)	Tersedianya infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal dalam kondisi baik dan merata
		Infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal (media informasi dan promosi)	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan Infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal (media informasi dan promosi)

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Fasilitas akomodasi, kuliner dan <i>merchandise</i> yang sudah terstandarisasi	Meningkatnya jumlah fasilitas akomodasi yang terstandar Meningkatnya jumlah produk kuliner yang sudah terstandarisasi Meningkatnya jumlah restoran yang sudah terstandarisasi Meningkatnya jumlah gerai <i>merchandise</i>
		Kebijakan pengembangan homestay yang terstandarisasi	Tersusunnya kebijakan pengembangan homestay yang terstandarisasi
		Kebijakan kerjasama pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Tersusunnya Kebijakan kerjasama pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal.
		Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Tersusunnya Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal
		Profesionalitas pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya jumlah pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal yang bersertifikat
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Lembaga pendukung pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya kolaborasi antar lembaga pendukung pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
		Pasokan iptekin untuk Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya pasokan iptekin untuk Produk Unggulan Lokal
		Daya serap iptekin penghasil Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya daya serap iptekin pelaku Produk Unggulan Lokal (on farm maupun off farm)
		Pasokan iptekin untuk Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya pasokan iptekin Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
		Daya serap iptekin pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya daya serap iptekin pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal
		Interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Meningkatnya interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa
		Interaksi antara penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Meningkatnya Interaksi antara penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa
		Kerjasama pemanfaatan riset Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan riset Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
	Elemen 4: Budaya inovasi	Budaya inovasi dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya budaya inovasi dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal
		Budaya Inovasi dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya budaya Inovasi dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa	Meningkatnya Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa
		Rantai Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya Rantai Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
		Kesadaran penghasil Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI	Meningkatnya kesadaran penghasil Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI
		Kesadaran pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal terhadap KI	Meningkatnya kesadaran pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal terhadap KI

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Aktifitas Produksi sudah berwawasan Lingkungan	Meningkatnya aktifitas produksi sudah berwawasan Lingkungan
		Aktifitas Pariwisata berstandar internasional	Meningkatnya aktifitas Pariwisata berstandar internasional
Pilar 3 : Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Dokumen rencana induk kawasan spesifik	Tersusunnya dokumen Rencana induk kawasan industri
		Forum jaringan inovasi	Terbentuknya forum jaringan inovasi
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Kerjasama dan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik	Meningkatnya kerjasama dan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik
		Kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah	Meningkatnya kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 3 : Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
		Keberadaan Pusat belajar masyarakat berupa Telecenter atau Broadband Learning Center (BLC)	Terbangunnya Pusat belajar masyarakat berupa Telecenter atau Broadband Learning Center (BLC)
	Elemen 4: Budaya inovasi	Budaya berjejaring antara aktor inovasi	Meningkatnya budaya berjejaring antara aktor inovasi
	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Keterkaitan antar kawasan spesifik dengan perguruan tinggi	Meningkatnya keterkaitan antar kawasan spesifik dengan perguruan tinggi
		Kerjasama antar daerah dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
		Jumlah Desa yang sudah mengembangkan inovasi	Terdatanya jumlah Desa yang sudah mengembangkan inovasi
	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi	Meningkatnya kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi
		Kerjasama internasional dalam pengembangan Pariwisata yang terstandarisasi	Meningkatnya kerjasama internasional dalam pengembangan Pariwisata yang terstandarisasi
Pilar 4: Penguatan Teknopreneur	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Skema pembiayaan dari pemerintah daerah dan swasta bagi pengembangan bisnis inovatif	Tersusunnya Kebijakan Skema Pembiayaan dari pemerintah daerah dan swasta bagi pengembangan bisnis inovatif

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 4: Penguatan Teknopreneur	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Bantuan fasilitas kredit bagi UKM dan IKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Bertambahnya fasilitas kredit bagi UKM dan IKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal
		Kebijakan insentif bagi <i>start up</i> yang mengembangkan Produk Unggulan Lokal berbasis Inovasi	Tersusunnya kebijakan insentif bagi <i>start up</i> yang mengembangkan Produk Unggulan Lokal berbasis Inovasi
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM	Kelembagaan inkubator bisnis	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan inkubator bisnis milik Perguruan Tinggi oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran
		Kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal
		Kegiatan Klinik Bisnis	Meningkatnya Kegiatan Klinik Bisnis
	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Jumlah UMKM dan IKM yang mengembangkan inovasi	Terdatanya Jumlah UMKM dan IKM yang mengembangkan inovasi
		Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM	Meningkatnya interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM
		Interaksi antara penghasil teknologi dengan perbankan	Meningkatnya Interaksi antara penghasil teknologi dengan perbankan
	Elemen 4: Budaya inovasi	Program yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan budaya inovasi di kalangan masyarakat	Adanya program khusus untuk meningkatkan budaya inovasi di kalangan masyarakat

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 4: Penguatan Teknopreneur	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya jumlah dan Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal,
		Kerjasama antar pihak dalam pengembangan usaha inovatif (misalnya pemasaran produk melalui pasar modern)	Meningkatnya kerjasama antar pihak dalam pengembangan usaha inovatif
	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Produk dari bisnis inovatif yang terstandar	Meningkatnya jumlah produk dari bisnis inovatif yang terstandar
		Kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif	Meningkatnya kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif
Pilar 5 : Pengembangan Tematik Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah yang berbasis pada <i>Green Innovation Development (GID)</i>	Tersusunnya Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah yang berbasis pada <i>Green Innovation Development (GID)</i>
	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM	Kelembagaan khusus yang menangani pengembangan <i>Green Innovation Development (GID)</i>	Terbentuknya Kelembagaan khusus yang menangani pengembangan <i>Green Innovation Development (GID)</i>

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
Pilar 5 : Pengembangan Tematik Daerah	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM	Daya dukung iptekin energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah (Pasokan teknologi penghasil energi listrik, pengolahan air bersih, TIK, pengolahan limbah dan sampah)	Meningkatnya pasokan Teknologi Penghasil Energi Listrik yang berasal dari PLN dan Sumber Energi Terbarukan Meningkatnya pasokan Teknologi Pengolahan Air Bersih Meningkatnya pasokan Teknologi Pengolahan Limbah dan Sampah
		Kapasitas absorpsi masyarakat terhadap iptekin energi, air bersih, TIK, pengelolaan limbah dan sampah (Pemanfaatan teknologi penghasil energi listrik, pengolahan air bersih, TIK, pengolahan limbah dan sampah)	Meningkatkan jumlah masyarakat yang memanfaatkan : <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Energi Listrik Terbarukan • Teknologi Pengelolaan Air Bersih • TIK • Teknologi Pengolahan limbah dan sampah
	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Kerjasama litbangyasa terkait energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah	Meningkatnya kerjasama litbangyasa terkait energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah
	Elemen 4: Budaya inovasi	Budaya inovasi di perangkat daerah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah	Meningkatnya budaya inovasi di perangkat daerah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah
	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Kebijakan daerah dalam pembangunan hijau (energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah)	Kebijakan daerah dalam pembangunan hijau (energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah) dapat diimplementasikan dengan baik
	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Kerjasama internasional dalam pembangunan infrastruktur energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah	Meningkatnya kerjasama internasional dalam pembangunan infrastruktur energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah

PILAR	KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI	INDIKATOR	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN (PADA TAHUN 2025)
		Jumlah sertifikasi, standarisasi dan KI untuk infrastruktur energi, air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah	Adanya sertifikasi, standarisasi dan KI untuk infrastruktur energi, air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SIDA

Bab ini akan menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan SIDA yang dimulai dari kebijakan, sektor unggulan, jaringan inovasi, pengembangan teknopreneur dan pengembangan pilar-pilar kebijakan SIDA. Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari Strategi dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.

Visi Daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 adalah “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Visi jangka panjang di atas menggambarkan kondisi Kabupaten Pangandaran pada 10 (sepuluh) tahun yang akan datang, yaitu Tahun 2025 baik infrastruktur, suprastruktur, fasilitas dan pelayanannya, maupun sumber daya manusianya harus sudah mampu mendukung Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata utama di Pulau Jawa. Termaju dalam arti kondisi Kabupaten Pangandaran pada saat itu sudah mensejajarkan diri atau bahkan melebihi daerah tujuan wisata paling maju lainnya di Pulau Jawa. Kondisi relatif pencapaian Visi 2025 selayaknya dapat diukur dari beberapa kriteria “Tujuan Wisata Termaju” sebagai berikut :

1. Kabupaten Pangandaran memiliki ketersediaan infrastruktur, suprastruktur, fasilitas dan pelayanan yang berkelas dunia;
2. Kabupaten Pangandaran dengan potensi wisata dan keanekaragaman kekhasannya masing-masing dapat ditata agar terintegrasi secara harmonis sehingga menjadi kawasan pusat pariwisata terpadu;
3. Kabupaten Pangandaran menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Pulau Jawa;
4. Kabupaten Pangandaran dapat menyejahterakan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kearifan lokalnya.

Pemenuhan kriteria tersebut secara bersama-sama dan saling melengkapi akan mewujudkan cita-cita dan tujuan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ingin memperkokoh keberadaannya sebagai Kabupaten Pariwisata. Pencapaian visi daerah selanjutnya dijabarkan dalam indikator kinerja capaian misi.

1. MISI 1 : Menciptakan Pemerintahan yang Akuntabel dan Bersih.

Pelayanan Publik yang efisien mensyaratkan aparatur pemerintah yang berkompeten dan profesional sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan tata kelola yang akuntabel berarti bahwa sekecil apapun dari setiap bentuk kinerja pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pemberi mandat. Hal ini tercermin dari peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai informasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan. Semua proses di atas berlangsung di bawah naungan sistem peradilan yang dapat diandalkan.

2. MISI 2 : Membangun Sumber daya Manusia yang Berkualitas, Mandiri dan Religius

Sumber daya manusia yang berkualitas diindikasikan dari aspek pendidikan dan kesehatan. Seperti diketahui bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dua indikator utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun tampak dalam misi ini bahwa yang ingin diwujudkan di Kabupaten Pangandaran bukan sekedar peningkatan IPM saja tetapi IPM plus, yaitu SDM berkualitas yang “mandiri” dan “religius”. SDM berkualitas yang mandiri dapat dicerminkan dengan kondisi masyarakat yang dapat memahami kebutuhannya sendiri, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuannya sendiri, memperoleh nilai tambah dari apa yang dihasilkannya, serta mampu menghadirkan Pangandarankaian pilihan-pilihan dalam hidupnya.

SDM berkualitas yang religius dicirikan dari ketaatan terhadap ajaran agama, bermoral, beretika dan berperilaku baik sebagai penjabaran dari masyarakat yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan SDM yang handal saja tanpa mempunyai ketaatan terhadap ajaran agama maka dikhawatirkan SDM yang terbentuk dapat membahayakan atau merusak keberlanjutan perikehidupan Kabupaten Pangandaran melalui berbagai tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Namun dengan adanya unsur “religius” maka SDM yang berkualitas tersebut akan memberikan manfaat bagi dirinya, orang lain (keluarga dan masyarakat) serta kehidupan secara umum melalui berbagai kegiatan positif sehingga pada gilirannya akan berkontribusi terhadap upaya mewujudkan Visi Kabupaten Pangandaran.

3. MISI 3 : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing.

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran terutama potensi sektor pariwisata sangat mendukung untuk terwujudnya perekonomian Kabupaten Pangandaran yang berdaya saing. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Jawa Barat, potensi perekonomian daerah Kabupaten Pangandaran belum cukup tergali. Struktur ekonomi

daerah masih didominasi oleh sektor primer terdiri dari sektor pertanian mencakup persawahan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masih dikelola secara konvensional. Diperlukan pengembangan yang berkesinambungan dan dukungan dari sektor tersier khususnya pariwisata mencakup sektor perdagangan, hotel, restoran dan persewaan, yang dapat menjadi pondasi ekonomi masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya. Pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Pangandaran juga harus menjamin tercapainya pemerataan yang seadil-adilnya bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam pembudidayaan sumber daya yang tidak tak terbatas.

4. MISI 4 : Mewujudkan Pemanfaatan Ruang, Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas yang Berwawasan Lingkungan.

Merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk berupaya secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dari penataan ruang, penyediaan infrastruktur dan fasilitas lingkungan yang secara kuantitas maupun kualitas dapat memenuhi standar teknis / Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan senantiasa memperhatikan aspek daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) demi menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pembangunan yang berwawasan lingkungan akan mengawal terpeliharanya integritas ekologi melalui perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggungjawab, rehabilitasi, pengurangan sampah / limbah, serta perlindungan dan pelestarian terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem yang vital.

5. MISI 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial Budaya yang Bertumpu pada Nilai Religius dan Kearifan Lokal.

Perwujudan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang didasari oleh nilai-nilai religius dan tidak terlepas dari identitas kearifan lokal. Hal ini tercermin dalam sikap masyarakat yang tetap memegang teguh dan berperan aktif menghidupkan nilai-nilai keagamaan di wilayahnya masing-masing, serta bersama-sama berupaya melestarikan kearifan lokal yang masih melekat di masyarakat. Ketahanan religius serta nilai-nilai lokal yang positif tersebut harus senantiasa dijaga untuk meminimalisir eksternalitas negatif yang timbul seiring arus globalisasi, khususnya dalam pengembangan kepariwisataan, umumnya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

6. MISI 6 : Menciptakan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang Kolaboratif.

Misi ini didasarkan bahwa suatu daerah dalam pembiayaan pembangunannya terdiri atas: pertama, pembiayaan yang bersumber dari pemerintah sebagai kebijakan fiskal daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kedua,

pembiayaan yang bersumber dari swasta dan dunia usaha dalam bentuk investasi, dan ketiga, pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat. Kolaborasi yang harmonis dalam pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus dapat menghantarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pangandaran yang terkait dengan tema Penguatan SIDA Kabupaten Pangandaran yaitu Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal , meliputi :

1. Pengembangan Pariwisata

- a. Mengembangkan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat **multidisipliner dan partisipatoris** untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata;
- b. Meningkatkan ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri dengan memanfaatkan kerja sama kepariwisataan regional secara optimal;
- c. Membangun dan mengembangkan Desa Wisata sesuai potensi alam dengan memperhatikan aspek daya dukung lahan dan keberlanjutannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat setempat;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan untuk mendukung Program Sapta Pesona; dan
- e. Mewujudkan pariwisata berwawasan lingkungan dan agama dengan berdasar pada kearifan budaya lokal agar mampu berdaya saing global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Pembangunan Perdesaan

- a. Meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam setempat untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata, namun harus mempertimbangkan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lembaga kemasyarakatan perdesaan agar mandiri dan berdaya saing;
- c. Melestarikan sifat kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat sesuai budaya serta tradisi setempat dalam pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan; dan

- d. Memperkuat ketahanan ekonomi perdesaan melalui ketahanan pangan dan pengembangan serta pelembagaan jaring pengaman sosial ekonomi.

3. Pembangunan Perkotaan

- a. Meningkatkan pembangunan perkotaan dengan prinsip berwawasan lingkungan melalui sektor andalan yakni jasa pariwisata, industri kecil/perdagangan, pendidikan, dan berjati diri budaya serta didukung dengan tempat hunian yang layak;
- b. Mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kerja sama pemerintah dan swasta/masyarakat; dan
- c. Mengembangkan kelembagaan pemerintahan di perkotaan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat perkotaan.

4. Pertanian

- a. Meningkatkan ketahanan pangan yang diarahkan pada keragaman sumber daya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengembangan pertanian yang berorientasi agroindustri dan agribisnis dengan memanfaatkan peluang yang ada;
- c. Memantapkan kelembagaan untuk mewujudkan petani yang kuat, dinamis, mandiri, dan berdaya saing;
- d. Mengembangkan komoditas unggulan dan diversifikasi produk dengan menggali potensi wilayah secara optimal sesuai peluang pasar guna meningkatkan pendapatan petani;
- e. Meningkatkan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan melalui peningkatan pengenalan dan penerapan teknologi dalam budidaya pertanian maupun pengelolaan pasca panen;
- f. Meningkatkan pembangunan perkebunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, menunjang peningkatan ekspor serta mengembangkan agribisnis yang terpadu;
- g. Meningkatkan pembangunan peternakan yang diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan peternakan rakyat, guna mendorong diversifikasi produk dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani; dan

- h. Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha peternakan dan peningkatan pengawasan ternak melalui pengawasan lalu-lintas ternak, cegah dini, dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet).

5. Perikanan

- a. Meningkatkan pembangunan perikanan yang diarahkan pada usaha ikan laut tangkapan, usaha agribisnis perikanan meliputi benih ikan, ikan konsumsi, ikan hias, penanganan pasca panen, dan diversifikasi produk olahan perikanan;
- b. Memperluas jaringan pemasaran hasil usaha perikanan; dan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan.

6. Industri

- a. Meningkatkan pembangunan industri, terutama pengembangan kelompok kecil yang terdapat di sentra/kantong-kantong industri, industri rumah tangga, dan perdesaan;
- b. Meningkatkan pembangunan industri yang diarahkan dengan mengutamakan pemanfaatan bahan baku lokal dan teknologi tepat guna serta industri teknologi tinggi ramah lingkungan;
- c. Meningkatkan pembangunan industri yang diarahkan sebanyak mungkin memanfaatkan dan mengolah bahan lokal dari hasil pertanian dan industri yang menghasilkan input bagi proses produksi pertanian, serta rekayasa mesin/alat tepat guna dalam rangka menghasilkan produk unggulan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor; dan
- d. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan industri menengah dan besar diarahkan sesuai dengan tata ruang dan dapat menyerap tenaga lokal sebanyak-banyaknya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

7. Perdagangan

- a. Mewujudkan sistem perdagangan yang berkeadilan, efisien, dan efektif dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, kelancaran arus distribusi, dan pemantapan pelaksanaan perlindungan konsumen;
- b. Meningkatkan perdagangan barang dan jasa yang diarahkan pada penganekaragaman jenis, jumlah, dan mutu komoditas dalam negeri dan ekspor sesuai dengan permintaan pasar;
- c. Memelihara dan menciptakan peluang pasar dengan peningkatan daya saing, penyempurnaan prasarana dan sarana perdagangan, sistem informasi pasar, serta kegiatan promosi yang lebih terstruktur dan terarah;

- d. Meningkatkan peran serta koperasi, pemilik modal, dan lembaga keuangan melalui sistem kemitraan guna meningkatkan produksi, pemasaran dan perlindungan usaha kecil dan menengah;
- e. Meningkatkan profesionalisme pengusaha kecil dan menengah untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri; dan
- f. Mengembangkan usaha informal dan tradisional yang diarahkan agar tumbuh menjadi unsur ekonomi rakyat yang tangguh, mandiri dan berdaya saing serta mampu berperan dalam penciptaan usaha dan lapangan kerja.

8. Koperasi

- a. Mengembangkan koperasi dan UMKM dengan menitikberatkan kepada aspek permodalan, sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemasaran berbasis pada sentra dan KSP/USP agar menjadi unit usaha yang tangguh dan lebih mampu berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing;
- b. Mengembangkan koperasi dan UMKM agar lebih mampu berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak; dan
- c. Mengembangkan Business Development Services (BDS) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan pendampingan kepada sentra-sentra produksi dan koperasi.

9. Dunia Usaha

- a. Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja lokal;
- b. Membentuk dan atau meningkatkan kelembagaan yang profesional dalam pengembangan penanaman modal di daerah;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan peran aktif swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
- d. Meningkatkan kemitraan usaha antar lembaga usaha koperasi, swasta dan pemerintah

10. Tenaga Kerja

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk membentuk tenaga kerja yang memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang tangguh, terampil, dan menguasai teknologi;

- b. Meningkatkan pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja yang didukung informasi ketenagakerjaan dalam dan luar negeri serta perencanaan tenaga kerja yang komprehensif dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas tenaga kerja;
- c. Mendorong dan memfasilitasi terciptanya community college base untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas;
- d. Memantapkan perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja; dan
- e. Mengupayakan perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya.

11. Kelembagaan Pendidikan

- a. Meningkatkan kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, maupun dunia industri dalam peningkatan mutu pendidikan;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan non-formal yang setara dengan pendidikan formal; dan
- c. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dan inovasi dalam pengembangan pembelajaran yang berstandar nasional maupun global

12. Keuangan dan Kekayaan Daerah

- a. Mengelola dan mengembangkan keuangan dan kekayaan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan sebesar-besarnya manfaat untuk masyarakat;
- b. Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
- c. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah agar tercapai kesinambungan pembangunan dan kemandirian daerah;
- e. Mengalokasikan pembiayaan pembangunan untuk usaha-usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha dengan tetap melaksanakan upaya penghematan tanpa mengurangi mutu pelayanan; dan

- f. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan keuangan dan kekayaan daerah terutama melalui pengawasan melekat untuk mencegah pemborosan dan segala bentuk penyimpangan.

13. Energi

- a. Meningkatkan pembangunan energi yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas perekonomian daerah secara tepat guna dan berhasil guna serta memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan energi alternatif dengan memanfaatkan semua potensi sumber energi yang tersedia; dan
- c. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik pedesaan ke seluruh perdesaan sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang bersifat produktif untuk pengembangan potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

14. Telekomunikasi dan Informasi

- a. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung terwujudnya Pangandaran Kabupaten Cerdas yaitu tatanan daerah Kabupaten Pangandaran yang memiliki prasarana dan sarana yang cerdas (smart infrastructure), pemerintahan yang cerdas (smart governance), ekonomi yang cerdas (smart economy), masyarakat yang cerdas (smart people), kehidupan yang cerdas (smart living) dan lingkungan alami yang cerdas (smart environment).
- b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah;
- c. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh lembaga pemerintahan daerah guna mewujudkan electronic governance.
- d. Meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi yang menjangkau dan merata ke seluruh perdesaan;
- e. Meningkatkan peran media komunikasi dan informasi untuk pemeratakan dan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi, dan menjalin hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai aspek;

15. Fasilitas Umum

- a. Membangun fasilitas umum pada kawasan permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam mengembangkan, mengelola, dan memelihara fasilitas umum; dan

- c. Menerapkan prinsip-prinsip pemulihan biaya (cost recovery) secara selektif dalam mengembangkan fasilitas umum.

Arah Kebijakan RPJMD Ke-2 (Tahun 2021 - 2025)

Dalam rentang lima tahun kedua RPJPD Kabupaten Pangandaran, setiap misi dijabarkan arah pembangunan, strategi dan sasaran pokok yang dilengkapi dengan indikator capaiannya sebagai berikut :

1. MISI 1 : Menciptakan Pemerintahan yang akuntabel dan bersih

Misi ini diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih dengan sasaran:

- 1) Terwujudnya Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base; melalui strategi:
 - Meningkatkan kualitas aparatur perencana dan pengelola data, dengan indikator capaian: Terwujudnya perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat.
- 2) Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM, melalui strategi;
 - Peningkatan kualitas produk hukum yang Produktif dan Implementatif, dengan indikator capaian: Semakin mantapnya kualitas produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Peningkatan kualitas penegakan hukum dan HAM secara obyektif dan merata;
 - Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM, dengan indikator capaian: Rendahnya pelanggaran masyarakat dan aparatur terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi.
- 3) Tersedianya Prasarana dan sarana aparatur pemerintah daerah yang berkualitas, melalui strategi
 - Menginventarisir secara sistematis terhadap sarana dan prasarana yang ada, dengan indikator capaian: Terwujudnya pelayanan publik yang prima.
- 4) Tersedianya Aparatur yang profesional, melalui strategi;
 - Mengikuti pola Rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menyesuaikan pola pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai;

- Menyesuaikan pola insentif dan pengkajian pegawai, dengan indikator capaian: Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual.
- 5) Terwujudnya Organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja aparatur, melalui strategi;
 - Optimalisasi kelembagaan pemerintah yang berprinsip kecil, efektif, efisien (KEE), dengan indikator capaian: Organisasi pemerintah daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - 6) Terwujudnya Kemampuan teknis dan administratif aparatur pengawasan yang profesional, melalui strategi;
 - Menjadikan pengawasan sebagai prinsip dasar dan kebutuhan dasar dalam mencapai tujuan program pembangunan, dengan indikator capaian: Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur.
 - 7) Terwujudnya Pelayanan publik yang prima, melalui strategi;
 - Merubah motivasi dan pola pikir aparatur dalam memahami konsep pelayanan publik, dengan indikator capaian: Meningkatnya jumlah SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2001, dengan indeks kepuasan masyarakat=A.
 - 8) Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang demokratis, melalui strategi;
 - Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat, dengan indikator capaian: Terwujudnya masyarakat yang demokratis.
 - 9) Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah, melalui strategi;
 - Menjadikan ketertiban dan keamanan kebutuhan bersama yang harus ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan indikator capaian : Terwujudnya stabilitas keamanan daerah.

2. MISI 2 : Membangun SDM yang berkualitas, mandiri dan religius

Misi ini diarahkan pada terwujudnya sumber daya manusia yang mandiri dan religius dengan sasaran:

- 1) Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui strategi :
 - Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia dengan indikator capaian: IPM = 82,54;

- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan indikator jumlah penduduk Tahun 2025 maksimal 600.000 Jiwa;
 - Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dengan indikator capaian Angka Fertilitas Total (AFT) = 1,80.
- 2) Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif, melalui strategi:
- Meningkatkan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan, dengan indikator capaian: Indeks Pendidikan = 93,92;
 - Mengembangkan Pendidikan Wajib Belajar Menengah 12 Tahun yang Bermutu, dengan indikator capaian: angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) = 12,33 Tahun;
 - Melakukan rekrutmen guru pendidikan tingkat dasar dengan standard yang lebih tinggi, transparan dan bebas KKN, dengan indikator capaian 90% pemenuhan kebutuhan tenaga guru tingkat dasar dipenuhi melalui sistem rekrutmen terbuka yang transparan dan bebas KKN;
 - Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dengan indikator capaian : 100% telah mempunyai sertifikat mengajar:
 - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan, dengan indikator capaian : 100% lembaga pendidikan telah menerapkan SPM;
 - Meningkatkan Kualitas dan akses pendidikan non formal, dengan indikator capaian AMH = 99,78 %.
- 3) Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui strategi:
- Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau;
 - Meningkatkan kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum; meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
 - Meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dengan indikator capaian: Indeks Kesehatan = 82,12 ; Angka Harapan Hidup = 74,90 ; 100% fasilitas kesehatan memenuhi SPM kesehatan ; Angka Kematian Bayi = 26/1000 kelahiran hidup; menurunnya Jumlah Kematian Ibu Melahirkan = 10 orang/tahun.
- 4) Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, melalui strategi:
- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dengan indikator capaian: Terlaksananya

pemahaman dan pengamalan agama dalam perilaku kehidupan masyarakat Kabupaten Pangandaran;

- Meningkatkan Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan Inter Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah, dengan indikator capaian: Terpeliharanya sikap toleransi dan Kerukunan Umat Beragama.
- 5) Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan Gender, melalui strategi:
- Meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender dengan indikator capaian: Terpeliharanya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan dan Terpeliharanya hak-hak perlindungan perempuan dan anak.

3. MISI 3 : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing

Misi ini diarahkan pada terwujudnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing serta sehat dan berkeadilan, dengan sasaran:

- 1) Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan, melalui strategi;
- Meningkatkan Pertumbuhan Riil dan Kontribusi Riil Sektor Perekonomian daerah terutama Jasa Wisata, Pertanian dan Perdagangan berbasis dengan mengembangkan industri pengolahan, dengan indikator capaian: LPE lebih besar 6%; Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia minimal 17% (kategori rendah); PDRB Riil/kapita minimal Rp 16.200.000 per tahun; Indeks daya beli 71,58;
 - Memperbaiki stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, dengan indikator capaian: Tingkat inflasi umum satu digit;
 - Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency pariwisata, dengan indikator capaian: Tingkat Pengangguran Terbuka 12%; Kesempatan kerja minimal 85%.
 - Memberikan Kemudahan Pelayanan Perijinan dan Kepastian Hukum bagi investor dan dunia usaha, dengan indikator capaian: Nilai Investasi berskala nasional meningkat 40%.
- 2) Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing, melalui strategi;
- Mengembangkan Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata, dengan indikator capaian: Meningkatnya Jumlah wisatawan sebesar 45%.
- 3) Terwujudnya Kerja sama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya, melalui strategi;

- Membentuk sinergisme kegiatan ekonomi antar wilayah, dengan indikator capaian: Meningkatnya kegiatan ekonomi antardaerah di Priangan Timur.

4. MISI 4 : Mewujudkan pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang berwawasan lingkungan

- 1) Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu, melalui strategi:
 - Mengendalikan pencemaran udara, dengan indikator capaian: Minimal 90% lokasi / sample telah memenuhi Baku Mutu (BM).
 - Mengendalikan Pencemaran air, dengan indikator capaian: Minimal 80% sungai dan anak sungai yang ada di Kabupaten pangandaran untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu.
- 2) Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam), melalui strategi;
 - Meningkatkan dan mengendalikan kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi), dengan indikator capaian: Ruang terbuka hijau publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak 50% (dalam bentuk taman, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya).
- 3) Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi, melalui strategi;
 - Mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah), dengan indikator capaian: 95% sampah dapat dikelola (15% reduce, reuse dan recycle, 80% ke tempat pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 15%, dan landfill 65%).
- 4) Tersedianya ruang kota yang nyaman, teratur, produktif dan berkelanjutan, melalui strategi;
 - Membentuk struktur ruang kota, dengan indikator capaian: minimum 50% pengembangan perkotaan Padaherang-Kalipucang-Pangandaran-Parigi-Cijulang dapat terbangun.
 - Mengendalikan pemanfaatan ruang, dengan indikator capaian: terkendalinya pemanfaatan ruang dan tata bangunan;
 - Menata kawasan kumuh kota dan destinasi wisata, dengan indikator capaian terbebasnya 100% ruang publik kota dan destinasi wisata dari pedagang kaki lima.

- 5) Tersedianya sistem transportasi (prasarana, moda angkutan masal dan manajemen lalu lintas) yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan, melalui strategi:
- Mengembangkan prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota dan wilayah sekitarnya dengan indikator capaian: luas jalan min 8% dari luas wilayah pengembangan perkotaan dan 95% berkondisi baik; Indeks Aksesibilitas minimum 3 km/km² area kabupaten;
 - Mengembangkan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang representatif dan mendukung pariwisata dengan indikator capaian: 50% dari rencana prasarana SAUM dapat terbangun;
 - Mengendalikan aspek-aspek penyebab kemacetan pada hari-hari libur nasional, dengan indikator capaian: teratasinya aspek-aspek kemacetan sebanyak 4 (empat) aspek.
- 6) Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis/ standar pelayanan minimal, melalui strategi:
- Menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan, dengan indikator capaian: TPA sudah 100% berfungsi;
 - Menyediakan sistem drainase yang tertata, dengan indikator capaian: seluruh jaringan drainase di kawasan pengembangan perkotaan telah terbangun dengan terpadu;
 - Menyediakan Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL, dengan indikator capaian: 85% kawasan pengembangan perkotaan telah terlayani oleh Sistem Penanganan Air Limbah Terpadu dengan IPAL.
- 7) Terwujudnya mitigasi bencana yang handal, melalui strategi:
- Menumbuhkan dan meningkatkan pengelolaan bencana (gempa, tsunami, longsor, banjir, angin topan, kebakaran dll.) dengan indikator capaian: tertanggulangnya bencana dan dampak bencana secara dini dan menyeluruh.

5. MISI 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial Budaya yang Bertumpu pada Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Misi ini diarahkan pada terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada nilai religius dan kearifan lokal dengan sasaran:

- 1) Terwujudnya peningkatan mutu kerja sama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran, melalui strategi:

- Membuka akses seluas-luasnya bagi semua warga terhadap informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui berbagai sarana komunikasi massa yang tersedia;
 - Mengatur mekanisme partisipasi warga dalam pembangunan daerah;
 - Mendorong terbentuknya fasilitator/ mediator perkumpulan warga untuk berperan aktif memelihara kehidupan sosial yang nyaman, bersahabat, kreatif, dengan indikator capaian: meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
 - Meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik, dengan indikator capaian: terciptanya kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik.
- 2) Terwujudnya keharmonisan dalam lingkungan Sunda yang inklusif, melalui strategi:
- Mengembangkan pusat–pusat kebudayaan, dengan indikator capaian: meningkatnya peran pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian multikultur dalam budaya Sunda;
 - Meningkatkan sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat, dengan indikator capaian: terpeliharanya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya.
- 3) Terwujudnya kehidupan religius, melalui strategi:
- Mendorong berlangsungnya berbagai kegiatan ibadah keagamaan masyarakat secara aman, tertib dan damai dengan indikator capaian: terwujudnya iklim keagamaan yang harmonis dan kondusif secara berkesinambungan.

6. MISI 6 : Menciptakan Pembiayaan Pembangunan Daerah yang Kolaboratif

Misi ini diarahkan pada terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu, dengan sasaran:

- 1) Optimalnya anggaran pemerintah, melalui strategi:
- Meningkatkan pendapatan daerah dengan indikator capaian: rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 15%;
 - Memperkuat sinergi APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten (fiskal antar pemerintahan), dengan indikator capaian: APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten terintegrasi dan sinergi sepenuhnya;
 - Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan yang inovatif dengan indikator capaian: penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan.

- 2) Terwujudnya peranan besar dari masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, melalui strategi:
- Mengembangkan sistem insentif yang menarik dan fasilitasi untuk sektor swasta dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik, dengan indikator capaian: melembaganya insentif fiskal kepada swasta;
 - Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta, dengan indikator capaian: berkontribusinya perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD.
 - Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, dengan indikator capaian: terwujudnya penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis masyarakat.
 - Menyediakan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik, dengan indikator capaian: terwujudnya insentif fiskal kepada masyarakat.

Tabel 14

Misi RPJMD Tahun 2021-2025 dalam RPJPD Tahun 2016-2025

MISI 1 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERSIH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih	Terwujudnya Peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berdasarkan data base	Meningkatkan kualitas aparatur perencana dan pengelola data	Terwujudnya perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat
	Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM	Peningkatan kualitas produk hukum yang Produktif dan Implementatif	Semakin mantapnya kualitas produk hukum yang sinergi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
		Peningkatan kualitas penegakan hukum dan HAM secara obyektif dan merata	

MISI 1 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERSIH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih	Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM	Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM	Rendahnya pelanggaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta semakin berkurangnya praktek KKN di lingkungan birokrasi
	Tersedianya Prasarana dan sarana aparat pemerintah daerah yang berkualitas	Menginventarisir secara sistematis terhadap sarana dan prasarana yang ada	Terwujudnya pelayanan publik yang prima
	Tersedianya Aparatur yang profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pola Rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Menyesuaikan pola pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai • Menyesuaikan pola insentif dan pengkajian pegawai 	Meningkatnya jumlah SDM aparat yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual
	Terwujudnya Organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja aparat	Optimalisasi kelembagaan pemerintah yang berprinsip kecil, efektif, efisien (KEE)	Organisasi pemerintah daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan
	Terwujudnya Kemampuan teknis dan administratif aparat pengawasan yang profesional	Menjadikan pengawasan sebagai prinsip dasar dan kebutuhan dasar dalam mencapai tujuan program pembangunan	Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparat
	Terwujudnya Pelayanan publik yang prima	Merubah motivasi dan pola pikir aparat dalam memahami konsep pelayanan publik	Meningkatnya jumlah SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2001, dengan indeks kepuasan masyarakat=A.

MISI 1 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN BERSIH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih	Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang demokratis	Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang demokratis
	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah	Menjadikan ketertiban dan keamanan kebutuhan bersama yang harus ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat	Terwujudnya stabilitas keamanan daerah

MISI 2 : MEMBANGUN SDM YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN RELIGIUS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya sumber daya manusia yang mandiri dan religius	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Peningkatan Kualitas SDM	IPM = 82,54
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Jumlah penduduk Tahun 2025 maksimal 600.000 Jiwa
		Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi	Angka Fertilitas Total (AFT) = 1,80
	Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif	Meningkatkan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Pendidikan = 93,92
		Mengembangkan Pendidikan Wajib Belajar Menengah 12 Tahun yang Bermutu	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) = 12,33 Tahun
		Melakukan rekrutmen guru pendidikan tingkat dasar dengan standard yang lebih tinggi, transparan dan bebas KKN	90% pemenuhan kebutuhan tenaga guru tingkat dasar dipenuhi melalui sistem rekrutmen terbuka yang transparan dan bebas KKN

MISI 2 : MEMBANGUN SDM YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN RELIGIUS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya sumber daya manusia yang mandiri dan religius	Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif	Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	100% telah mempunyai sertifikat mengajar
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dalam Bidang Pendidikan	100% lembaga pendidikan telah menerapkan SPM
		Meningkatkan Kualitas dan akses pendidikan non formal	AMH = 99,78 %
Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau; • Meningkatkan kualitas lingkungan bersih melalui sanitasi dasar dan sanitasi umum; meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan; • Meningkatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 	Indeks Kesehatan = 82,12 ; Angka Harapan Hidup = 74,90 ; 100% fasilitas kesehatan memenuhi SPM kesehatan ; Angka Kematian Bayi = 26/1000 kelahiran hidup; menurunnya Jumlah Kematian Ibu Melahirkan = 10 orang/tahun
		Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing

MISI 2 : MEMBANGUN SDM YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN RELIGIUS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya sumber daya manusia yang mandiri dan religius	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Meningkatkan Kerukunan umat beragama meliputi Kerukunan antar umat beragama, Kerukunan Inter Umat Beragama, Kerukunan Antara umat beragama dengan Pemerintah	Terpeliharanya sikap toleransi dan Kerukunan Umat Beragama.
	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan Gender	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender	Terpeliharanya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan dan Terpeliharanya hak-hak perlindungan perempuan dan anak

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Riil dan Kontribusi Riil Sektor Perekonomian daerah terutama Jasa Wisata, Pertanian dan Perdagangan berbasis dengan mengembangkan industri pengolahan	LPE lebih besar 6%; Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia minimal 17% (kategori rendah); PDRB Riil/kapita minimal Rp 16.200.000 per tahun; Indeks daya beli 71,58
		Memperbaiki stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok	Tingkat inflasi umum satu digit
		Perluasan kesempatan lapangan kerja formal di sektor-sektor yang menjadi core competency pariwisata	Tingkat Pengangguran Terbuka 12%; Kesempatan kerja minimal 85%.

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya perekonomian masyarakat yang berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Memberikan Kemudahan Pelayanan Perijinan dan Kepastian Hukum bagi investor dan dunia usaha	Nilai Investasi berskala nasional meningkat 40%.
	Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing	Mengembangkan Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata	Meningkatnya Jumlah wisatawan sebesar 45%.
	Terwujudnya Kerja sama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah Daerah lainnya	Membentuk sinergisme kegiatan ekonomi antar wilayah	Meningkatnya kegiatan ekonomi antardaerah di Priangan Timur

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMANFAATAN RUANG, PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu	Mengendalikan pencemaran udara	Minimal 90% lokasi / sample telah memenuhi Baku Mutu (BM).
		Mengendalikan Pencemaran air	Minimal 80% sungai dan anak sungai yang ada di Kabupaten pangandaran untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu
	Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)	Meningkatkan dan mengendalikan kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi)	Ruang terbuka hijau publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak 50% (dalam bentuk taman, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya).

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMANFAATAN RUANG, PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi	Mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah)	95% sampah dapat dikelola (15% reduce, reuse dan recycle, 80% ke tempat pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 15%, dan landfill 65%).
	Tersedianya ruang kota yang nyaman, teratur, produktif dan berkelanjutan	Membentuk struktur ruang kota	minimum 50% pengembangan perkotaan Padaherang-Kalipucang-Pangandaran-Parigi-Cijulang dapat terbangun
		Mengendalikan pemanfaatan ruang	terkendalinya pemanfaatan ruang dan tata bangunan
		Menata kawasan kumuh kota dan destinasi wisata	Terbebasnya 100% ruang publik kota dan destinasi wisata dari pedagang kaki lima
	Tersedianya sistem transportasi (prasarana, moda angkutan masal dan manajemen lalu lintas) yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan	Mengembangkan prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota dan wilayah sekitarnya	luas jalan min 8% dari luas wilayah pengembangan perkotaan dan 95% berkondisi baik; Indeks Aksesibilitas minimum 3 km/km ² area kabupaten
		Mengembangkan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang representatif dan mendukung pariwisata	50% dari rencana prasarana SAUM dapat terbangun
		Mengendalikan aspek-aspek penyebab kemacetan pada hari-hari libur nasional	Teratasinya aspek-aspek kemacetan sebanyak 4 (empat) aspek.
	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi SPM	Menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan	TPA sudah 100% berfungsi

MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMANFAATAN RUANG, PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi SPM	Menyediakan sistem drainase yang tertata	seluruh jaringan drainase di kawasan pengembangan perkotaan telah terbangun dengan terpadu
		Menyediakan Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL	
	Terwujudnya mitigasi bencana yang handal	Menumbuhkan dan meningkatkan pengelolaan bencana (gempa, tsunami, longsor, banjir, angin topan, kebakaran dll.)	Tertanggulangnya bencana dan dampak bencana secara dini dan menyeluruh

MISI 5 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA YANG BERTUMPU PADA NILAI RELIGIUS DAN KEARIFAN LOKAL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada nilai religius dan kearifan lokal	Terwujudnya keharmonisan dalam lingkungan Sunda yang inklusif	Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan	Meningkatnya peran pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian multikultur dalam budaya Sunda
		Meningkatkan sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terpeliharanya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya.
	Terwujudnya kehidupan religius	Mendorong berlangsungnya berbagai kegiatan ibadah keagamaan masyarakat secara aman, tertib dan damai	Terwujudnya iklim keagamaan yang harmonis dan kondusif secara berkesinambungan
	Terwujudnya peningkatan mutu kerja sama di antara semua pemangku kepentingan dalam	<ul style="list-style-type: none"> Membuka akses seluas-luasnya bagi semua warga terhadap informasi tentang 	Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan

MISI 5 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA YANG BERTUMPU PADA NILAI RELIGIUS DAN KEARIFAN LOKAL

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
	pembangunan Kabupaten Pangandaran	<p>perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui berbagai sarana komunikasi massa yang tersedia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mekanisme partisipasi warga dalam pembangunan daerah; • Mendorong terbentuknya fasilitator/ mediator perkumpulan warga untuk berperan aktif memelihara kehidupan sosial yang nyaman, bersahabat, kreatif, 	
Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada nilai religius dan kearifan lokal		Meningkatkan kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	Terciptanya kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik

MISI 6 : MENCIPTAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG KOLABORATIF

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu	Optimalnya anggaran pemerintah	Meningkatkan pendapatan daerah	Rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 15%
		Menguatkan sinergi APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten (fiskal antar pemerintahan)	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten terintegrasi dan sinergi sepenuhnya

MISI 6 : MENCIPTAKAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG KOLABORATIF			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR CAPAIAN
Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu	Optimalnya anggaran pemerintah	Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan yang inovatif	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan
	Terwujudnya peranan besar dari masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah	Mengembangkan sistem insentif yang menarik dan fasilitasi untuk sektor swasta dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik	Melembaganya insentif fiskal kepada swasta
		Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta	Berkontribusinya perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD
		Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional	Terwujudnya penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional berbasis masyarakat
		Menyediakan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa public	Terwujudnya insentif fiskal kepada masyarakat.

Sumber : RPJPD Kab Pangandaran Tahun 2016-2025

5.1. STRATEGI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Berikut ini adalah strategi yang perlu dilakukan dalam rangka Penguatan SIDA yaitu :

1. Penguatan Kebijakan Sistem Inovasi Daerah.

Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan inovasi, baik dalam kerangka kebijakan daerah dengan memasukan program Penguatan SIDA ke dalam RPJMD dan RKPD, dan juga bagaimana memperkuat peran kelembagaan litbang dalam mendukung Sistem Inovasi Daerah.

2. Pengembangan klaster industri.

Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi terbaik dan meningkatkan daya saing klaster industri unggulan daerah.

3. Pengembangan jaringan inovasi.

Strategi ini sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi dan pembelajaran.

4. Pengembangan teknopreneur.

Strategi ini sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi dan sosial, serta pengembangan sumber daya manusia

5. Pengembangan pilar-pilar kebijakan SIDa.

Strategi ini bertujuan memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang ada serta bagaimana melakukan harmonisasi serta fasilitasi agar SIDa dapat terus bergulir.

Secara umum, strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pangandaran ditempuh melalui 5 (lima) Pilar SIDa yaitu :

1. Pilar 1. Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di Kabupaten Pangandaran secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks makro sebagai bagian integral pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis penguatan sistem inovasi daerah dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah penguatan sistem inovasi daerah (kontekstual).
- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik penguatan sistem inovasi daerah.

2. Pilar 2. Pengembangan Klaster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks meso **Klaster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal** sebagai bagian integral pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan Klaster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan Klaster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal

- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan Klaster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal

3. Pilar 3. Pengembangan Jaringan Inovasi

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks penguatan **kemitraan/kolaborasi, dinamika interaksi, aliran pengetahuan/inovasi, dan manajemen pengetahuan (*knowledge management*)** sebagai bagian integral pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan jaringan inovasi daerah dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan jaringan inovasi daerah (kontekstual).
- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan jaringan inovasi daerah.

4. Pilar 4. Pengembangan Teknopreneur

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja inovasi, difusi dan pembelajaran di daerah secara bersistem (sistemik dan sistematis) dalam konteks meso-mikro pengembangan kelembagaan pusat inovasi **usaha mikro, kecil dan menengah dan UMKM inovatif** dalam kerangka sistem inovasi daerah sebagai bagian integral pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan teknopreneur daerah dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan teknopreneur daerah (kontekstual).
- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan teknopreneur daerah.

5. Pilar 5. Pengembangan Kebijakan Tematik.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi teknologi bagi kepentingan publik serta memperbaiki **elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik** dan kontekstual sebagai bagian integral pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui pendekatan :

- a. Kerangka Kebijakan Inovasi (*innovation policy framework*) sebagai pijakan strategis pengembangan tematik dalam jangka panjang.
- b. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan tematik.

- c. Implementasi operasional secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran spesifik pengembangan tematik

5.2. ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan Sistem Inovasi Daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan dibuat dalam beberapa tahap (setiap tahun). Arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah memperhatikan dan melaksanakan hal-hal seperti dibawah ini :

1. Mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau penelitian dan pengembangan serta mengembangkan kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil penelitian pengembangan. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik daerah.
4. Membangun budaya inovasi di daerah. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di daerah.
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di daerah.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global. Tujuan utama arah kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun pemangku kepentingan di daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemajuan daerah.

Dalam upaya Penguatan Sistem Inovasi di Kabupaten Pangandaran, arah kebijakan sebagai kerangka kerja kolaboratif yang merupakan pijakan bersama para pihak dalam pengembangan sinergitas dan koherensi kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya dirumuskan dalam Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) sebagai berikut :

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi. Adapun cakupan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis antara lain meliputi :

- a. Dokumen perencanaan daerah yang memuat sistem inovasi
- b. Basis Data Inovasi dan Bisnis, meliputi seluruh data untuk meningkatkan kapasitas inovasi dan bisnis.
- c. Peraturan yang mendukung inovasi dan bisnis, mencakup seluruh regulasi untuk mendukung inovasi dan bisnis secara berkelanjutan.
- d. Infrastruktur Dasar Inovasi dan Bisnis, mencakup seluruh infrastruktur yang mendukung inovasi dan bisnis.
- e. Insentif Inovasi dan Bisnis, mencakup pemberian insentif untuk inovasi dan bisnis. Hal ini dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/Litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UMKM.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembangkan atau memperkuat unsur-unsur lembaga/organisasi yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi di Kabupaten Pangandaran, meningkatkan daya ungkit peran iptek/ litbang yang sesuai dan spesifik bagi Kabupaten Pangandaran, serta meningkatkan kemampuan industri, khususnya UMKM, dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan dan hasil litbangyasa/ inovasi serta mengembangkannya.

Cakupan kelembagaan dan daya dukung iptek/ litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM antara lain meliputi :

- a. Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah, meliputi Tim Koordinasi SIDA, Perguruan Tinggi, SMK serta seluruh lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa (litbangyasa) yang terdapat di Kabupaten Pangandaran.
- b. Daya Dukung Iptek, mencakup seluruh sumber daya iptek.

- c. Daya Absorpsi Industri, khususnya UMKM, mencakup seluruh kapasitas daya absorpsi industri, khususnya UMKM.

3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/ terbaik dan/ atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbangyasa yang sesuai dengan potensi terbaik Kabupaten Pangandaran.

Ini mencakup antara lain :

- a. Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi (Jaringan Sistem Inovasi Daerah), dengan tujuan untuk menumbuhkan lembaga dan program yang strategis dan inovatif.
- b. Peningkatan difusi inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan difusi hasil-hasil inovasi (praktik baik, pengetahuan, kepakaran) dan alih inovasi.
- c. Pelayanan berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan teknologi untuk peningkatan kapasitas adopter.

4. Mendorong budaya inovasi.

Tujuan utama kebijakan ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial di Kabupaten Pangandaran.

Ini antara lain terkait dengan :

- a. Penguatan Budaya Inovasi Melalui Jalur Pendidikan dan Pelatihan Inovasi : Sejauhmana kondisi budaya inovasi yang telah diraih melalui jalur pendidikan dan pelatihan (kewirausahaan, keinovasian, peningkatan kapasitas sumber daya aparat).
- b. Penguatan Kohesi Sosial : Sejauhmana inventarisasi, dokumentasi dan sosialisasi teknologi-inovasi masyarakat (kearifan lokal) serta komponen modal sosial lainnya yang dimiliki Kabupaten Pangandaran sebagai sumber inovasi
- c. Apresiasi dan Kampanye Inovasi : Sejauhmana Kabupaten Pangandaran telah memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengkampanyekan budaya inovasi di wilayahnya.
- d. Penumbuhan Usaha Baru Inovatif : Sejauhmana Kabupaten Pangandaran telah mendorong tumbuhnya usaha baru yang inovatif melalui pemberian insentif.

5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.

Tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam system inovasi sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di daerah. Adapun cakupan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional antara lain meliputi :

- a. Prakarsa Klaster Industri Spesifik Daerah dan/atau Prakarsa Sistem Inovasi untuk memperlihatkan perkembangan aktor bisnis dan nonbisnis dalam suatu jaringan atau klaster industri.
- b. Koordinasi Kebijakan Daerah dan Daerah-Nasional untuk menunjukkan ada atau tidaknya mekanisme koordinasi yang lebih terbuka dan dapat memacu system inovasi dan klaster industri.
- c. Pengembangan/Penguatan Kelembagaan Khusus untuk menggambarkan sejauhmana terbangunnya lembaga khusus untuk mempercepat proses terjadinya kolaborasi inovatif.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemajuan Kabupaten Pangandaran. Hal ini antara lain mencakup :

- a. Lingkungan : Sejauhmana prakarsa dan respon terhadap isu lingkungan yang telah diprogramkan.
- b. Standarisasi : Hal ini terutama menyangkut sudah ada atau belumnya penerapan *Measurement Standard Test Quality (MSTQ)*.
- c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejauhmana program Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kapasitas masyarakat tentang HKI.

Dengan memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi di Kabupaten Pangandaran seperti diuraikan di atas, maka secara matriks, Kerangka Strategis dalam upaya Penguatan Sistem Inovasi dapat disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 15
Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi daerah Kabupaten Pangandaran

Pilar 1 terkait dengan Misi 1 : **Menciptakan Pemerintahan yang akuntabel dan bersih**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Berkembangnya ekosistem yang kondusif bagi inovasi di daerah	Tersedianya supra dan infrastruktur dasar sistem inovasi daerah.	Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi inovasi di daerah.	Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya tarik penanaman modal.
			Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptekin untuk memenuhi kebutuhan iptekin strategis daerah dan industri.
			Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi dan hasil litbangyasa
			Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan dasar, menengah dan vokasi
			Memprakarsai kerjasama antar daerah dan antara daerah dengan pusat.
			Melakukan penyelarasan dengan perkembangan global terkait isu KI, lingkungan, dan standar

Pilar 2, 3 dan 4 terkait dengan Misi 3 : **Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Meningkatnya nilai tambah (produktivitas) dari potensi industri unggulan daerah.</p>	<p>Tumbuhnya Klaster Pariwisata yang didukung Produk Unggulan Lokal</p>	<p>Mengembangkan daya saing industri melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah.</p>	<p>Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur klaster industri Pariwisata didukung produk unggulan lokal untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif.</p>
			<p>Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptekin/litbangyasa industri Pariwisata yang didukung Produk unggulan lokal dan Mengembangkan kemampuan absorpsi industri pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>
			<p>Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi pengembangan klaster pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>
			<p>Meningkatkan budaya inovasi klster industri pariwisata yang didukung Produk unggulan lokal dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada SDM Pengelola Klaster Industri pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>
			<p>Meningkatkan rantai nilai klaster industri pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>
			<p>Mengembangkan produk klaster industri Pariwisata didukung Produk</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Berkembangnya kapasitas inovatif dan sentra pertumbuhan baru daerah</p>	<p>Terwujudnya kawasan spesifik pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>	<p>Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi.</p>	<p>unggulan lokal yang berwawasan lingkungan dan berstandar internasional</p>
			<p>Mempersiapkan berbagai kebijakan untuk pembangunan pengembangan kawasan wisata yang didukung produk unggulan lokal</p>
			<p>Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan iptekin/litbangyasa di kawasan wisata pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>
			<p>Menumbuhkembangkan kerjasama dan jaringan inovasi di kawasan wisata pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>
			<p>Mendorong budaya inovasi di kawasan wisata pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>
			<p>Membangun jaringan kawasan wisata pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>
<p>Membangun jaringan dan kerjasama internasional kawasan pariwisata yang didukung produk unggulan lokal</p>			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengembangkan bisnis-bisnis inovatif di daerah.	Berkembangnya Pusat Inovasi dan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dan UKM Inovatif daerah.	Mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya.	Mengembangkan skema pembiayaan bagi teknopreneur
			Memperkuat kelembagaan Pusat Inovasi untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru.
			Mengembangkan interaksi antara penghasil iptekin dengan UMKM dan teknopreneur baru.
			Membangun budaya inovasi di kalangan perguruan tinggi dan pemuda
			Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif.
			Membangun kerjasama internasional untuk pengembangan teknopreneur.

Pilar 5 terkait dengan Misi 4 : **Mewujudkan pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang berwawasan lingkungan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan daya dukung pembangunan Kabupaten Pangandaran yang berkelanjutan.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi/ inovasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi, air bersih, TIK, dan lingkungan yang berkualitas dan proses pembangunan Kabupaten Pangandaran yang berkelanjutan.	Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi/ inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah.	Mengembangkan kerangka umum <i>Green Infrastructure Development</i> (GID).

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan daya dukung pembangunan Kabupaten Pangandaran yang berkelanjutan.</p>	<p>Meningkatnya pemanfaatan teknologi/ inovasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi, air bersih, TIK, dan lingkungan yang berkualitas dan proses pembangunan Kabupaten Pangandaran yang berkelanjutan.</p>	<p>Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi/ inovasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar daerah</p>	<p>Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga iptekin dalam menangani masalah energi, air bersih, TIK, dan lingkungan.</p> <p>Meningkatkan interaksi antara lembaga iptekin dengan masyarakat dalam menangani masalah energi, air bersih, TIK, dan lingkungan</p> <p>Membangun budaya inovasi bersih dan hijau di masyarakat dan pemerintah daerah.</p> <p>Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan kebijakan sistem inovasi dalam menangani masalah energi, air bersih, TIK, dan lingkungan</p> <p>Penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan perkembangan global dalam GID di bidang energi, air bersih, TIK, dan lingkungan</p>

BAB 6

FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA

Bab ini berisi fokus dan program-program yang menjadi prioritas daya saing daerah melalui Penguatan SIDA. Kriteria dalam penetapan prioritas :

- a. Mempunyai dampak bagi perekonomian daerah misalnya signifikan dalam ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ukuran pasar
- b. Dukungan faktor lokal termasuk misalnya keunggulan ketersediaan bahan baku yang memadai dan kompetitif, keunggulan khusus
- c. Dimensi global-prospek peran daerah dalam konteks pasar global misalnya investor return dan sustainabilitas tinggi dalam sektor tertentu
- d. Mempunyai klaster industri (produk/jasa) yang menjadi unggulan daerah, berupa sentra industri yg di dukung oleh semua lembaga/stakeholder terkait.

6.1. FOKUS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah seperti telah dikemukakan pada Bab V, maka di bawah ini dapat diuraikan secara ringkas fokus penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 untuk setiap pilar :

1. Fokus penguatan ekosistem inovasi daerah yang berkait dengan pengembangan pariwisata yang didukung produk unggulan lokal adalah :
 - a. Penguatan regulasi, kelembagaan dan infrastruktur dasar yang kondusif bagi pengembangan bisnis dan inovasi yang berkait dengan pariwisata yang didukung produk unggulan lokal.
 - b. Peningkatan daya dukung kelembagaan iptekin/litbangyasa dalam penguatan inovasi dan bisnis yang dapat diabsorpsi oleh aparatur pemerintah kota, pelaku bisnis dan masyarakat.
 - c. Pengembangan kemitraan strategis dan wahana pengembangan inovasi dan bisnis.
 - d. Penguatan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan.
 - e. Pengembangan keterpaduan kebijakan untuk penguatan inovasi dan bisnis.

- f. Penguatan internal menghadapi dinamika global.
2. Fokus pengembangan klaster industri yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang didukung produk unggulan lokal adalah :
 - a. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan strategis, kerja sama daerah, kelembagaan khusus dan penyesuaian dinamika global untuk kemajuan sentra industri kecil dan menengah bidang kriya.
 - b. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan strategis, kerja sama daerah, kelembagaan khusus dan penyesuaian dinamika global untuk kemajuan sentra industri kecil dan menengah bidang usaha industri perikanan, pertanian dan perkebunan
 - c. Penguatan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kemitraan strategis, kerja sama daerah, kelembagaan khusus dan penyesuaian dinamika global untuk kemajuan sentra industri kecil dan menengah bidang usaha industri pengolahan makanan.
 3. Fokus pengembangan jaringan inovasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang didukung produk unggulan lokal adalah :
 - a. Pengembangan regulasi, infrastruktur dasar, kelembagaan iptekin/litbangyasa, kemitraan strategis, dan penyesuaian dinamika global untuk kemajuan Kawasan Industri.
 - b. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, kelembagaan iptekin/litbangyasa, kemitraan strategis, dan penyesuaian dinamika global untuk pengembangan Kawasan Pariwisata.
 - c. Pengembangan kelembagaan iptekin/litbangyasa, kemitraan strategis, dan penyesuaian dinamika global untuk pengembangan Posyantek dan Posyantek Antar Desa.
 4. Fokus pengembangan teknopreneur yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang didukung produk unggulan lokal adalah :
 - a. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, penumbuhan usaha baru inovatif dan penyesuaian dinamika global untuk kemajuan inkubator bisnis dan teknologi.
 - b. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, penumbuhan usaha baru inovatif dan penyesuaian dinamika global untuk kemajuan *business development service-provider* (BDS-P).
 - c. Pengembangan regulasi, insentif, infrastruktur dasar, penumbuhan usaha baru inovatif dan penyesuaian dinamika global untuk kemajuan SMK Incorporate.

5. Fokus penguatan tematik sistem inovasi yang berkait dengan pengembangan pariwisata yang didukung produk unggulan lokal adalah optimalisasi implementasi TIK dalam bentuk :
 - a. Penguatan infrastruktur TIK
 - b. Peningkatan *e-literacy* atau melek TIK.
 - c. Penguatan regulasi dan tata kelola TIK.
 - d. Penguatan kelembagaan pengembangan infostruktur/aplikasi/SIM *open source*.

BAB 7

RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA

Berikut ini adalah Rencana Aksi Penguatan SIDA yang merupakan wujud implementasi program-program prioritas daya saing daerah. Rencana aksi ini selanjutnya harus diintegrasikan ke dalam RPJMD yang tertuang dalam RKPD tahunan daerah.

Tabel 16
Rencana Aksi Penguatan SIDA Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025

PILAR : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Program SIDA masuk ke dalam Dokumen RPJPD dan RPJMD	Program SIDA belum terintegrasi ke dalam Dokumen RPJPD dan RPJMD.	Program SIDA terintegrasi ke dalam Dokumen RPJPD dan RPJMD	Penelitian dan Pengembangan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	BAPPEDA
Peraturan Daerah terkait Inovasi Daerah	Belum memiliki Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Inovasi Daerah	Diterbitkannya Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Menyusun Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Inovasi Daerah	Menetapkan Perda Pengelolaan Inovasi Daerah Kab Pangandaran	Implementasi	Implementasi	BAPPEDA
Peraturan Kepala Daerah tentang	Belum memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang	Diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah tentang	Penelitian dan Pengembangan			Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang	Memperbaharui Peraturan Kepala Daerah tentang	BAPPEDA

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Pengelolaan Inovasi Daerah	Pengelolaan Inovasi Daerah	Pengelolaan Inovasi Daerah				Pengelolaan Inovasi Daerah	Pengelolaan Inovasi Daerah (sesuai perkembangan inovasi daerah)	
Database inovasi	Database inovasi baru sebatas pada hasil inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah.	Database inovasi terdokumentasikan dengan baik	Penelitian dan Pengembangan	Membangun database inovasi dan bisnis yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa	Update database inovasi dan bisnis yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa	Update database inovasi dan bisnis yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa	Update database inovasi dan bisnis yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa	BAPPEDA
Database bisnis yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa	Data bisnis perikanan yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa sudah ada namun belum terdokumentasikan dengan baik, dan kondisinya masih tersebar di perangkat daerah terkait.	Data bisnis perikanan yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa terdokumentasikan dengan baik						
	Belum ada Database mengenai pemanfaatan hasil teknologi pertanian yang mengarah pada bisnis bidang pertanian	Tersedianya Data bisnis pertanian yang memanfaatkan hasil iptekin/litbangyasa terdokumentasikan dengan baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Database Bisnis pertanian hasil iptekin/litbangyasa terdokumentasikan dengan baik	Pelaksanaan Bisnis bidang pertanian berdasarkan Potensi unggulan daerah	Pengembangan Pelaksanaan Bisnis bidang pertanian berdasarkan Potensi unggulan daerah	Evaluasi Bisnis bidang pertanian berdasarkan Potensi unggulan daerah	Dinas Pertanian

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Sistem perijinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan kompetitif berbasis TIK	<ul style="list-style-type: none"> Perijinan sudah berbasis TIK, jumlah ijin yang dilayani sebanyak 136 ijin dan 17 non perijinan Belum memiliki Rencana Umum Penanaman Modal Tingkat Kabupaten Pangandaran 	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Tingkat Kabupaten Pangandaran	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Tingkat Kabupaten Pangandaran	Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Tingkat Kabupaten Pangandaran dalam peraturan perundang-undangan	Implementasi	Implementasi	DPMPTSP
Kebijakan insentif bagi pengembangan inovasi dan bisnis yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman	Belum memiliki Kebijakan Insentif bagi pengembangan inovasi dan bisnis	Adanya Kebijakan Insentif bagi pengembangan inovasi dan bisnis yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman dikarenakan belum memiliki Rencana Umum Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Merencanakan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	Menyusun Naskah Akademik Raperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	Menetapkan Perda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	Implementasi	DPMPTSP

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Belanja iptekin terhadap APBD	Belanja iptekin terhadap APBD belum terukur	Belanja iptekin terhadap APBD terukur	Pengelolaan e-Government	Koordinasi dan Sinkronisasi	Sinkronisasi dan Kolaborasi	Pemusatan belanja Iptekin	Pemusatan belanja Iptekin	- Diskominfo - Bappeda - BPKD
			Program Penelitian dan Pengembangan	-	-	Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran	Implementasi	BAPPEDA
Ketersediaan infrastruktur pengembangan kapasitas (diklat) untuk mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis hasil iptekin	Belum memiliki Balai Latihan Kerja sebagai infrastruktur pengembangan kapasitas (diklat) untuk mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis hasil iptekin	Membangun Balai Latihan Kerja sebagai infrastruktur pengembangan kapasitas (diklat) untuk mengembangkan inovasi dan bisnis berbasis hasil iptekin	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Konsultasi dan Koordinasi ke provinsi mengenai bantuan pendanaan Gedung BLK	Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kegiatan belajar mengajar pada masing-masing kelas bimbingan BLK	Pelatihan dan Sertifikasi Pengajar BLK	DTKIT

PILAR : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Tim Koordinasi SIDA	Sudah memiliki Tim Koordinasi SIDA, namun karena baru terbentuk sehingga belum dapat bekerja	Tim Koordinasi SIDA bekerja optimal sesuai tugas dan fungsinya	Penelitian dan Pengembangan	Optimalisasi tugas dan fungsi tim koordinasi SIDA	Optimalisasi tugas dan fungsi tim koordinasi SIDA	Optimalisasi tugas dan fungsi tim koordinasi SIDA	Optimalisasi tugas dan fungsi tim koordinasi SIDA	BAPPEDA
.Jumlah Kelembagaan IPTEKIN	<p>Jumlah kelembagaan IPTEKIN sudah ada, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Lembaga Litbangda setara eselon 3, namun pelaksana litbangda hanya setara eselon 4 • Belum memiliki Pejabat Fungsional Peneliti • Keberadaan Perguruan Tinggi sangat terbatas • Keberadaan SMK penghasil iptekin di Kab 	<p>Menguatnya peran dan fungsi kelembagaan IPTEKIN melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya lembaga litbang daerah setara eselon 3 • Memiliki tenaga Fungsional Peneliti 		<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya lembaga litbang daerah setara eselon 3 <p>-</p>	-	-	-	Bagian Organisasi Setda

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
	<p>Pangandaran cukup banyak</p> <ul style="list-style-type: none"> Keberadaan Industri pemanfaat hasil iptekin sangat terbatas. Belum memiliki Posyantek dan Posyantek Antar Desa Komunitas kreatif sangat terbatas Keberadaan wahana penunjang iptekin sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya Posyantek dan Posyantek Antar Desa Berkembangnya Komunitas kreatif Terbangunnya wahana penunjang iptekin 		-	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Posyantek 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi 	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap hasil iptekin/litbangyasa	Jumlah industri khususnya UMKM yang telah berhasil menyerap hasil iptekin/litbangyasa sudah baik, antara lain UMKM yang bergerak di sektor kriya/kerajinan, kuliner.	Meningkatnya jumlah industri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kemampuan untuk menyerap hasil iptekin/litbangyasa	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyusunan Database Industri Mikro, Kecil dan Menengah	Sosialisasi hasil iptekin/litbangyasa kepada pelaku Industri Mikro, Kecil dan menengah yang telah terdata	Pelatihan/Bimtek Iptekin/Litbangyasa	Monitoring dan Evaluasi	DTKIT

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap hasil iptekin/litbangyasa	Jumlah industri khususnya UMKM yang telah berhasil menyerap hasil iptekin/litbangyasa sudah baik, antara lain UMKM yang bergerak di sektor kriya/kerajinan, kuliner.	Meningkatnya jumlah industri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kemampuan untuk menyerap hasil iptekin/litbangyasa	Program Pengembangan UMKM (Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan teknologi tepat guna bidang makanan dan minuman 2. Penyelenggaraan promosi melalui pameran tingkat lokal dan regional (provinsi jawa barat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan teknologi tepat guna bidang kriya/kerajinan 2. Penyelenggaraan promosi melalui pameran tingkat lokal dan regional (Pulau Jawa) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan desain dan packaging produk 2. Penyelenggaraan promosi melalui pameran tingkat nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan desain dan packaging produk 2. Penyelenggaraan promosi melalui pameran tingkat nasional 	DISDAGKOP

PILAR : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Sosialisasi kaidah-kaidah Penguatan SIDA kepada seluruh aktor di daerah(ABGC)	Kaidah-kaidah Penguatan SIDA sudah tersosialisasikan kepada seluruh aktor di daerah (ABGC)	Meningkatnya kolaborasi inovasi antar aktor SIDA	Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Rapat Koordinasi rutin berkala untuk mengetahui kemajuan maupun permasalahan yg dihadapi • Pengawasan dan Evaluasi Berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Rapat Koordinasi rutin berkala untuk mengetahui kemajuan maupun permasalahan yg dihadapi • Pengawasan dan Evaluasi Berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Rapat Koordinasi rutin berkala untuk mengetahui kemajuan maupun permasalahan yg dihadapi • Pengawasan dan Evaluasi Berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Rapat Koordinasi rutin berkala untuk mengetahui kemajuan maupun permasalahan yg dihadapi • Pengawasan dan Evaluasi Berkala 	BAPPEDA

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Interaksi antar penghasil inovasi dan bisnis	Interaksi antar penghasil inovasi dan bisnis antara lain dilaksanakan melalui Temu Bisnis yang difasilitasi oleh Dinas PMPTSP, namun tidak berkelanjutan	Meningkatnya interaksi antar penghasil inovasi dan bisnis	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Database Industri Mikro, Kecil dan Menengah	Perumusan masalah dan isu strategis dengan para pelaku Industri	Penetapan visi misi Industri di Kab Pangandaran	Monitoring dan evaluasi pada kegiatan temu bisnis	DTKIT
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)/ Pembedayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Temu bisnis yang berkelanjutan antara pihak (penghasil inovasi) baik akademisi maupun bisnis dengan pelaku umkm bidang makanan dan minuman olahan	Fasilitasi Dukungan legalitas (regulasi) kemitraan antar pelaku inovasi sebagai tindak lanjut dari temu bisnis	Temu bisnis yang berkelanjutan antara pihak (penghasil inovasi) baik akademisi maupun bisnis dengan pelaku umkm bidang kriya/kerajinan	Fasilitasi Dukungan legalitas (regulasi) kemitraan antar pelaku inovasi sebagai tindak lanjut dari temu bisnis	DISDAGKOP
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Memetakan Rencana Temu Bisnis Tingkat Kabupaten Pangandaran	Menyusun Rencana Temu Bisnis Tingkat Kabupaten Pangandaran	Menetapkan Rencana Temu Bisnis Tingkat Kabupaten Pangandaran	Implementasi	DPMPSTSP
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat belum optimal,	Meningkatnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pendataan dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat	Kegiatan Sosialisasi Inovasi Masyarakat	Kegiatan Sosialisasi Inovasi Masyarakat	Kegiatan Sosialisasi Inovasi Masyarakat	DTKIT

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat belum optimal,	Meningkatnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat	Penelitian dan Pengembangan	Menjalin Kerjasama dengan PT dlm meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat di 1 lokus	Menjalin Kerjasama dengan PT dlm meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat di 2 lokus	Menjalin Kerjasama dengan PT dlm meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat di 3 lokus	Menjalin Kerjasama dengan PT dlm meningkatkan kapasitas inovasi di masyarakat di 4 lokus	BAPPEDA
Kerjasama pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan	Belum ada MOU, namun kegiatan pembinaan terhadap LPK swasta sudah dilakukan	Meningkatnya pembinaan terhadap LPK swasta	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pendataan LPK di Kab Pangandaran	Sosialisasi K3 kepada pelaku LPK swasta	Penyaluran kerja dari alumnus LPK swasta oleh pemerintah	Penyaluran kerja dari alumnus LPK swasta oleh pemerintah	DTKIT
Aktifitas Posyantek dan Posyantek Antar Desa	Belum ada aktifitas Posyantek dan Posyantek Antar Desa	Terbentuknya posyantek dan meningkatnya aktifitas Posyantek dan Posyantek Antar Desa dalam Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Perumusan isu strategis dan visi misi posyantek	Pembentukan dan Perekrutan anggota posyantek	Pembangunan Gedung Posyantek	Kegiatan pertemuan rutin Posyantek tiap bulan	DTKIT

PILAR : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Budaya Inovasi

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif, baik untuk	Sudah ada apresiasi terhadap ASN berprestasi	Adanya apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif, baik	Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan lomba inovasi untuk	Melaksanakan lomba inovasi	Melaksanakan lomba inovasi	Melaksanakan lomba inovasi	BAPPEDA

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
ASN maupun masyarakat dan dunia usaha	tetapi belum optimal, sedangkan apresiasi untuk masyarakat dan dunia usaha yang melakukan kegiatan kreatif inovatif belum ada	untuk ASN maupun masyarakat dan dunia usaha		masyarakat, dan ASN	untuk masyarakat dan ASN	untuk masyarakat dan ASN	untuk masyarakat dan ASN	
Akses terhadap Hasil Iptekin/ Litbangyasa	Belum teridentifikasi jumlah masyarakat yang mengakses hasil Iptekin/ Litbangyasa	Jumlah masyarakat yang mengakses hasil Iptekin/Litbangyasa sudah terdokumentasi dengan baik	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pendataan Iptekin/ litbangyasa	Penyusunan Database Iptekin/litbangyasa	Review dan Monev hasil Iptekin/ Litbangyasa	Review dan Monev hasil Iptekin/ Litbangyasa	DTKIT

PILAR : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Sudah ada kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemajuan sistem inovasi namun masih minim	Meningkatnya kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Penelitian dan Pengembangan	Menjajaki kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	BAPPEDA

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kerjasama antar daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Sudah ada kerjasama antar daerah dalam pemajuan sistem inovasi namun masih minim.	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Penelitian dan Pengembangan	Menjajaki kerjasama antar daerah dalam pemajuan sistem inovasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	BAPPEDA

PILAR : Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Keselarasan dengan perkembangan global

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Layanan Sentra KI	Belum memiliki Sentra KI	Terbangunnya Sentra KI	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyusunan FS dan DED Gedung Sentra Industri	Penentuan Lokpri sesuai RTRW	Pembangunan Gedung Sentra Industri	-	DTKIT
Jumlah KI yang didaftarkan	Jumlah KI yang telah didaftarkan sebanyak 25 usulan	Meningkatnya jumlah KI yang didaftarkan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Pendataan Jumlah pelaku industri Mikro, Kecil dan Sedang	Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada para pelaku industri	Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada para pelaku industri	Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada para pelaku industri	DTKIT

PILAR : Penguatan Klaster Industri

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kelembagaan pengelola pengembangan klaster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kelembagaan pengelola pengembangan klaster Berbasis Potensi Unggulan Lokal yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Himpunan Usaha Pariwisata (PHRI, HPI, ASHITA, ATTAP dan lainnya) KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Pariwisata) yang berada di setiap kecamatan dan di tingkat kabupaten POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) 	Meningkatnya sinergitas dan kolaborasi antar kelembagaan pengelola pengembangan klaster Berbasis Potensi Unggulan Lokal, yaitu antara Kompepar, Pokdarwis, pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Penyusunan rencana strategis pengembangan klaster pariwisata berbasis potensi unggulan lokal	Menyelenggarakan FGD antara Kelembagaan Pengelola Pengembangan Klaster Pariwisata	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Pengembangan Klaster Pariwisata	Tindaklanjut dan evaluasi	Disparbud
Landasan legal bagi pengembangan klaster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Sudah memiliki landasan legal bagi pengembangan klaster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal.	Merevisi RIPPARDA agar mengarah pada pengembangan klaster Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Penelitian dan Pengembangan	-	Revisi Kajian RIPPARDA	Revisi Perda RIPPARDA	Implementasi	BAPPEDA

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kajian Analisis Input Ouput Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kajian Analisis Input Ouput Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal belum disusun	Tersusunnya Kajian Analisis Input Ouput Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Menyusun kajian analisis input output pengembangan pariwisata berbasis potensi unggulan	Tindaklanjut /implementasi	tindaklanjut/ implementasi	tindaklanjut/ implementasi	Disparbud
Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal Kabupaten Pangandaran	Sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pangandaran	Terintegrasinya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dengan hasil Kajian Pengembangan Potensi Unggulan Lokal		-	Integrasi RIPPARDA dg Rencana Induk Pengebangan Potensi Unggulan Lokal	-	-	BAPPEDA
Rencana Induk Pengembangan Potensi Unggulan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki Dokumen Pengembangan Agrowisata; • Sudah memiliki Kajian Pengembangan Potensi Unggulan Lokal 	Memiliki Data Kajian Potensi Unggulan Lokal sebagai dasar pengembangan potensi unggulan lokal	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Rencana Induk Potensi Unggulan Lokal	Pelaksanaan Potensi unggulan daerah	Pengembangan Pelaksanaan Potensi unggulan daerah	Evaluasi kegiatan dan pengembangan Potensi unggulan daerah	Distan
				Menyusun Kajian Rencana Induk Pengebangan Potensi Unggulan Lokal	Menyusun kajian Pengembangan Agrowisata	-	-	BAPPEDA
Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Sudah ada Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal namun	Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal ditetapkan dalam Peraturan Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penyusunan kebijakan pengembangan desa wisata berbasis potensi unggulan	Tindaklanjut /implementasi	tindaklanjut/ implementasi	tindaklanjut/ implementasi	Disparbud

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
	belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah							
Penetapan Desa Wisata Unggulan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah	Belum ada penetapan Desa Wisata Unggulan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah	Penetapan Desa Wisata Unggulan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Implementasi dan Monev	Implementasi dan Monev	Implementasi dan Monev	Implementasi dan Monev	Disparbud
Infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal (kondisi jalan)	Kondisi infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal sudah baik namun belum merata	Tersedianya infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal dalam kondisi baik dan merata		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal	Dinas Bina Marga
Infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal (media informasi dan promosi)	Kondisi infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Lokal sudah baik	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan Infrastruktur penunjang Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal (media informasi dan promosi)	Program Pemasaran Pariwisata	1. Menyusun, mengolah dan menyajikan data kepariwisataan untuk menunjang pemasaran pariwisata 2. Melakukan riset analisa kepuasan wisatawan 3. Menyusun strategi	1. Pemutakhiran data kepariwisataan untuk menunjang pemasaran pariwisata 2. Melakukan riset analisa kepuasan wisatawan 3. Menyusun strategi pemasaran pariwisata 4. Mengelola media promosi	1. Pemutakhiran data kepariwisataan untuk menunjang pemasaran pariwisata 2. Melakukan riset analisa kepuasan wisatawan 3. Menyusun strategi pemasaran pariwisata 4. Mengelola media promosi	1. Pemutakhiran data kepariwisataan untuk menunjang pemasaran pariwisata 2. Melakukan riset analisa kepuasan wisatawan 3. Menyusun strategi pemasaran pariwisata 4. Mengelola media promosi secara online seperti	Disparbud

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
				pemasaran pariwisata 4. Mengembangkan media promosi pada plat form penunjang pemasaran pariwisata	secara online seperti media sosial, website dan youtube dan secara offline seperti mengikuti event promosi pariwisata, brosur, booklet dan media cetak lainnya	secara online seperti media sosial, website dan youtube dan secara offline seperti mengikuti event promosi pariwisata, brosur, booklet dan media cetak lainnya	media sosial, website dan youtube dan secara offline seperti mengikuti event promosi pariwisata, brosur, booklet dan media cetak lainnya	
Fasilitas akomodasi, kuliner dan merchandise yang sudah terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitas akomodasi yang terstandar mencapai 31 Jumlah produk kuliner yang sudah terstandarisasi masih terbatas Jumlah restoran yang sudah terstandarisasi masih terbatas Jumlah gerai merchandise masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah fasilitas akomodasi yang terstandar Meningkatnya jumlah produk kuliner yang sudah terstandarisasi Meningkatnya jumlah restoran yang sudah terstandarisasi Meningkatnya jumlah gerai merchandise 	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemutakhiran database jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Membuat FGD lintas sektoral	Membuat peraturan fasilitasi akomodasi, kuliner dan merchandise yang terstandarisasi	Fasilitasi standarisasi usaha	Disparbud
Kebijakan pengembangan homestay yang terstandarisasi	Belum ada kebijakan pengembangan homestay yang terstandarisasi	Tersusunnya kebijakan pengembangan homestay yang terstandarisasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Menyelenggarakan Pembinaan Pengelolaan Homestay	Menyelenggarakan FGD mengenai Kebijakan Pengembangan Homestay yang terstandarisasi	Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Pembuatan Kebijakan Pengembangan	Pembuatan Kebijakan Pengembangan Homestay	Disparbud

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
						Homestay yang terstandarisasi		
Kebijakan kerjasama pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Belum ada Kebijakan kerjasama pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal.	Tersusunnya Kebijakan kerjasama pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Terbentuknya MOU antara Desa dan Pemerintah	Ditindak lanjuti MOU mengenai Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi lokal	Evaluasi pengembangan Desa wisata berbasis Potensi Lokal	Tindak Lanjut	Disparbud
Profesionalitas pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	SDM Pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan baru mencapai 60%	Meningkatnya jumlah pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal yang bersertifikat	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Memfasilitasi sertifikasi Pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal yang bersertifikat	Memfasilitasi sertifikasi Pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal yang bersertifikat	Memfasilitasi sertifikasi Pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal yang bersertifikat	Memfasilitasi sertifikasi Pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal yang bersertifikat	Disparbud
	Jumlah masyarakat yang memperoleh pembinaan SDM Kepariwisata baru mencapai 375 orang (Tahun 2019)							
	Jumlah pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal yang bersertifikat baru di pelaku kopi robusta							

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
	SDM Pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan baru mencapai 60%	Meningkatnya jumlah pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal yang bersertifikat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pelaksanaan Kegiatan Latihan pelaku Pariwisata Berbasis Pertanian dengan pengembangan produk unggulan lokal	Pelaksanaan Kegiatan Latihan pelaku Pariwisata Berbasis Pertanian dengan pengembangan produk unggulan lokal	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Balai Latihan pelaku Pariwisata Berbasis Pertanian dengan pengembangan produk unggulan lokal	Evaluasi Kegiatan Pelatihan Balai Latihan pelaku Pariwisata Berbasis Pertanian dengan pengembangan produk unggulan lokal	Dinas Pertanian

PILAR : Penguatan Klaster Industri

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Lembaga pendukung pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Lembaga pendukung pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal : <ul style="list-style-type: none"> • HPI • ASITA • Asosiasi Tour dan Travel • PHRI • KOMPEPAR • POKDARWIS 	Meningkatnya kolaborasi antar lembaga pendukung pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Melakukan Pendataan Lembaga pendukung pengembangan pariwisata Berbasis Produk Unggulan	Melaksanakan Sosialisasi Lembaga Pendukung Pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Menyelenggarakan FGD lintas sektoral	Membuat Tim Pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Disparbud

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Pasokan iptekin untuk Produk Unggulan Lokal	Pasokan iptekin untuk Produk Unggulan Lokal memadai	Meningkatnya pasokan iptekin untuk Produk Unggulan Lokal	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Bantuan, baik hibah barang yang di serahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga	Pelatihan dan Bantuan, baik hibah barang yang di serahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga	Pelatihan dan Bantuan, baik hibah barang yang di serahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga	Pelatihan dan Bantuan, baik hibah barang yang di serahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga	DTKIT
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pelaksanaan Kegiatan peningkatan unggulan lokal dengan menjamin kemurnian, kelastarian dan kualitas SDG hewan dan tanaman	Pelaksanaan Kegiatan peningkatan unggulan lokal dengan menjamin kemurnian, kelastarian dan kualitas SDG hewan dan tanaman	Pelaksanaan Kegiatan peningkatan unggulan lokal dengan menjamin kemurnian, kelastarian dan kualitas SDG hewan dan tanaman	Evaluasi Kegiatan peningkatan unggulan lokal dengan menjamin kemurnian, kelastarian dan kualitas SDG hewan dan tanaman	Distan
Daya serap iptekin penghasil Produk Unggulan Lokal	Daya serap iptekin pelaku Produk Unggulan Lokal (on farm maupun off farm) mulai berkembang	Meningkatnya daya serap iptekin pelaku Produk Unggulan Lokal (on farm maupun off farm)	Program Pengembangan UMKM (Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi)	1. Pelatihan pengembangan iptekin bagi peningkatan kapasitas SDM dan produktifitas UMKM produk unggulan lokal jus honje 2. Monitoring hasil pelatihan terhadap pelaku umkm	1. Pelatihan pengembangan iptekin bagi peningkatan kapasitas SDM dan produktifitas UMKM produk unggulan local sale pisang 2. Monitoring hasil pelatihan terhadap pelaku umkm (daya serap iptekin)	1. Pelatihan pengembangan iptekin bagi peningkatan kapasitas SDM dan produktifitas UMKM produk unggulan local gula kelapa 2. Monitoring hasil pelatihan terhadap pelaku umkm (daya serap iptekin)	Penyelenggaraan promosi iptekin pelaku umkm baik event lokal, regional, nasional dan international	DISDAGKOP

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
				(daya serap iptekin) 3.Database pelaku umkm yang telah berhasil menyerap iptekin	3.Database pelaku umkm yang telah berhasil menyerap iptekin	3.Database pelaku umkm yang telah berhasil menyerap iptekin		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Bimbingan terhadap pelaku Produk unggulan lokal	Peningkatan Bimbingan terhadap pelaku Produk unggulan lokal	Peningkatan Bimbingan terhadap pelaku Produk unggulan lokal	Evaluasi kegiatan Bimbingan terhadap pelaku Produk unggulan lokal	Distan
Pasokan iptekin untuk Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pasokan iptekin Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal belum memadai	Meningkatnya pasokan iptekin Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Penelitian dan Pengembangan	Menjajaki kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi penghasil iptekin pariwisata berbasis produk unggulan lokal	Implementasi	Implementasi	Implementasi	BAPPEDA
Daya serap iptekin pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Daya serap iptekin pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal masih minim	Meningkatnya daya serap iptekin pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Penelitian dan Pengembangan	Mendata hasil iptekin yang telah dimanfaatkan oleh pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Melakukan diseminasi hasil iptekin dari lembaga litbang atau perguruan tinggi kepada pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Melakukan diseminasi hasil iptekin dari lembaga litbang atau perguruan tinggi kepada pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Melakukan diseminasi hasil iptekin dari lembaga litbang atau perguruan tinggi kepada pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	BAPPEDA

PILAR : Penguatan Klaster Industri

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal	Belum teridentifikasi interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal	Program Penyuluhan Pertanian	FGD dengan stakeholder pemangku kepentingan	Sosialisasi bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal	Bimbingan teknis penanganan bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal	Penerapan Aplikasi hasil Bimbingan teknis dalam bidang Pariwisata dengan penghasil Produk Unggulan Lokal	Dinas Pertanian
Interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Belum teridentifikasi interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Meningkatnya interaksi antara para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Program Penyuluhan Pertanian	FGD dengan stakeholder pemangku kepentingan	Sosialisasi bidang Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Pendampingan dan Bimbingan teknis penanganan bidang Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Penerapan kegiatan Pariwisata dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Dinas Pertanian
Interaksi antara penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Interaksi antara penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa baru terjalin dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait dan	Meningkatnya Interaksi antara penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) / Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam	Menyusun regulasi kemitraan antar pemasok hasil iptekin dengan penghasil produk unggulan local (pelaku umkm)	MoU antara pemasok iptekin dengan penghasil produk unggulan local (pelaku umkm)	implementasi	Implementasi	DISDAGKOP

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
	Pemerintah Provinsi Jawa Barat		pemberdayaan Usaha Mikro					
			Program Penyuluhan Pertanian	FGD dengan stekholder pemangku kepentingan	Sosialisasi tentang penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Bimbingan teknis penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa	Penerapan penghasil Produk Unggulan Lokal dengan pemasok hasil iptekin/litbangyasa dalam bentuk kegiatan	Dinas Pertanian
Kerjasama pemanfaatan riset Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Belum ada kerjasama pemanfaatan riset Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan riset Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Penelitian dan Pengembangan	Menjajaki kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi penghasil iptekin pariwisata berbasis produk unggulan lokal	Implementasi	Implementasi	Implementasi	BAPPEDA

PILAR : Penguatan Klaster Industri

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Budaya inovasi

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Budaya inovasi dalam pengembangan	Budaya inovasi dalam pengembangan Produk Unggulan	Meningkatnya budaya inovasi dalam pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan lomba inovasi untuk	Melaksanakan lomba inovasi untuk masyarakat dan ASN	Melaksanakan lomba inovasi untuk masyarakat dan ASN	Melaksanakan lomba inovasi untuk masyarakat dan ASN	BAPPEDA

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Produk Unggulan Lokal	Lokal sudah cukup baik	Produk Unggulan Lokal		masyarakat, dan ASN				
Budaya Inovasi dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Budaya Inovasi dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal masih minim	Meningkatnya budaya Inovasi dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Penelitian dan Pengembangan	Melaksanakan lomba inovasi untuk masyarakat, dan ASN	Melaksanakan lomba inovasi untuk masyarakat dan ASN	Melaksanakan lomba inovasi untuk masyarakat dan ASN	Melaksanakan lomba inovasi untuk masyarakat dan ASN	BAPPEDA

PILAR : Penguatan Klaster Industri

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa	Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa sudah baik	Meningkatnya Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal	Monitoring dan Evaluasi Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal	Monitoring dan Evaluasi Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal	Monitoring dan Evaluasi Rantai Nilai Produk Unggulan Lokal	DTKIT
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Sosialisasi Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin /litbangyasa	Bimbingan Teknis Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa	Penerapan Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa	Evaluasi kegiatan Nilai Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa	Distan

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Identifikasi bahan baku untuk produk unggulan perikanan	Sosialisasi penerapan teknologi pengolahan	Pemanfaatan teknologi pengolahan produk perikanan	Strategi pemasaran dalam rangka peningkatan nilai tambah produk perikanan	DKPKP
Rantai Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Rantai Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal belum ada	Meningkatnya Rantai Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Sosialisasi Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Bimbingan Teknis Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Penerapan Kegiatan Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Evaluasi kegiatan Nilai Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Distan
Kesadaran penghasil Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI	Kesadaran penghasil Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI sudah ada namun masih minim dikarenakan fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah masih terbatas	Meningkatnya kesadaran penghasil Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penerapan Kekayaan Intelektual terhadap seluruh hasil Produk Unggulan	Penerapan Kekayaan Intelektual terhadap seluruh hasil Produk Unggulan	Penerapan Kekayaan Intelektual terhadap seluruh hasil Produk Unggulan	Penerapan Kekayaan Intelektual terhadap seluruh hasil Produk Unggulan	DTKIT
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Sosialisasi Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI	Bimbingan Teknis tentang kesadaran Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI	Penerapan Kesadaran Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI dalam bentuk kegiatan	Evaluasi penerapan Produk Unggulan Lokal berbasis hasil iptekin/litbangyasa terhadap KI	Dinas Pertanian
Kesadaran pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal terhadap KI	Kesadaran pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal terhadap KI belum teridentifikasi	Meningkatnya kesadaran pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal terhadap KI	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Sosialisasi Kekayaan Intelektual kepada pelaku Pariwisata Berbasis PUD	Penerapan Kekayaan Intelektual kepada pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Penerapan Kekayaan Intelektual kepada pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Penerapan Kekayaan Intelektual kepada pelaku Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	DTKIT

PILAR : Penguatan Klaster Industri

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Keselarasan dengan perkembangan global

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Aktifitas Produksi sudah berwawasan Lingkungan	Aktifitas Produksi sudah berwawasan Lingkungan sudah ada namun masih terbatas	Meningkatnya aktifitas produksi sudah berwawasan Lingkungan	Program Penyuluhan Pertanian	Sosialisasi Produksi sudah berwawasan Lingkungan	Bimbingan dan Pendampingan Produksi sudah berwawasan Lingkungan	Penerapan hasil bimbingan teknis Produksi sudah berwawasan Lingkungan dalam bentuk kegiatan	Evaluasi kegiatan Produksi sudah berwawasan Lingkungan	Dinas Pertanian
Aktifitas Pariwisata berstandar internasional	Aktifitas Pariwisata berstandar internasional sudah ada namun terbatas	Meningkatnya aktifitas Pariwisata berstandar internasional		Menjajaki kerjasama untuk meningkatkan aktifitas pariwisata bersatndar internasional	Menjajaki kerjasama untuk meningkatkan aktifitas pariwisata bersatndar internasional	Menjajaki kerjasama untuk meningkatkan aktifitas pariwisata bersatndar internasional	Menjajaki kerjasama untuk meningkatkan aktifitas pariwisata bersatndar internasional	Disparbud

PILAR : Penguatan Jaringan Inovasi

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Instrumen legal penetapan kawasan spesifik (technopark/telese nter/kawasan industri)	Sudah ada kebijakan penetapan Kawasan Industri	Ditetapkannya Kawasan Industri di Kabupaten Pangandaran	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penentuan Lokasi Kawasan Industri di kabupaten Pangandaran	Penyusunan FS dan DED Kawasan Industri	Penyuluhan dan MoU dengan pelaku usaha industri terkait kawasan Industri	Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Pangandaran	DTKIT

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Dokumen rencana induk kawasan spesifik	Belum ada Dokumen rencana induk kawasan industri	Tersusunnya dokumen Rencana induk kawasan industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan Database Industri Makro dan Industri Mikro	Sosialisasi dan Pelatihan terkait Kawasan Industri kepada Pelaku Industri	Konsultasi dan Koordinasi terkait Kawasan Industri ke Dinas Perindustrian Provinsi	Penyusunan Database Industri Makro dan Industri Mikro	DTKIT

PILAR : Penguatan Jaringan Inovasi

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Forum jaringan inovasi	Belum ada forum jaringan inovasi	Terbentuknya forum jaringan inovasi	Penelitian dan Pengembangan	Menjajaki Pembentukan Forum Jaringan Inovasi dan Menyusun Rencana Kerja Forum Jaringan Inovasi Kabupaten Pangandaran	Implementasi Rencana Kerja Forum Jaringan Inovasi Kabupaten Pangandaran	Implementasi Rencana Kerja Forum Jaringan Inovasi Kabupaten Pangandaran	Implementasi Rencana Kerja Forum Jaringan Inovasi Kabupaten Pangandaran	BAPPEDA
Lembaga penghasil Produk Unggulan Lokal Berbasis Iptekin	Tidak Lembaga penghasil Produk Unggulan Lokal Berbasis Iptekin	Adanya Lembaga penghasil Produk Unggulan Lokal Berbasis Iptekin	Program Penyuluhan Pertanian	Sosialisasi Produk Unggulan Lokal Berbasis Iptekin	Bimbingan Teknis tentang Produk Unggulan Lokal Berbasis Iptekin	Kegiatan tentang Produk Unggulan Lokal Berbasis Iptekin	Evaluasi kegiatan Produk Unggulan Lokal Berbasis Iptekin	Dinas Pertanian

PILAR : Penguatan Jaringan Inovasi

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kerjasama dan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik	Belum ada kerjasama dan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik	Meningkatnya kerjasama dan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik	Program Penyuluhan pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Sosialisasi Kerjasama dan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik	Bimbingan Teknis tentang penguatan kelembagaan dan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik	Penerapan alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik ke dalam kegiatan	Evaluasi kegiatan yang mengarah pada alih pengetahuan/ teknologi dan implementasi teknologi spesifik	Dinas Pertanian
Kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah	Belum ada kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah	Meningkatnya kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Menyusun regulasi kemitraan anatar pemasok hasil iptekin dengan penghasil produk unggulan lokal (pelaku umkm)	MoU antara pemasok iptekin dengan penghasil produk unggulan local (pelaku umkm)	implementasi	Implementasi	DISDAGKOP
			Program Penyuluhan pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengenalan dan sosialisasi Kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah	Bimbingan teknis tentang Kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah	Penerapan kegiatan yang mengacu pada Kerjasama difusi teknologi di Bidang Produk Unggulan Daerah	Evaluasi kegiatan	Distan

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Belum ada kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Program Penyuluhan pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengenalan dan sosialisasi Kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Bimbingan Teknis Kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Penerapan Kerjasama difusi teknologi di Bidang Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal dalam bentuk MoU	Evaluasi kegiatan	Distan
Keberadaan Pusat belajar masyarakat berupa Telecenter atau Broadband Learning Center (BLC)	Belum memiliki Pusat belajar masyarakat berupa Telecenter atau Broadband Learning Center (BLC) (sarana pembelajaran komputer dan internet gratis bagi warga)	Terbangunnya Pusat belajar masyarakat berupa Telecenter atau Broadband Learning Center (BLC)	Program Penyuluhan pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	FS pembangunan pusat belajar dan pelatihan bidang pertanian	DED tentang pembangunan pusat belajar dan pelatihan bidang pertanian	pelaksanaan pembangunan pusat belajar dan pelatihan bidang pertanian	Evaluasi kegiatan	Distan

PILAR : Penguatan Jaringan Inovasi

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Budaya inovasi

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Budaya berjejaring antara aktor inovasi	Budaya berjejaring antara aktor inovasi sudah berkembang namun masih minim.	Meningkatnya budaya berjejaring antara aktor inovasi	Penelitian dan Pengembangan	Menjajaki Pembentukan Forum Jaringan Inovasi dan Menyusun Rencana Kerja	Implementasi Rencana Kerja Forum Jaringan Inovasi Kabupaten Pangandaran	Implementasi Rencana Kerja Forum Jaringan Inovasi Kabupaten Pangandaran	Implementasi Rencana Kerja Forum Jaringan Inovasi Kabupaten Pangandaran	BAPPEDA

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
				Forum Jaringan Inovasi Kabupaten Pangandaran				

PILAR : Penguatan Jaringan Inovasi

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Keterkaitan antar kawasan spesifik dengan perguruan tinggi	Belum terjalin keterkaitan antar kawasan spesifik dengan perguruan tinggi	Meningkatnya keterkaitan antar kawasan spesifik dengan perguruan tinggi	Penelitian dan Pengembangan	-	Menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pemajuan system inovasi daerah Kabupaten Pangandaran	Implementasi	Implementasi	BAPPEDA
Kerjasama antar daerah dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Belum terjalin kerjasama antar daerah dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal		Menjajaki kerjasama antar daerah dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Disparbud

PILAR : Penguatan Jaringan Inovasi

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Keselarasan dengan perkembangan global

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi	Belum ada kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi	Meningkatnya kerjasama internasional dalam pengembangan Produk Unggulan Lokal yang terstandarisasi	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Peningkatan pemahaman SDM pelaku UMKM terhadap standarisasi produk	Fasilitasi melalui pelatihan bagi pelaku umkm dalam upaya pemenuhan standarisasi produk	Fasilitasi standarisasi produk	Kerjasama dan promosi tingkat internasional	DISDAGKOP
Kerjasama internasional dalam pengembangan Pariwisata yang terstandarisasi	Sudah ada kerjasama internasional dalam pengembangan Pariwisata yang terstandarisasi antara lain dengan UNCUTO pada Tahun 2015 tentang Kerjasama Pariwisata Berkelanjutan, yaitu di Batu Karas dan Green Canyon	Meningkatnya kerjasama internasional dalam pengembangan Pariwisata yang terstandarisasi		Menjajaki kerjasama internasional dengan pihak lain	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Disparbud

PILAR : Penguatan Teknopreneur

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Skema pembiayaan dari pemerintah daerah dan swasta bagi pengembangan bisnis inovatif	Belum ada skema pembiayaan dari pemerintah daerah dan swasta bagi pengembangan bisnis inovatif	Tersusunnya Kebijakan Skema Pembiayaan dari pemerintah daerah dan swasta bagi pengembangan bisnis inovatif	Penelitian dan Pengembangan	-	-	Menyusun Kajian Kebijakan Skema Pembiayaan dari pemerintah daerah dan swasta bagi pengembangan bisnis inovatif	Menyusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan Skema Pembiayaan dari pemerintah daerah dan swasta bagi pengembangan bisnis inovatif	Bappeda
Bantuan fasilitas kredit bagi UKM dan IKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada fasilitas kredit bagi UKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal Belum ada MoU antara IKM dan Perbankan 	Bertambahnya fasilitas kredit bagi UKM dan IKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Program Pemberdayaan, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Pendataan UMKM yang bergerak pada pengembangan pariwisata berbasis produk unggulan local	Membangun dengan perbankan atau lembaga pembiayaan	Dibuat regulasi tentang pembiayaan untuk pelaku umkm yang bergerak pada pengembangan pariwisata berbasis produk unggulan lokal	Implemetasi	DISDAGKOP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyusunan regulasi terkait fasilitasi kredit usaha perikanan	Penyusunan MoU permodalan/kredit usaha perikanan	Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan tangkap	Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan tangkap	DKPKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyusunan regulasi terkait fasilitasi kredit usaha perikanan	Penyusunan MoU permodalan/kredit usaha perikanan	Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan budidaya	Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan budidaya	DKPKP

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Bantuan fasilitas kredit bagi UKM dan IKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada fasilitas kredit bagi UKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal Belum ada MoU antara IKM dan Perbankan 	Bertambahnya fasilitas kredit bagi UKM dan IKM yang bergerak pada pengembangan Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Penyusunan regulasi terkait fasilitasi kredit usaha perikanan	Penyusunan MoU permodalan/kredit usaha perikanan	Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	DKPKP
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyusunan regulasi terkait fasilitasi kredit usaha perikanan	Penyusunan MoU permodalan/kredit usaha perikanan	Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Fasilitasi kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	DKPKP

PILAR : Penguatan Teknopreneur

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kelembagaan inkubator bisnis	Kelembagaan inkubator bisnis sudah ada milik Politeknik Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta UNPAD Kampus	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan inkubator bisnis milik Perguruan Tinggi oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran	Program Pemberdayaan, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Menyusun regulasi pemanfaatan inkubator bisnis milik PT dengan pemerintah bagi pengembangan produk unggulan daerah	implementasi	implementasi	Implementasi	DISDAGKOP

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
	Pangandaran, namun belum dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran							
Kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal	Kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal cukup baik	Meningkatnya kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal	Program Pengembangan UMKM (Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi)	1. Pelatihan pengembangan iptekin bagi peningkatan kapasitas SDM dan produktifitas UMKM produk unggulan lokal jus honje 2. Monitoring hasil pelatihan terhadap pelaku umkm (daya serap iptekin) 3. Database pelaku umkm yang telah berhasil menyerap iptekin	1. Pelatihan pengembangan iptekin bagi peningkatan kapasitas SDM dan produktifitas UMKM produk unggulan local sale pisang 2. Monitoring hasil pelatihan terhadap pelaku umkm (daya serap iptekin) 3. Database pelaku umkm yang telah berhasil menyerap iptekin	1. Pelatihan pengembangan iptekin bagi peningkatan kapasitas SDM dan produktifitas UMKM produk unggulan local gula kelapa 2. Monitoring hasil pelatihan terhadap pelaku umkm (daya serap iptekin) 3. Database pelaku umkm yang telah berhasil menyerap iptekin	Penyelenggaraan promosi iptekin pelaku umkm baik event lokal, regional, nasional dan international	DISDAGKOP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Sosialisasi bimtek penerapan teknologi pada perikanan tangkap	Pemanfaatan hasil iptekin oleh pelaku usaha perikanan tangkap	Evaluasi pelaku usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan hasil iptekin	Pendataan jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang telah memanfaatkan iptekin	DKPKP

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal	Kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal cukup baik	Meningkatnya kapasitas absorpsi iptekin oleh UMKM Produk Unggulan Lokal	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Sosialisasi bimtek penerapan teknologi pada perikanan budidaya	Pemanfaatan hasil iptekin oleh pelaku usaha perikanan budidaya	Evaluasi pelaku usaha perikanan budidaya yang memanfaatkan hasil iptekin	Pendataan jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang telah memanfaatkan iptekin	DKPKP
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Sosialisasi bimtek penerapan teknologi pada pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pemanfaatan hasil iptekin oleh pelaku pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Evaluasi pelaku pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang memanfaatkan hasil iptekin	Pendataan jumlah pelaku pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang telah memanfaatkan iptekin	DKPKP
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sosialisasi bimtek penerapan teknologi pada pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pemanfaatan hasil iptekin oleh pengolah dan pemasaran hasil perikanan	Evaluasi pengolah dan pemasaran hasil perikanan yang memanfaatkan hasil iptekin	Pendataan jumlah pengolah dan pemasar yang telah memanfaatkan iptekin	DKPKP
Kegiatan Klinik Bisnis	Kegiatan Klinik Bisnis sudah berlangsung di Rumah Kreatif milik BNI	Meningkatnya Kegiatan Klinik Bisnis	Program Pemberdayaan, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Kerjasama dalam upaya integrasi program pemerintah daerah dengan kegiatan klinik bisnis	Sosialisasi peningkatan pemanfaatan klinik bisnis kepada para pelaku umkm	implementasi	Implementasi	DISDAGKOP

PILAR : Penguatan Teknopreneur

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Jumlah UMKM dan IKM yang mengembangkan inovasi	Jumlah UMKM dan IKM yang mengembangkan inovasi belum teridentifikasi	Terdatanya Jumlah UMKM dan IKM yang mengembangkan inovasi	Program Pemberdayaan, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Sosialisasi pentingnya pengembangan iptekin bagi produk UMKM	Pendataan UMKM yang telah mendapatkan fasilitasi pendampingan pengembangan iptekin	Menyusun database pengembangan iptekin	Monitoring dan pemukthairan data	DISDAGKOP
Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM	Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM belum teridentifikasi	Meningkatnya interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM	Program Pemberdayaan, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Penyusunan legal formal upaya Peningkatan sinergitas abcg	Fasilitasi Kerjasama antar penghasil teknologi dengan para pelaku umkm	Fasilitasi pendampingan iptekin	Monitoring dan evaluasi	DISDAGKOP

PILAR : Penguatan Teknopreneur

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Budaya inovasi

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Program yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan budaya inovasi di	Belum ada program khusus yang sudah dilakukan Pemda untuk meningkatkan	Adanya program khusus untuk meningkatkan budaya inovasi di kalangan masyarakat	Penelitian dan Pengembangan	Menyelenggara kan Lomba Inovasi untuk Masyarakat dan ASN	Menyelenggarakan Lomba Inovasi untuk Masyarakat dan ASN	Menyelenggarakan Lomba Inovasi untuk Masyarakat dan ASN	Menyelenggarakan Lomba Inovasi untuk Masyarakat dan ASN	Bappeda

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
kalangan masyarakat	budaya inovasi di kalangan masyarakat							

PILAR : Penguatan Teknopreneur

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal, sudah ada namun terbatas	Meningkatnya jumlah dan Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal	Program Penyuluhan pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Sosialisasi Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal, sudah ada namun terbatas	Bimbingan teknis tentang Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal, sudah ada namun terbatas	Kegiatan yang mengarah pada usaha inovatif potensial untuk mendukung kluster Pariwisata Berbasis Produk Unggulan Lokal, sudah ada namun terbatas	Evaluasi kegiatan	Distan
Kerjasama antar pihak dalam pengembangan usaha inovatif (misalnya pemasaran produk melalui pasar modern)	Kerjasama antar pihak dalam pengembangan usaha inovatif, sudah ada namun terbatas	Meningkatnya kerjasama antar pihak dalam pengembangan usaha inovatif	Program Penyuluhan pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Sosialisasi Kerjasama antar pihak dalam pengembangan usaha inovatif	Bimbingan teknis tentang Kerjasama antar pihak dalam pengembangan usaha inovatif, dan penandatanganan MoU kerjasama	Pengembangan kerjasama dalam bentuk kegiatan	Evaluasi kegiatan	Distan

PILAR : Penguatan Teknopreneur

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Keselarasan dengan perkembangan global

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Produk dari bisnis inovatif yang terstandar	Produk dari bisnis inovatif yang terstandar sudah ada namun masih terbatas misalnya Jus Honje yang sudah masuk pasar ekspor	Meningkatnya jumlah produk dari bisnis inovatif yang terstandar	Program Pemberdayaan, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Pelatihan dan sosialisasi standarisasi produk jus honje (SNI, Eco Green)	Fasilitasi standarisasi produk melalui pendampingan	Pelatihan dan sosialisasi standarisasi produk sale pisang (SNI, Eco Green)	Fasilitasi standarisasi produk melalui pendampingan	DISDAGKOP
			Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme	Sosialisasi Kegiatan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bimbingan Teknis Produk dari bisnis inovatif yang terstandar sudah ada namun masih terbatas misalnya Jus Honje yang sudah masuk pasar ekspor	Evaluasi kegiatan Produk dari bisnis inovatif yang terstandar sudah ada namun masih terbatas misalnya Jus Honje yang sudah masuk pasar ekspor	Distan
Kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif	Belum ada kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif	Meningkatnya kerjasama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif	Program Penyuluhan pertanian dan Program Perizinan Usaha Pertanian	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Evaluasi Kegiatan Izin usaha Pertanian	Distan

PILAR : Pengembangan Tematik Daerah

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah yang berbasis pada Green Innovation Development (GID)	Belum ada Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah yang berbasis pada Green Innovation Development (GID)	Tersusunnya Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah yang berbasis pada Green Innovation Development (GID)		-	-	Penyusunan Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup energi,air bersih, teknologi informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah yang berbasis pada Green Innovation Development (GID)	Implementasi	BAPPEDA

PILAR : Pengembangan Tematik Daerah

KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
Daya dukung iptekin energi,air bersih, teknologi	Pasokan Teknologi	Meningkatnya pasokan Teknologi Penghasil Energi	Penelitian Dan Pengembangan	Baseline Potensi	Pilot Project Konversi energi	Pilot Project Konversi energi	Pilot Project Konversi energi	Bappeda, PUTRPRKP

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
informasi dan komunikasi dan pengolahan limbah dan sampah (Pasokan teknologi penghasil energi listrik, pengolahan air bersih, TIK, pengolahan limbah dan sampah)	Penghasil Energi Listrik : <ul style="list-style-type: none"> • PLN • Belum ada sumber energi terbarukan 	Listrik yang berasal dari PLN dan Sumber Energi Terbarukan Meningkatkan pasokan Teknologi Pengolahan Air Bersih	(Research & Development) Potensi Sumberdaya Listrik Terbarukan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sumberdaya listrik terbarukan (data primer, data sekunder) <ul style="list-style-type: none"> - Konversi energi listrik Sumberdaya air - Konversi energi listrik Sumberdaya sampah - Konversi energi listrik Sumberdaya angin <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di 5 (lima) desa • Rehabilitasi Embung dan Penampung an Air Lainnya (1 unit) • Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan 	listrik dari sumberdaya air skala penelitian. (Microhydro) <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Unit Air Baku (100 unit) • Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air (3 titik) 	listrik dari sumberdaya sampah skala penelitian. <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air (3 titik) 	listrik dari sumberdaya Angin skala penelitian. <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air (2 titik) 	DINAS PUTRPRKP

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
	SPAM Perkotaan : PDAM SPAM Pedesan : Pengelolaan berbasis masyarakat (Pansimas)		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pemeliharaan Mata Air (5 titik) <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan (6 desa) Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan (8 desa) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan (1 paket) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat (1 paket) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan (8 desa) Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan (10 desa) Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan (1 desa) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan (1 paket) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat (1 paket) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan (4 desa) Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan (8 desa) Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan (1 desa) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan (1 paket) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat (1 paket) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan (8 desa) Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan (1 desa) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan (1 paket) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat (1 paket) 	DINAS PUTRPRKP

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
			Perumda Air Minum Pangandaran (Pengembangan Zona A dan B)	Penambahan Sambungan Rumah (1.024 SR) Pengembangan, Perbaikan dan Penggantian Pipa Distribusi (1 paket) Penambahan Sambungan Rumah (572 SR) Pengembangan, Perbaikan dan Penggantian Pipa Distribusi (1 paket)	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Sambungan Rumah (1.024 SR) • Pembangunan IPA Baja Sidamulih (50 l/det) • Pembangunan Intake Sidamulih (50 l/det) • Pengadaan Pompa Intake dan pendukungnya (100 l/det) • Pembangunan Reservoir Sidamulih (500 M3) • Pengembangan, Perbaikan dan Penggantian Pipa Distribusi (1 paket) • Penambahan Sambungan Rumah (572 SR) • Pembangunan Reservoir IPA Baru Cibenda (50 lpd) • Pengembangan, Perbaikan dan Penggantian Pipa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Sambungan Rumah (1.024 SR) • Uprating IPA Ciputrapinggan 100 lpd menjadi 150 lpd (1 paket) • Pembangunan Intake Ciputrapinggan (50 lpd) • Pengadaan Pompa Intake dan pendukungnya (100 lpd) • Pengembangan, Perbaikan dan Penggantian Pipa Distribusi (1 paket) • Penambahan Sambungan Rumah (572 SR) • Uprating IPA Cibenda eksisting 20 lpd menjadi 50 lpd (1 paket) • Pengembangan, Perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Sambungan Rumah (1.024 SR) • Pengembangan, Perbaikan dan Penggantian Pipa Distribusi (1 paket) • Penambahan Sambungan Rumah (572 SR) • Pengembangan, Perbaikan dan Penggantian Pipa Distribusi (1 paket) 	

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
	<p>Pasokan Teknologi Pengolahan Limbah dan Sampah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada IPLT • Belum ada kawasan/system terpusat • Incinerator sederhana terdapat di 3 titik di Desa Pangandaran yg diinisiasi oleh kotaku • TPS3R 	<p>Meningkatnya pasokan Teknologi Pengolahan Limbah dan Sampah</p>	<p>Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota (1 paket) • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 paket) • Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (2 Kecamatan) • Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) • Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) • Operasi dan Pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi (1 paket) • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 paket) • Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 paket) • Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (2 Kecamatan) • Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) • Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) • Operasi dan Pemeliharaan 	<p>dan Penggantian Pipa Distribusi (1 paket)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 paket) • Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 paket) • Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 paket) • Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (3 Kecamatan) • Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) • Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) • Operasi dan Pemeliharaan 	<p>Dinas LHK</p>	

INDIKATOR	KONDISI SIDA SAAT INI	KONDISI SIDA YANG DIHARAPKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI				OPD PENGAMPU
				2022	2023	2024	2025	
				Domestik (1 kegiatan) <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) Pembangunan IPAL skala kawasan Pariwisata (1 paket) Pembangunan IPAL Skala Komunal (2 kecamatan) Pembangunan IPLT Skala Kota (1 paket) 	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan IPAL Skala Komunal (2 kecamatan) 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) Pembangunan IPAL Skala Kota (1 paket) Pembangunan IPAL Skala Komunal (3 kecamatan) 	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (1 kegiatan) <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan IPAL Skala Komunal (3 kecamatan) 	

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Pangandaran, 2015. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025
- Bappeda Kabupaten Pangandaran, 2015. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDa) Kabupaten Pangandaran 2016-2025
- Bappeda Kab. Pangandaran, 2020, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.
- Bappeda Kab Pangandaran, 2020, Kajian Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025.
- Dwiridotjahjono dkk, 2017, Pengembangan Agroekowisata Berbasis Perkebunan Kopi Rakyat Di Kecamatan Tutut Kabupaten Pasuruan., "Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat." vol 3 (2): !57-165 November 2017
- Spillane, James., 1994, Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan. Kanisius. Yogyakarta
- Taufik, T.A. 2005. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah : Perspektif Kebijakan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Riset dan Teknologi. ISBN No 979-9344-18-2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038